



LAPORAN AKHIR

Analisis Demografi untuk Penyusunan RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Akhir Analisis Demografi untuk Penyusunan RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045 dapat diselesaikan tepat pada waktunya dan tidak terdapat kendala yang signifikan. Besar harapan dari tersusunnya Penyusunan Dokumen Analisis Demografi untuk Penyusunan RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045 dapat menjadi acuan Pemerintah Daerah Kota Semarang dalam merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan yang baik secara kewenangan, kelembagaan, serta keterpenuhan akan sarana prasarana pendukung.

Terima kasih kami ucapkan atas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan kepada kami hingga akhir pelaksanaan penyusunan dokumen ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada berbagai pihak yang telah membantu menyusun laporan ini. Dalam penyusunan laporan ini, kami akui masih jauh dari sempurna. Untuk itu saran dan kritik yang membangun kearah penyempurnaan laporan kami terima dengan tangan terbuka. Akhir kata demikian pengantar Penyusunan Dokumen Analisis Demografi untuk Penyusunan RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045, besar harapan kami laporan ini dapat berguna dan membantu semua pihak.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Ruang Lingkup dan Sasaran	4
1.5 Sistematika Laporan.....	5
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN	6
2.1 Kajian Teoritis	6
2.1.1 Pengertian Demografi	6
2.1.2 Teori-Teori Demografi.....	6
2.1.3 Demografi dan Pembangunan	9
2.1.4 Karakteristik Demografi	10
2.1.5 Bonus Demografi.....	12
2.1.6 Kajian Regulasi dan Kelembagaan Data Kependudukan ..	13
2.2 Metode Pelaksanaan Pekerjaan	17
2.2.1 Metode-Metode Proyeksi Penduduk	17
2.2.2 Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan.....	19
2.3 Kerangka Pikir.....	20
BAB III KONDISI KEPENDUDUKAN DAN KONDISI EKSISTING SARANA PRASANA KOTA SEMARANG.....	21
3.1 Luas Wilayah.....	21
3.2 Kondisi Penduduk	24
3.2.1. Jumlah Penduduk.....	24

3.2.2. Kepadatan Penduduk	27
3.2.3. Jumlah Penduduk Menurut Usia.....	29
3.2.4. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan	31
3.3 Kondisi Eksisting Sarana Prasarana Lingkungan di Kota Semarang.....	35
3.3.1. Kondisi Eksisting Rumah/Tempat Tinggal	35
3.3.2. Kondisi Eksisting Pemenuhan Kebutuhan Air Minum.....	40
3.3.3. Kondisi Eksisting Pemenuhan Listrik.....	42
3.3.4. Kondisi Eksisting Pengelolaan Persampahan	44
3.3.5. Kondisi Eksisting Fasilitas Kesehatan.....	50
3.3.6. Kondisi Eksisting Fasilitas Pendidikan	56

BAB IV KEBIJAKAN PEMBANGUNAN RUANG DI KOTA SEMARANG .. 61

4.1 Tinjauan Terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2039.....	61
4.2 Tinjauan Terhadap Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional	66
4.3 Tinjauan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.....	67
4.4 Tinjauan Terhadap Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi.....	68
4.5 Tinjauan Terhadap Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031	74
4.5.1 Rencana Struktur Ruang	74
4.5.2 Rencana Pola Ruang	91
4.5.3 Program Terkait Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Dalam RTRW Kota Semarang	97

BAB V HASIL PROYEKSI DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN.....	98
5.1 Hasil Proyeksi Penduduk	98
5.1.1 Jumlah Penduduk Kota Semarang	98
5.1.2 Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Umur.....	100
5.1.3 Jumlah Penduduk Kota Semarang Berdasarkan Kecamatan.....	106
5.1.4 Kepadatan Penduduk Kota Semarang Berdasarkan Kecamatan.....	115
5.2 Analisis Kebutuhan Hunian serta Sarana dan Prasarana.....	122
5.2.1 Kebutuhan Hunian.....	122
5.2.2 Kebutuhan Air Bersih	124
5.2.3 Kebutuhan Energi Listrik.....	125
5.2.4 Kebutuhan Pengelolaan Persampahan	126
5.2.5 Kebutuhan Sarana Kesehatan	129
5.2.6 Kebutuhan Sarana Pendidikan	134
5.2.7 Kebutuhan Sarana Perdagangan dan Niaga.....	137
5.3 Implikasi Kebijakan	139
5.3.1 Kebijakan Infrastruktur Kecamatan	139
5.3.2 Kebijakan Pendukung Kesejahteraan Penduduk Usia Tua (Lansia).....	141
5.3.3 Kebijakan Sektor Kesehatan.....	143
5.3.4 Kebijakan Sektor Pendidikan	144
5.3.5 Kebijakan Tenaga Kerja untuk Mendorong Perekonomian Mandiri	145
5.3.6 Kebijakan Pembangunan Inklusif Gender.....	146
5.3.7 Kebijakan Strategi Program	147
BAB VI PENUTUP	152
6.1 Kesimpulan	152
6.2 Rekomendasi	157
DAFTAR PUSTAKA	159

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Matriks Perbedaan Mendasar Data Sensus Penduduk (BPS) dan Registrasi Penduduk (Kemendagri)	15
Tabel 2. 2	Kebutuhan Sarana Lingkungan Perumahan di Perkotaan	20
Tabel 3. 1	Wilayah Administratif Menurut Kecamatan di Kota Semarang ..	23
Tabel 3. 2	Jumlah Penduduk Kota Semarang Per Kecamatan Tahun 2012-2022	26
Tabel 3. 3	Kepadatan Penduduk Kota Semarang Per Kecamatan Tahun 2012-2022	28
Tabel 3. 4	Jumlah Penduduk Kota Semarang Berdasarkan Usia Tahun 2012-2022	29
Tabel 3. 5	Jumlah Penduduk Berjenis Kelamin Laki-Laki Kota Semarang Tahun 2012-2022	33
Tabel 3. 6	Jumlah Penduduk Berjenis Kelamin Perempuan Kota Semarang Tahun 2012-2022	34
Tabel 3. 7	Lokasi Permukiman dan Perumahan Kumuh di Kota Semarang	35
Tabel 3. 8	Sebaran Kawasan Permukiman dan Perumahan Kumuh di Kota Semarang	37
Tabel 3. 9	Data Backlog Rumah di Kota Semarang Tahun 2022	39
Tabel 3. 10	Data Rumah Tidak Layak Huni	40
Tabel 3. 11	Daya Terpasang, Produksi, dan Dsitribusi Kota Semarang ..	43
Tabel 3. 12	Jumlah Pemakaian Energi Listrik PLN Kota Semarang	43
Tabel 3. 13	Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Rayon/ULP di Kota Semarang Tahun 2018-2022	44
Tabel 3. 14	Jumlah Produksi Sampah dan Jumlah Sampah Terangkut Kota Semarang	45
Tabel 3. 15	Bank Sampah di Kota Semarang	45
Tabel 3. 16	Sebaran TPS3R di Kota Semarang	47
Tabel 3. 17	Jumlah Sarana Kesehatan Kota Semarang	50
Tabel 3. 18	Jumlah Sarana Pendidikan Kota Semarang	56
Tabel 4. 1	Rencana Aksi pada Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah di Kota Semarang	64
Tabel 4.2	Pusat Kegiatan di Kawasan Perkotaan Sekitarnya	69
Tabel 4.3	Indikasi Program Utama Rencana Pola Ruang Kawasan Perkotaan Kedungsepur	73
Tabel 4.4	Rencana Pusat Kegiatan Kota Semarang	74
Tabel 4.5	Program Terkait Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Dalam RTRW Kota	97
Tabel 5. 1.	Parameter Hasil Proyeksi Penduduk Kota Semarang Tahun 2025-2045	99

Tabel 5. 2.	Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Semarang Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2025-2045	101
Tabel 5. 3	Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Semarang Berdasarkan Pengelompokan Usia dan Angka Ketergantungan Tahun 2025-2045	102
Tabel 5. 4	Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Semarang Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin Tahun 2025-2045.....	105
Tabel 5. 5	Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Semarang Berdasarkan Kecamatan Tahun 2025-2045.....	106
Tabel 5. 6	Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Semarang Berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2020-2045.....	114
Tabel 5. 7	Proyeksi Kepadatan Penduduk Kota Semarang Berdasarkan Kecamatan Tahun 2025-2045.....	116
Tabel 5.8	Kebutuhan Hunian Kota Semarang Tahun 2025-2045	122
Tabel 5.9	Kebutuhan Luas Kavling Minimum Hunian Kota Semarang Tahun 2025-2045 (m ²)	123
Tabel 5.10	Kebutuhan Air Bersih Kota Semarang Tahun 2025-2045 (L/Hari)	124
Tabel 5.11	Kebutuhan Energi Listrik Kota Semarang Tahun 2025-2045 (kW ^h).....	125
Tabel 5.12	Timbulan Sampah Kota Semarang Tahun 2025-2045 (kg/Hari)	126
Tabel 5.13	Klasifikasi TPS	127
Tabel 5.14	Kebutuhan TPS Kota Semarang Tahun 2025-2045	127
Tabel 5.15	Kebutuhan Luas Lahan Minimum TPS Kota Semarang Tahun 2025-2045 (m ²).	128
Tabel 5.16	Kebutuhan Posyandu Kota Semarang Tahun 2025-2045 dan Kebutuhan Luas Lahan Minimumnya (m ²)	129
Tabel 5.17	Kebutuhan BKIA atau Klinik Bersalin Kota Semarang Tahun 2025-2045 dan Kebutuhan Luas Lahan Minimumnya (m ²)	130
Tabel 5.18	Kebutuhan Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan Kota Semarang Tahun 2025-2045 dan Kebutuhan Luas Lahan Minimumnya (m ²).....	131
Tabel 5.19	Kebutuhan Puskesmas dan Balai Pengobatan Kota Semarang Tahun 2025-2045 dan Kebutuhan Luas Lahan Minimumnya (m ²).....	132
Tabel 5.20	Kebutuhan Apotek Kota Semarang Tahun 2025-2045 dan Kebutuhan Luas Lahan Minimumnya (m ²)	133
Tabel 5.21	Kebutuhan TK Kota Semarang Tahun 2025-2045 dan Kebutuhan Luas Lahan Minimumnya (m ²)	134
Tabel 5.22	Kebutuhan SD Kota Semarang Tahun 2025-2045 dan Kebutuhan Luas Lahan Minimumnya (m ²)	135
Tabel 5.23	Kebutuhan SMP Kota Semarang Tahun 2025-2045 dan Kebutuhan Luas Lahan Minimumnya (m ²)	136

Tabel 5.24	Kebutuhan SMA Kota Semarang Tahun 2025-2045 dan Kebutuhan Luas Lahan Minimumnya (m ²)	137
Tabel 5.25	Kebutuhan Pusat Pertokoan dan/atau Pasar Lingkungan Kota Semarang Tahun 2025-2045 serta Kebutuhan Luas Lahan Minimumnya (m ²)	138
Tabel 5.26	Kebutuhan Pusat Perbelanjaan dan Niaga serta Kebutuhan Luas Lahan Minimumnya (m ²).....	139
Tabel 5.27	Kebijakan Strategi Program	148

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1	Tahapan Transisi Demografi	9
Gambar 2. 2	Jenis-Jenis Piramida Penduduk	11
Gambar 2. 3	Kerangka Pikir Analisis Demografi Untuk Penyusunan RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045	20
Gambar 3. 1	Luas dan Batas Wilayah Administrasi Kota Semarang	21
Gambar 3. 2	Jumlah Penduduk Kota Semarang Tahun 2012-2022	24
Gambar 3. 3	Kepadatan Penduduk Kota Semarang Tahun 2012-2022	27
Gambar 3. 4	Piramida Penduduk Kota Semarang Tahun 2012-2022	31
Gambar 3. 5	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Semarang Tahun 2012-2022	31
Gambar 3. 6	Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Minum di Kota Semarang	41
Gambar 3. 6	Persentase Rumah tangga menurut Jarak Sumber Air Minum ke Tempat Penampungan Limbah/Kotoran/Tinja Terdekat di Kota Semarang	42
Gambar 5. 1.	Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Semarang Tahun 2025-2045100	
Gambar 5. 2.	Piramida Penduduk Kota Semarang Tahun 2025-2045	104
Gambar 5. 3.	Pola Perkembangan Perumahan dan Permukiman Kota Semarang berdasarkan Proyeksi Persebaran Penduduk di Kecamatan	140
Gambar 5. 4.	Desain Skala Spasial dan Ruang Alam untuk Mendukung Hunian Ramah Lansia.....	143

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun.

Pasal 263 ayat 2 Undang-Undang 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. Sedangkan Undang- Undang 25 Tahun 2004 pasal 9 ayat 1 menyatakan bahwa RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.

Pengaturan tentang penyusunan RPJPD bagi daerah lebih detail dimuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pasal 16 ayat 1 Permendagri 86/2017 tersebut dijelaskan bahwa RPJPD harus disusun dengan berbagai tahapan. Mulai dari persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan Musrenbang, perumusan rancangan akhir, dan penetapan RPJPD menjadi Peraturan Daerah.

Dokumen RPJPD yang merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah nantinya disusun dengan memperhatikan 4 (empat) pendekatan seperti yang diamanatkan pada Pasal 7 s/d pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Keempat pendekatan tersebut adalah pendekatan teknokratis, pendekatan partisipatif, pendekatan politis, dan pendekatan perpaduan antara Bottom-Up dengan Top Down Planning. Adapun secara substansi, penyusunan dokumen RPJPD nanti akan menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial.

Salah satu aspek penting sebagai material pendukung dalam perancangan RPJPD adalah sektor Demografi. Indonesia diperkirakan akan menghadapi era bonus demografi beberapa tahun ke depan, tepatnya pada tahun 2030 hingga 2040 mendatang. Bonus demografi yang dimaksud adalah masa di mana penduduk usia produktif (15-64 tahun) akan lebih besar dibanding usia nonproduktif (65 tahun ke atas) dengan proporsi lebih dari 60% dari total jumlah penduduk Indonesia. Momentum tersebut tentu saja harus dihadapi dengan perencanaan yang matang.

Bonus demografi menjadi kesempatan strategis bagi Indonesia untuk melakukan berbagai percepatan pembangunan dengan dukungan sumber daya manusia (SDM) berusia produktif yang melimpah. Apalagi, tahun 2030 terdapat agenda besar pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals). Sejalan dengan itu, pemerintah pun telah mencanangkan Visi Indonesia Emas tahun 2045 dengan harapan terciptanya generasi produktif yang berkualitas.

Lebih lanjut Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Indonesia mencapai 275,36 juta jiwa pada Juni 2022. Dari jumlah tersebut, ada 190,83 juta jiwa (69,3%) penduduk Indonesia yang masuk kategori usia produktif (15-64 tahun). Terdapat pula 84,53 juta jiwa (30,7%) penduduk yang masuk kategori usia tidak produktif. Rinciannya, sebanyak 67,16 juta jiwa (24,39%) penduduk usia belum produktif (0-14 tahun) dan sebanyak 17,38 juta jiwa (6,31%)

merupakan kelompok usia sudah tidak produktif (65 tahun ke atas). Dengan komposisi jumlah penduduk tersebut di atas, maka rasio ketergantungan/beban tanggungan (dependency ratio) adalah sebesar 44,3%. Hasil tersebut diperoleh dari jumlah penduduk usia tidak produktif dibagi jumlah penduduk usia produktif. Angka ketergantungan sebesar 44,3%, artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sebanyak 44-45 jiwa penduduk usia produktif.

Menimbang hal di atas, maka dalam penyusunan kajian Analisis Demografi Untuk Penyusunan Rpjpd Kota Semarang Tahun 2025-2045 dimaksudkan untuk menggali lebih jauh mengenai potensi, isu dan permaslahan serta proyeksi demografi Kota Semarang yang akan menjadi materi penting dalam penyusunan RPJPD di Kota Semarang. RPJPD yang dimaksud adalah RPJPD tahun 2025-2045.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum atau dasar hukum pelaksanaan kajian Analisis Demografi Untuk Penyusunan RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045 antara lain yakni:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398).

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

1.3 Maksud dan Tujuan

Secara umum maksud dan tujuan dari kajian Analisis Demografi Untuk Penyusunan RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045 adalah untuk melakukan analisis yang komprehensif terhadap sektor demografi di Kota Semarang dikaitkan dengan isu Bonus Demografi (Indonesia Emas 2045). Kajian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam faktor-faktor yang memengaruhi sektor demografi Kota Semarang. Adapun tujuan khusus dalam kajian ini sebagai berikut:

1. Menelaah kondisi eksisting demografi Kota Semarang
2. Menganalisis Isu dan permasalahan yang ada berkaitan dengan dinamika demografi
3. Melakukan proyeksi Demografi Kota Semarang 2025-2045.
4. Menganalisis pentahapan bonus demografi yang akan terjadi di Kota Semarang
5. Menyusun Rekomendasi Kebijakan bagi integrasi hasil kajian terhadap RPJPD Kota Semarang.

1.4 Ruang Lingkup dan Sasaran

Ruang lingkup Penyusunan Dokumen kajian Analisis Demografi Untuk Penyusunan RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045 antara lain meliputi:

- a. Penelaahan terhadap regulasi Pemerintahan Daerah.
- b. Penyerapan informasi dan masukan dari seluruh instansi dan/atau dinas terkait, Bappeda Kota Semarang, Dindukcapil, dan Stakeholder terkait
- c. Analisis Kewenangan dan Kelembagaan (Regulasi, Kewenangan, Kelembagaan).
- d. Analisis Permasalahan yang dihadapi di lapangan.

Sasaran kegiatan adalah tersusunnya dokumen kajian Analisis Demografi Untuk Penyusunan RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045 sesuai dengan

kondisi objektif di lapangan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.5 Sistematika Laporan

Sistematika Laporan Pendahuluan Penyusunan Dokumen kajian Analisis Demografi Untuk Penyusunan RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045 meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud pelaksanaan pekerjaan, tujuan, ruang lingkup, dan sasaran pelaksanaan pekerjaan serta sistematika penyusunan laporan.

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN

Berisi kajian teori tentang demografi/kependudukan, metode pelaksanaan pekerjaan dan kerangka pikir penyusunan kajian Analisis Demografi Untuk Penyusunan RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045.

BAB III KONDISI KEPENDUDUKAN KOTA SEMARANG

Berisi kondisi demografi/kependudukan Kota Semarang yang meliputi, jumlah penduduk, jumlah penduduk menurut usia, jumlah penduduk menurut jenis kelamin, jumlah penduduk menurut jenis pendidikan, jumlah penduduk menurut agama, jumlah kepala keluarga, jumlah anggota keluarga per KK, dan jenis pekerjaan penduduk, yang digunakan sebagai dasar proyeksi dan analisis kondisi penduduk selama 20 tahun yang akan datang.

BAB IV RENCANA PELAKSANAAN PEKERJAAN

Berisi rencana kegiatan dan rancangan sistematika laporan akhir dalam Kajian Analisis Demografi Untuk Penyusunan RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045.

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan dan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam pelaksanaan pekerjaan Kajian Analisis Demografi Untuk Penyusunan RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN

METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN

2.1 Kajian Teoritis

2.1.1 Pengertian Demografi

Demografi berasal dari gabungan kata bahasa Yunani, yaitu *demos* yang berarti penduduk serta *graphein* yang berarti gambaran tulisan atau catatan. Maka, demografi adalah ilmu yang mempelajari penduduk atau manusia. Harmadi (2016) berpendapat bahwa demografi merupakan ilmu tentang penduduk yang dilihat dari ukuran (jumlah), struktur/komposisi, distribusi, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya (fertilitas, mortalitas, dan migrasi). Mantra (2000) beropini bahwa ilmu kependudukan lebih luas dari demografi murni karena dalam memahami kependudukan di suatu wilayah, faktor-faktor nondemografis ikut dilibatkan, seperti ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, politik, dll. Oleh karena itu, ilmu kependudukan bukan lagi disiplin teoritis tunggal, tetapi lebih bersifat interdisipliner.

2.1.2 Teori-Teori Demografi

Teori-teori mengenai demografi terus mengalami perkembangan. Teori-teori demografi yang sebelumnya banyak dibahas yaitu:

A. Malhusian

Hipotesis Thomas Robert Malthus (1998) muncul pada tahun 1798 yang membahas mengenai hubungan antara penduduk dengan pangan. Malthus berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk yang cepat dikarenakan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang akan menghasilkan kehamilan dan kelahiran yang tidak dapat dicegah. Jumlah penduduk yang meningkat membutuhkan sediaan pangan yang cukup. Malthus mengatakan bahwa jika tidak ada faktor penghambat, maka penduduk akan tumbuh menurut deret ukur, sedangkan sumber-sumber pangan akan tumbuh seperti deret hitung. Dia juga mengatakan bahwa faktor-faktor yang menghambat perkembangan penduduk yaitu *preventive checks* yang meliputi pengekangan diri (*moral restraint*) dan perbuatan buruk (*vice*) serta *positive check* yang terdiri dari perbuatan buruk

(*vice*) dan keadaan yang menyebabkan kematian (*misery*). Penghambat perkembangan penduduk dalam *preventive checks* dilakukan dengan menurunkan kelahiran melalui upaya-upaya untuk mengekang nafsu seksual (*moral restraint*) dan melalui aborsi, homoseksualitas, *promiscuity*, dan *adultery* (*vice*). Sedangkan penghambat perkembangan penduduk dalam *positive checks* dilakukan melalui kematian yang meliputi kejahatan, kriminalitas, dan pembunuhan (*vice*) serta melalui berbagai penyebab kematian, seperti epidemik, bencana alam, kelaparan, dan peperangan (*misery*).

Kelompok anti Malthus menyampaikan kritik terhadap teori Malthus pada abad ke-19 dengan argumen bahwa Malthus tidak memperhitungkan kemajuan transportasi yang menghubungkan daerah satu dengan yang lain, sehingga pengiriman bahan makanan mudah untuk dilakukan; Malthus tidak memperhitungkan kemajuan pesat dalam bidang teknologi terutama dalam bidang pertanian, karena pertanian dapat ditingkatkan dengan cepat menggunakan teknologi baru; Malthus tidak memperhitungkan usaha pembatasan kelahiran bagi pasangan yang sudah menikah, artinya pengontrolan kelahiran yang diutarakan oleh Malthus dianggap tidak bermoral; dan fertilitas akan menurun apabila perbaikan ekonomi dan standar hidup penduduk meningkat.

B. Neo-Malthusian

Muncul aliran Neo-Malthusian yang dikemukakan oleh Garrett Hardin dan Paul Ehrlich (1968). Aliran tersebut menyampaikan bahwa sudah terlalu banyak manusia di bumi, sehingga semakin banyak manusia yang harus dipenuhi kebutuhan pangannya. Namun, kondisi bahan pangan terbatas dan lingkungan mengalami kerusakan akibat populasi manusia yang meningkat. Aliran tersebut dilengkapi oleh Meadow (1972) yang memperhatikan hubungan antara variabel lingkungan, yaitu penduduk, produksi pertanian, industri, sumber daya alam, dan polusi.

C. Marxist

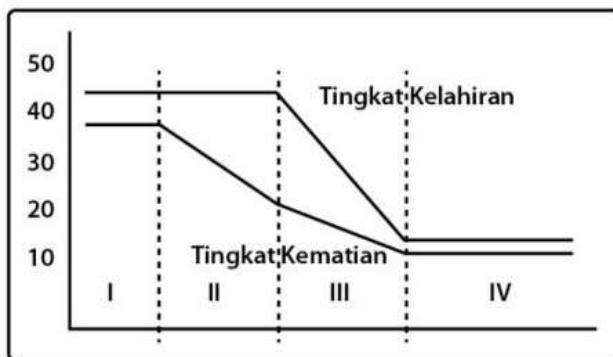
Aliran Marxist yang dicetuskan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels mengutarakan 3 poin dalam hubungan penduduk dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Pertama, jumlah penduduk tidak memberikan tekanan berarti

terhadap peningkatan kebutuhan pangan, tetapi lebih besar dampaknya terhadap kesempatan kerja. Kedua, kemelaratan terjadi bukan karena cepatnya pertumbuhan penduduk, tetapi karena kaum kapitalis mengambil sebagian besar hak para buruh. Ketiga, semakin tinggi tingkat jumlah penduduk, maka semakin tinggi pula produktivitasnya. Hal ini terjadi jika teknologi tidak menggantikan tenaga kerja manusia, sehingga manusia tidak perlu menekan jumlah kelahiran dan ini berarti menolak teori Malthus tentang *moral restraint* untuk menekan angka kelahiran. Aliran ini dulu banyak digunakan di negara-negara yang menganut paham sosialis, seperti Cina, Vietnam, maupun Korea Utara.

D. Transisi Demografi

Teori transisi demografi dicetus oleh Warren Thompson pada tahun 1929. Teori ini membagi transisi demografi menjadi 4 tahap sebagai berikut:

1. Tahap pertama ditandai dengan jumlah kelahiran dan kematian yang sangat tinggi dan tidak terkendali setiap tahunnya. Sehingga, menghasilkan laju pertumbuhan penduduk yang sangat rendah (0). Faktor-faktor penyebab kematian di antaranya yaitu adanya peperangan, gagal panen, kelaparan sebagai akibat tingginya harga pangan, dan meluasnya wabah penyakit menular
2. Tahap kedua ditandai dengan angka kematian menurun dengan cepat karena kemajuan teknologi, penemuan obat-obatan antibiotik, dan peningkatan nutrisi . Angka kelahiran tetap tinggi. Sehingga, laju pertumbuhan penduduk meningkat.
3. Tahap ketiga ditandai dengan angka kelahiran yang menurun dengan cepat karena adanya program keluarga berencana dan tersedianya alat kontrasepsi secara luas. Selain itu, angka kematian terus menurun, namun penurunannya melambat. Pertumbuhan penduduk dalam tahap ini cenderung lambat. Tingkat pendidikan mulai meningkat pada tahap ini.
4. Tahap keempat ditandai dengan angka kelahiran dan kematian yang rendah. Tingkat pertumbuhan penduduk tahap ini sangat rendah (0). Tahap ini biasanya dijalani oleh negara yang sudah maju.



Gambar 2. 1 Tahapan Transisi Demografi

2.1.3 Demografi dan Pembangunan

Penduduk dan pembangunan saling berkaitan. Pembangunan dilakukan dengan tujuan menyejahterakan penduduk. Penduduk berperan sebagai subjek sekaligus objek dalam pembangunan. Penduduk sebagai subjek berarti penduduk menjadi pelaku dalam pembangunan. Penduduk sebagai pelaku dalam pembangunan memerlukan kualitas yang tinggi, sehingga pembangunan yang dihasilkan juga akan tinggi. Kualitas penduduk dapat ditingkatkan apabila jumlah dan laju pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan, sehingga seimbang dengan daya tampung dan daya dukung lingkungan. Selain itu, distribusinya juga perlu diarahkan untuk mencapai keseimbangan tersebut. Penduduk sebagai objek berarti penduduk menjadi sasaran dalam pembangunan melalui peningkatan kemampuan. Sebagai sasaran dalam pembangunan, diperlukan jumlah, struktur, laju pertumbuhan, dan distribusinya untuk mencapai pemerataan dan keadilan.

Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang berdasarkan bukti melalui data. Data yang valid menjadi kunci dalam menentukan perencanaan pembangunan. Data mengenai jumlah, struktur, pertumbuhan, dan karakteristik penduduk serta data penunjang lainnya harus tersedia terus menerus dan diperbarui setiap saat. Dinamika penduduk akan mengubah struktur, komposisi, dan persebaran penduduk. Dengan melakukan proyeksi, maka dapat diperkirakan perubahan kebutuhan yang harus dipenuhi termasuk fasilitas pelayanan publik yang perlu disediakan. Pembangunan yang berkelanjutan akan mengusahakan pemenuhan kebutuhan hidup generasi saat ini dan memikirkan kepentingan penduduk generasi yang akan datang.

2.1.4 Karakteristik Demografi

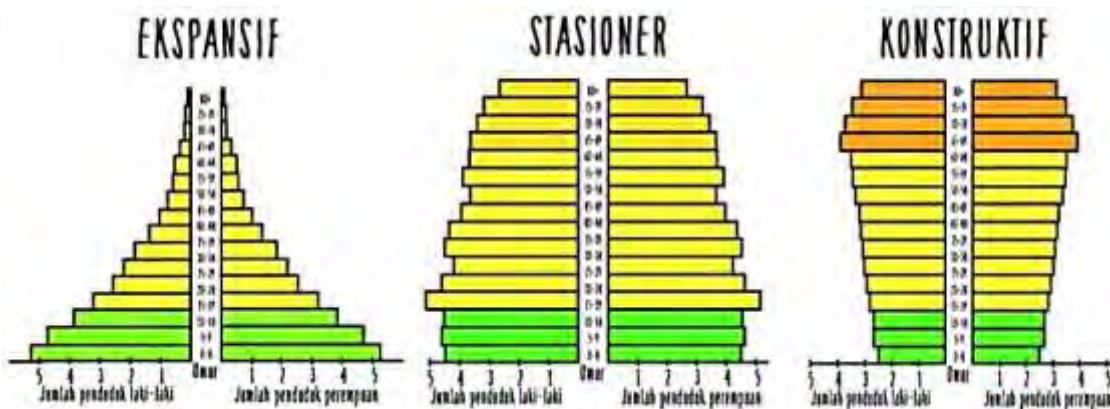
Penduduk dapat dikelompokkan berdasarkan karakteristik tertentu, yaitu sebagai berikut:

A. Struktur Penduduk Menurut Karakteristik Demografi

Struktur penduduk menurut karakteristik demografi dapat berdasarkan jenis kelamin, umur, jumlah perempuan umur subur, jumlah anak, dan sebagainya. Struktur penduduk berdasarkan karakteristik demografi banyak digunakan sebagai dasar dalam menyusun perencanaan kebijakan pemerintah terutama terkait kebutuhan dasar. Struktur penduduk menurut jenis kelamin dan umur digunakan untuk merencanakan penyediaan kebutuhan dasar, seperti pangan dan papan serta fasilitas pelayanan publik terkait layanan pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Pengelompokan umur penduduk dilakukan dengan 2 model, yaitu penduduk umur tunggal dan penduduk kelompok umur 5 tahunan, 10 tahunan, atau kelompok umur khusus untuk kepentingan yang berbeda-beda. Setiap kelompok umur mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Data mengenai umur sangat diperlukan untuk proyeksi, seperti proyeksi rumah tangga, proyeksi murid yang akan terdaftar di sekolah, proyeksi angkatan kerja, proyeksi kebutuhan perumahan, proyeksi kebutuhan pangan dan energi, serta berbagai kebutuhan hidup lainnya.

Struktur penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur dapat dianalisis dengan membuat piramida penduduk. Terdapat 3 jenis piramida penduduk, yaitu:

1. Piramida penduduk muda (ekspansif) berbentuk kerucut dengan alas yang lebar dan puncak yang meruncing. Bentuk tersebut menunjukkan tingkat kelahiran yang tinggi. Sehingga, piramida ini memiliki pertumbuhan penduduk yang pesat.
2. Piramida penduduk dewasa (stasioner) menggambarkan jumlah kelahiran dan kematian yang cenderung seimbang. Maka, pertumbuhan penduduk piramida ini stabil. Penduduk muda hampir sebanding dengan penduduk tua.
3. Piramida penduduk tua (konstruktif) menunjukkan angka kelahiran yang rendah. Oleh karena itu, pertumbuhan penduduknya cenderung mengalami penurunan atau lambat. Piramida ini memiliki angka harapan hidup yang meningkat.



Gambar 2. 2 Jenis-Jenis Piramida Penduduk

B. Struktur Penduduk Menurut Karakteristik Sosial dan Budaya

Struktur penduduk menurut karakteristik sosial dan budaya dapat berdasarkan status kawin, bahasa, etnis/suku bangsa, agama, pendidikan, kepemilikan identitas dan akte, dan sebagainya. Struktur penduduk menurut status kawin bermanfaat untuk analisis fertilitas karena status kawin secara tidak langsung berpengaruh terhadap fertilitas. Struktur penduduk menurut pendidikan dapat dibuat tabulasi jumlah penduduk yang berada pada umur sekolah. Informasi tersebut bermanfaat untuk menyusun kebijakan tentang jumlah sekolah, jumlah guru, dan pembiayaannya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. Informasi tentang jumlah dan persentase penduduk yang menamatkan jenjang pendidikan tertentu juga dibutuhkan dalam perencanaan layanan pendidikan dan ketenagakerjaan.

C. Struktur Penduduk Menurut Karakteristik Ekonomi

Struktur penduduk menurut karakteristik ekonomi dapat berdasarkan kegiatan utama sehari-hari, bekerja atau tidak bekerja, status pekerjaan, jenis mata pencaharian, rata-rata jam kerja, pendapatan, dan sebagainya. Struktur penduduk menurut karakteristik ekonomi dapat dikelompokkan berdasarkan kegiatan utama yang dilakukan sehari-hari, angkatan kerja, bekerja, menganggur, dan sebagainya. Penduduk usia kerja yaitu penduduk berumur 15 tahun dan lebih. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang masih sekolah, mengurus rumah tangga, atau

melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yaitu persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur 15 tahun ke atas. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.

D. Struktur Penduduk Menurut Karakteristik Tempat Tinggal dan Geografi

Struktur penduduk menurut karakteristik tempat tinggal dan geografi dapat berdasarkan penduduk perkotaan dan perdesaan, penduduk berdasarkan pulau, dan sebagainya. Persebaran penduduk secara geografis adalah persebaran penduduk menurut batas-batas alam, seperti pulau, pantai, dan sebagainya. Persebaran penduduk secara administratif adalah persebaran penduduk menurut batas-batas administrasi pemerintahan yang ditetapkan oleh suatu negara, seperti provinsi dan kabupaten/kota. Kepadatan penduduk merupakan perbandingan jumlah penduduk per satuan luas, yaitu km^2 atau ha. Kepadatan penduduk merupakan salah satu ukuran yang memperlihatkan persebaran penduduk di suatu wilayah.

2.1.5 Bonus Demografi

Bonus demografi merupakan suatu keadaan saat jumlah penduduk usia produktif atau angkatan kerja (15-64 tahun) lebih besar dibandingkan usia nonproduktif (0-14 tahun dan di atas 64 tahun). Adioetomo (2005) mengatakan bahwa bonus demografi ini hanya akan terjadi satu kali di dalam sejarah peradaban suatu negara. Keadaan tersebut tentunya harus dihadapi dengan perencanaan yang baik.

Bonus demografi akan berpengaruh pada rasio ketergantungan, di mana beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif terhadap penduduk usia nonproduktif mencapai titik terendah. Ketika tingkat ketergantungan sangat rendah, terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja yang apabila semuanya terserap dalam kesempatan kerja yang tersedia, maka akan meningkatkan total keluaran yang diperoleh. Dengan semua penduduk usia kerja bekerja, maka akan terjadi akumulasi yang lebih besar karena semua tenaga kerja yang bekerja mampu

memperbesar tabungan mereka. Oleh karena itu, bonus demografi dapat dimanfaatkan apabila penduduk usia kerja yang jumlahnya sangat besar tersebut dapat memperoleh kesempatan kerja yang produktif. Kesempatan kerja tersebut dapat diperoleh apabila kualitas sumber daya manusianya unggul dan mampu bersaing. Apabila penawaran tenaga kerja yang besar tidak ditunjang dengan kesempatan kerja yang memadai, maka tingkat pengangguran terbuka akan semakin meningkat.

2.1.6 Kajian Regulasi dan Kelembagaan Data Kependudukan

Data jumlah, struktur dan dinamika penduduk berperan penting dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Mengingat pentingnya data tersebut, hampir setiap instansi pemerintah di Indonesia membutuhkan data tersebut untuk kepentingan program dan kegiatan mereka. Guna mengatasi kebutuhan data kependudukan, pemerintah melalui UU No 16 tahun 1997 tentang Statistik telah menetapkan Badan Pusat Statistik sebagai Lembaga yang bertanggungjawab untuk mengumpulkan dan mengolah data statistik kependudukan bagi keperluan pembangunan. Namun disisi lainnya, pemerintah melalui UU No 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, juga mengamanatkan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diteruskan pada tingkat daerah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai penanggungjawab penyedia data kependudukan untuk perencanaan pembangunan. UU ini juga secara tegas memerintahkan seluruh pemerintah daerah untuk menggunakan data hasil registrasi penduduk dan pencatatan sipil dalam penyusunan perencanaan pembangunan wilayah masing-masing.

Dengan munculnya kedua UU di atas menimbulkan kerancuan tentang data mana yang harus digunakan, dan apakah data yang ada dapat memenuhi kebutuhan seluruh perencanaan pembangunan. Secara umum terdapat perbedaan mendasar antara data kependudukan yang dihasilkan BPS dan Ditjen Kependudukan & Pencatatan Sipil Kemendagri, khususnya dalam hal metode pengumpulan data, sehingga pemanfaataannya pun harus tepat. Masing-masing data memiliki kelemahan dan keunggulan yang harus dipahami oleh seluruh pengguna data agar tidak salah dalam menggunakan data tersebut.

Perbedaan mendasar dari kedua pengumpulan data tersebut adalah:

1. Pengumpulan data statistik oleh BPS bertujuan untuk mendukung pembangunan nasional, mengembangkan sistem statistik nasional yang handal, efektif dan efisien; meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik dan mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara pengumpulan data yang dilakukan melalui kegiatan registrasi penduduk dan pencatatan sipil bertujuan untuk mengADMistrasi penduduk dalam rangka penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
2. Metode yang digunakan berbeda baik cara pengumpulan data, jangka waktu pengumpulan maupun siapa yang dicacah dan apa saja yang dicacah.
 - a. Dalam sensus penduduk, data dikumpulkan melalui pencatatan dengan mendatangi penduduk berdasarkan lokasi saat dicacah (*de facto*). Registrasi penduduk (Kemendagri) menggunakan metode penduduk yang aktif mendaftar, meskipun pendekatan “jemput bola” sekarang juga dilakukan untuk peningkatan cakupan administrasi kependudukan.
 - b. Data statistik dikumpulkan dalam jangka waktu tertentu seperti 10 tahun untuk Sensus Penduduk. Sedangkan untuk ketenagakerjaan (Sakernas), kondisi sosial ekonomi (Susenas) dilakukan setiap tahun 2 kali. Sementara registrasi penduduk dan pencatatan sipil dilakukan secara terus menerus setiap hari tergantung pada peristiwa mutasi dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk. Dilaksanakan hingga unit administrasi yang paling kecil yaitu kelurahan/desa.
 - c. Data yang dicacah untuk data statistik (sensus) adalah karakteristik geografi, demografi, sosial dan ekonomi, kematian untuk bayi, balita dan dewasa dan kelahiran. Sementara Registrasi mencatat individu beserta karakteristiknya (biodata penduduk) dan peristiwa penting (kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, adopsi dan pengangkatan anak).
 - d. Data statistik kependudukan dilakukan secara menyeluruh sebagai *benchmark* data penduduk (sensus) dan data sampel survei untuk mengukur berbagai indikator dan parameter demografi yang penting. Data sampel sangat tergantung pada metode pengambilan sampel dan memiliki kerentanan terhadap sampling error.

Sementara registrasi penduduk dilakukan untuk seluruh penduduk di suatu kabupaten/kota yang secara sah memenuhi syarat administratif sebagai penduduk di kabupaten/kota tersebut. Oleh sebab itu, sebenarnya data registrasi dan pencatatan vital di suatu wilayah, hanya mencakup mereka yang secara legal diakui sebagai penduduk (memiliki tempat tinggal yang sah di wilayah tersebut). Sementara dalam wilayah kabupaten/kota terdapat penduduk pelaku migrasi yang tidak memenuhi syarat ataupun tidak menginginkan pindah status kependudukan mereka. Sehingga dalam satu kabupaten/kota selalu terdapat penduduk tidak sah bagi kabupaten/kota tersebut tetapi sah di kabupaten/kota asal. Adanya persyaratan tempat tinggal yang sah menyebabkan sebagian penduduk yang tidak memiliki tempat tinggal tetap juga tidak pernah tercatat oleh administrasi kependudukan.

- e. Data statistik BPS dapat digunakan untuk mengestimasi berbagai parameter demografi, sosial dan ekonomi. Sementara data registrasi penduduk dan pencatatan vital belum bisa memenuhi seluruh kebutuhan penghitungan parameter demografi seperti kelahiran, kematian (bayi dan ibu), gizi buruk, kemiskinan, ketenagakerjaan, kesehatan dan lain sebagainya.

Tabel 2. 1 Matriks Perbedaan Mendasarkan Data Sensus Penduduk (BPS) dan Registrasi Penduduk (Kemendagri)

Jenis Perbedaan	Sensus Penduduk	Registrasi Penduduk
1. Definisi	Suatu proses pengumpulan, pengolahan, penyajian data kependudukan termasuk ciri-ciri sosial ekonominya yang dilaksanakan dalam suatu waktu tertentu terhadap semua orang dalam suatu negara atau suatu teritorial tertentu (UN dalam Shryock & Siegel, hal 115)	Pencatatan kejadian vital dan perubahan parameter kependudukan seperti kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk oleh petugas pencatatan berdasarkan laporan dari penduduk
2. Waktu pencatatan	Periodik (10 tahun atau 5 tahun sekali)	Terus menerus secara kontinu
3. Cara pencacahan	Yang dicatat individu (orangnya) Dalam sensus pencacahan mendatangi rumah tangga, mewawancara dan mencatat ciri-ciri setiap orang dalam rumah tangga tersebut.	Yang dicatat kejadiannya Dalam pencatatan registrasi masyarakat/penduduk sendiri yang harus melaporkan kejadian vital atau perubahan kependudukan misalnya kelahiran, kematian, pindah dan lain-lainnya

Analisis Demografi

Untuk Penyusunan RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045

Jenis Perbedaan	Sensus Penduduk	Registrasi Penduduk
4. Isi catatan	Bersifat data dasar penduduk yaitu penduduk menurut ciri demografi (umur, jenis kelamin) ciri sosial ekonomi seperti pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal, pendapatan dan lain-lain	<p>Sangat singkat, dan umumnya hal-hal pokok yang berhubungan dengan sifatnya untuk keperluan legal/hukum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nama, umur, nama suami/isteri, jenis kelamin • Tanggal kejadian, tanggal pelaporan, tempat/ alamat kejadian/pelaporan, alamat rumah dan lain-lain
5. Kebaikan	<ul style="list-style-type: none"> • Karena cakupannya yang menyeluruh untuk semua penduduk dan simultan, maka terhindar dari kesalahan sampling • Campuran sistem <i>de facto</i> dan <i>de jure</i>, memungkinkan menjaring semua penduduk yang ada pada saat pencacahan • Dipublikasikan secara meluas • Dapat dilakukan analisa sampai tingkat kabupaten 	<p>Kalau dilakukan secara kontinu dan konsisten ditunjang dengan sistem yang sempurna maka registrasi penduduk merupakan sumber data yang terbaik karena :</p> <ul style="list-style-type: none"> • ada jaminan mengenai kontinuitas dan kelengkapan data, asal semua kejadian dilaporkan kepada petugas (<i>complete & coverage</i>) kecermatan laporan (<i>accuracy</i>) • asal setiap kejadian segera dilaporkan, • tersedianya data secara terus menerus asal dibuat pelaporan berupa data statistik (rekap data), misalnya statistik kelahiran atau kematian tingkat kecamatan atau kabupaten dalam suatu tahun tertentu.
6. Kelemahan	<ul style="list-style-type: none"> • Memerlukan biaya pengumpulan yang cukup besar • Hanya tersedia setiap periode tertentu (10 tahun atau 5 tahun sekali) • Umumnya tidak mempublikasikan data pada level administrasi terendah misalnya kabupaten/kecamatan secararinci 	<ul style="list-style-type: none"> • Umumnya pendaftaran penduduk hanya dilakukan terhadap penduduk <i>de jure</i> saja, yaitu yang memenuhi syarat-syarat menjadi penduduk saja, sehingga berakibat pada kekurangan cacah. • Sifatnya legal, hanya sedikit informasi yang disajikan. • Sangat tergantung pada sistem (peraturan dan organisasi pelaksanaan), petugas pelaksana serta kesadaran masyarakat untuk melapor. • Kalau pencatatan tidak dilaksanakan secara konsisten dan terus menerus maka kelengkapan dan kecermatan data terganggu.

2.2 Metode Pelaksanaan Pekerjaan

2.2.1 Metode-Metode Proyeksi Penduduk

Menurut Badan Pusat Statistik (2010), terdapat 2 metode untuk memproyeksikan jumlah penduduk pada masa yang akan datang, yaitu metode matematik dan metode komponen dengan penjelasan sebagai berikut:

A. Metode Matematik

Metode ini sering disebut juga dengan metode tingkat pertumbuhan penduduk (*growth rate*). Metode ini merupakan estimasi dari total penduduk dengan menggunakan tingkat pertumbuhan penduduk secara matematik. Proyeksi berdasarkan tingkat pertumbuhan penduduk mengasumsikan pertumbuhan penduduk yang konstan, baik untuk model aritmatika, geometrik, atau eksponensial untuk mengestimasi jumlah penduduk.

1. Metode Aritmatik

Proyeksi penduduk dengan metode aritmatik mengasumsikan bahwa jumlah penduduk pada masa yang akan datang akan bertambah dengan jumlah penduduk yang sama setiap tahunnya. Formula pada metode aritmatik yaitu sebagai berikut:

$$P_t = P_0 (1 + rt) \text{ dengan } r = \frac{\left(\frac{P_t}{P_0} - 1\right)}{t}$$

Keterangan:

P_t = Jumlah penduduk pada tahun t

P_0 = Jumlah penduduk pada tahun dasar

r = Laju pertumbuhan penduduk

t = Periode waktu antara tahun dasar dan tahun t (dalam tahun)

2. Metode Geometrik

Proyeksi penduduk dengan metode geometrik menggunakan asumsi bahwa jumlah penduduk akan bertambah secara geometrik menggunakan dasar perhitungan bunga majemuk (Adioetomo dan Samosir, 2010). Laju pertumbuhan penduduk (*rate of growth*) dianggap sama untuk setiap tahun. Formula pada metode geometrik yaitu sebagai berikut:

$$P_t = P_0 (1 + r)^t \text{ dengan } r = \left(\frac{P_t}{P_0}\right)^{\frac{1}{t}} - 1$$

Keterangan:

P_t = Jumlah penduduk pada tahun t

P_0 = Jumlah penduduk pada tahun dasar

r = Laju pertumbuhan penduduk

t = Periode waktu antara tahun dasar dan tahun t (dalam tahun)

3. Metode Eksponensial

Proyeksi penduduk dengan metode eksponensial menggambarkan pertambahan penduduk yang terjadi secara sedikit-sedikit sepanjang tahun, berbeda dengan metode geometrik yang mengasumsikan bahwa pertambahan penduduk hanya terjadi pada satu saat selama kurun waktu tertentu (Adioetomo dan Samosir, 2010). Formula pada metode eksponensial yaitu sebagai berikut:

$$P_t = P_0 e^{rt} \text{ dengan } r = \frac{\{\ln\left(\frac{P_t}{P_0}\right)\}}{t}$$

Keterangan:

P_t = Jumlah penduduk pada tahun t

P_0 = Jumlah penduduk pada tahun dasar

r = Laju pertumbuhan penduduk

t = Periode waktu antara tahun dasar dan tahun t (dalam tahun)

e = Bilangan pokok dari sistem logaritma natural (\ln) yang besarnya adalah 2,7182818

B. Metode Komponen

Metode komponen berbasis pada pengertian bahwa perubahan penduduk suatu wilayah pada periode tertentu merupakan akumulasi dari kejadian kelahiran dan kematian (*natural increase*) serta net migrasi. Formula pada metode komponen yaitu sebagai berikut:

$$P_t = P_0 + (L - M) + (MigIn - MigOut)$$

Keterangan:

P_t = Jumlah penduduk pada tahun t

P_0 = Jumlah penduduk pada tahun dasar

L = Jumlah kelahiran

M = Jumlah kematian

MigIn = Jumlah migrasi masuk

MigOut = Jumlah migrasi keluar

Apabila proyeksi penduduk dihitung untuk jangka waktu yang pendek (kurang dari 5 tahun), baik dengan metode matematik ataupun metode komponen akan didapati hasil jumlah penduduk yang hampir tidak ada perbedaan. Hasil proyeksi penduduk untuk jangka waktu pendek dengan metode matematik relatif masih cukup baik karena kelahiran, kematian, dan perpindahan tidak berubah secara signifikan. Namun, apabila memproyeksikan penduduk dalam jangka lebih panjang, hasil metode matematik akan semakin bias seiring dengan panjangnya periode proyeksi. Hal tersebut dikarenakan kelahiran, kematian, dan perpindahan pada periode yang panjang telah banyak berubah, baik pola maupun tingkatnya. Maka, proyeksi penduduk dengan metode komponen dianggap lebih sesuai untuk memproyeksikan penduduk dalam jangka waktu yang panjang karena telah mempertimbangkan komponen-komponen yang memengaruhi pertumbuhan penduduk (kelahiran, kematian, dan perpindahan).

2.2.2 Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan

Standar Nasional Indonesia 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan merupakan panduan (dokumen nasional) yang berfungsi sebagai kerangka acuan untuk perencanaan, perancangan, dan penaksiran kebutuhan ruang. Berdasarkan SNI tersebut, penataan lingkungan merupakan suatu usaha untuk memperbaiki, mengubah, dan mengatur kembali lingkungan tertentu yang sesuai dengan prinsip pemanfaatan ruang secara optimal. Analisis kebutuhan ruang merupakan analisis untuk mengetahui kebutuhan jumlah unit dan luas lahan untuk mewadahi kelompok-kelompok aktivitas yang direncanakan agar dapat berfungsi dan berjalan dengan baik. Standar tersebut berbasis pada jumlah penduduk pendukung dalam menentukan kebutuhan ruang. Kebutuhan sarana lingkungan perumahan di perkotaan yaitu sebagai berikut:

Analisis Demografi

Untuk Penyusunan RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045

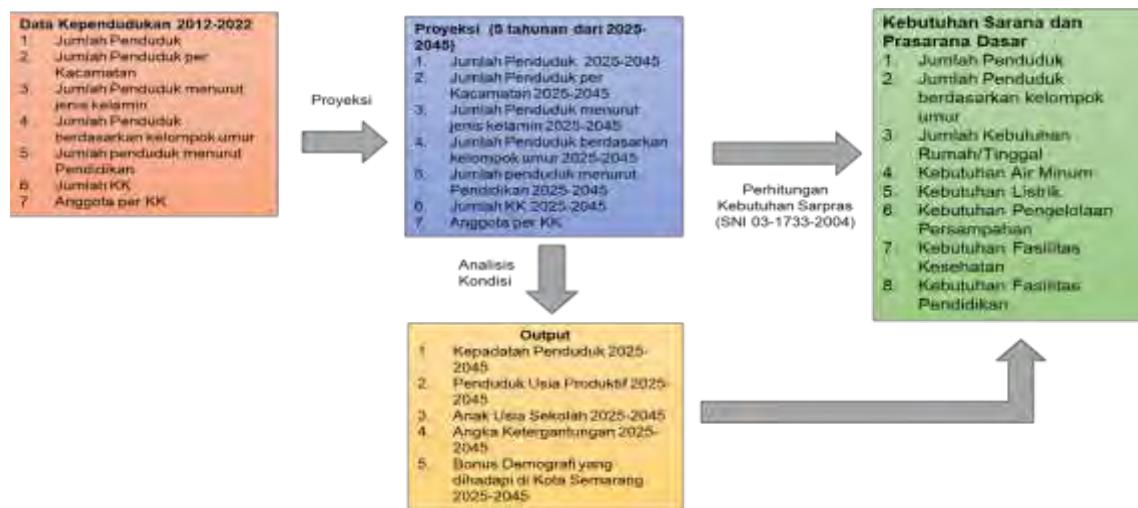
Tabel 2. 2 Kebutuhan Sarana Lingkungan Perumahan di Perkotaan

Sarana Kesehatan					
Sarana	Jumlah Penduduk Pendukung (Jiwa)	Kebutuhan Lahan (m ²)	Sarana	Jumlah Penduduk Pendukung (Jiwa)	Kebutuhan Lahan (m ²)
Posyandu	1.250	60	Puskesmas dan Balai Pengobatan	120.000	1.000
BKIA/Klinik Bersalin	30.000	3.000	Apotek	30.000	250
Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan	30.000	300			
Sarana Pendidikan			Sarana Perdagangan dan Niaga		
Sarana	Jumlah Penduduk Pendukung (Jiwa)	Kebutuhan Lahan (m ²)	Sarana	Jumlah Penduduk Pendukung (Jiwa)	Kebutuhan Lahan (m ²)
TK	1.250	500	Pusat Pertokoan dan/atau Pasar Lingkungan	30.000	10.000
SD	1.600	2.000	Pusat Perbelanjaan dan Niaga	120.000	36.000
SLTP	4.800	9.000			
SMU	4.800	12.500			

Sumber: SNI 03-1733-2004

2.3 Kerangka Pikir

Dalam penyusunan Penyusunan Dokumen kajian Analisis Demografi Untuk Penyusunan RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045 kerangka pikir yang digunakan digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. 3 Kerangka Pikir Analisis Demografi Untuk Penyusunan RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045

BAB III**KONDISI KEPENDUDUKAN DAN KONDISI EKSISTING SARANA
PRASANA KOTA SEMARANG****3.1 Luas Wilayah**

Kota Semarang merupakan kota strategis yang berada di tengah-tengah Pulau Jawa yang terletak antara garis 60 50' – 70 10' Lintang Selatan dan garis 1090 35' – 1100 50' Bujur Timur. Kota Semarang memiliki wilayah seluas 373,70 km² dan merupakan 1,15% dari total luas daratan Provinsi Jawa Tengah dengan batas wilayah:

- sebelah barat : Kabupaten Kendal
- sebelah timur : Kabupaten Demak
- sebelah selatan : Kabupaten Semarang
- sebelah utara : Laut Jawa



Sumber: Dinas Penataan Ruang Kota Semarang

Gambar 3. 1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi Kota Semarang

Secara administrasi, Kota Semarang terbagi atas 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan. Secara rinci luas masing-masing kecamatan adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Wilayah Administratif Menurut Kecamatan di Kota Semarang

No	Kecamatan	Banyaknya Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)
1	Mijen	14	57.55
2	Gunungpati	16	54.11
3	Banyumanik	11	25.69
4	Gajah Mungkur	8	9.07
5	Semarang Selatan	10	5.928
6	Candisari	7	6.54
7	Tembalang	12	44.2
8	Pedurungan	12	20.72
9	Genuk	13	27.39
10	Gayamsari	7	6.177
11	Semarang Timur	10	7.7
12	Semarang Utara	9	10.97
13	Semarang Tengah	15	6.14
14	Semarang Barat	16	21.74
15	Tugu	7	31.78
16	Ngaliyan	10	37.99
Kota Semarang		177	373.7

Sumber: BPS Kota Semarang

Kedudukan Kota Semarang sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah dan ditunjang lokasi yang strategis pada jalur lalu lintas ekonomi Pulau Jawa menjadikan Kota Semarang tidak hanya berperan sebagai pusat pemerintahan tetapi juga salah satu pusat ekonomi di Jawa Tengah. Kota Semarang memiliki lokasi strategis sebagai koridor pembangunan di Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari empat simpul pintu gerbang yaitu koridor pantai utara, koridor selatan, koridor timur dan koridor barat, dan juga didukung sejumlah fasilitas transportasi seperti Pelabuhan Tanjung Emas, Bandar Udara Internasional Ahmad Yani, Terminal Terboyo, serta Stasiun Kereta Api Tawang dan Poncol yang semakin menguatkan peran Kota Semarang sebagai simpul aktivitas pembangunan sekaligus gerbang perekonomian di Provinsi Jawa Tengah dan bagian tengah Pulau Jawa.

3.2 Kondisi Penduduk

3.2.1. Jumlah Penduduk

Selama 10 tahun terakhir dari tahun 2012 hingga 2022 pertumbuhan penduduk di Kota Semarang mengalami perkembangan yang fluktuatif cenderung meningkat. Tercatat tahun 2012 jumlah penduduk Kota Semarang sebesar 1.559.198 jiwa melonjak hingga 1.814.110 jiwa di tahun 2019, namun kembali berangsut menurun sejak tahun 2020 hingga 2022 menjadi 1.659.975 jiwa ditahun 2022. Penurunan jumlah penduduk Kota Semarang sejak tahun 2020 dianulir disebabkan karena tingginya angka kematian akibat pandemic covid 19 yang terjadi sejak tahun 2019. Secara rinci kondisi jumlah penduduk Kota Semarang tahun 2012 hingga 2022 dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Kota Semarang,2023

Gambar 3. 2 Jumlah Penduduk Kota Semarang Tahun 2012-2022

Selaras dengan kondisi fluktuatif di tingkat kota, perkembangan jumlah penduduk di masing-masing kecamatan di Kota Semarang. Selama 10 tahun terakhir rata-rata kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling tinggi berada di Kecamatan Pedurungan, Tembalang, Semarang Barat, Banyumanik, dan Ngaliyan. Tingginya jumlah penduduk di kelima kecamatan tersebut dimungkinkan akan terus terjadi pada tahun-tahun yang akan datang, sehingga perlu diperhatikan ketersediaan sarana prasarana, dan sumber daya pendukung pembangunan wilayah kecamatan. Secara rinci jumlah penduduk di masing-

masing kecamatan di Kota Semarang tahun 2012 hingga 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

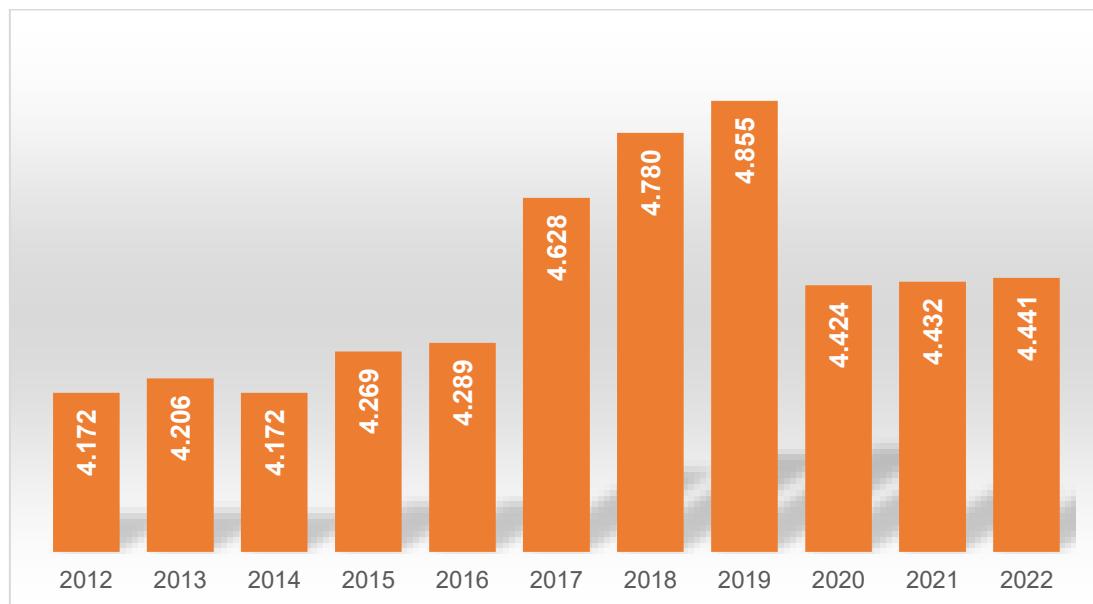
Tabel 3. 2 Jumlah Penduduk Kota Semarang Per Kecamatan Tahun 2012-2022

Kecamatan	Jumlah Penduduk											
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-Rata
Mijen	56.570	57.887	56.570	61.405	63.348	70.889	74.864	76.037	80.906	83.321	85.818	69.783
Gunungpati	75.027	75.885	75.027	78.641	79.984	88.746	116.928	118.760	98.023	98.343	98.674	91.276
Banyumanik	128.225	130.494	128.225	132.508	133.489	146.732	162.408	164.953	142.076	141.689	141.319	141.102
Gajahmungkur	63.430	63.599	63.430	63.707	63.766	69.510	59.743	60.679	56.232	55.857	55.490	61.404
Semarang Selatan	82.931	82.293	82.931	79.620	79.162	85.456	69.433	70.522	62.030	61.616	61.212	74.291
Candisari	79.902	79.706	79.902	79.258	78.863	85.652	75.671	76.857	75.456	74.952	74.461	78.244
Tembalang	142.941	147.564	142.941	156.868	159.066	175.732	206.271	209.504	189.680	191.560	193.480	174.146
Pedurungan	175.770	177.143	175.770	180.282	181.629	199.153	211.376	214.689	193.151	193.128	193.125	190.474
Genuk	91.527	93.439	91.527	97.545	99.508	110.556	117.174	119.010	123.310	125.967	128.696	108.933
Gayamsari	73.584	73.745	73.584	74.178	74.122	80.751	81.755	83.036	70.261	69.792	69.334	74.922
Semarang Timur	78.889	78.622	78.889	77.331	76.608	82.867	74.592	75.762	66.302	65.859	65.427	74.650
Semarang Utara	127.921	128.026	127.921	127.752	127.132	137.776	117.801	119.647	117.605	116.820	116.054	124.041
Semarang Tengah	71.674	71.200	71.674	70.179	69.711	74.954	60.158	61.102	55.064	54.696	54.338	64.977
Semarang Barat	158.981	158.668	158.981	158.131	157.554	171.315	162.501	165.048	148.879	147.885	146.915	157.714
Tugu	30.904	31.279	30.904	31.954	32.041	35.023	32.818	33.333	32.822	32.948	33.079	32.464
Ngaliyan	120.922	122.555	120.922	125.828	126.734	137.980	162.622	165.171	141.727	142.131	142.553	137.195
Kota Semarang	1.559.198	1.572.105	1.559.198	1.595.187	1.602.717	1.753.092	1.786.114	1.814.110	1.653.524	1.656.564	1.659.975	1.655.617

Sumber: BPS Kota Semarang, 2023

3.2.2. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk Kota Semarang tahun 2012 hingga 2022 juga mengalami perkembangan fluktuatif cenderung meningkat, selaras dengan pertumbuhan jumlah penduduk di Kota Semarang. Tercatat pada tahun 2012 kepadatan penduduk di Kota Semarang sebesar 4.172 jiwa/Km² meningkat di tahun 2022 menjadi 4.441 jiwa/Km². Kepadatan penduduk di Kota Semarang paling tinggi terjadi di tahun 2019 sebesar 4.855 jiwa/Km². Berkaca dari kondisi tahun 2019 tingginya kepadatan penduduk di Kota Semarang dimungkinkan akan terjadi di tahun-tahun yang akan datang sehingga perlu diperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam pemenuhan sarana prasarana di Kota Semarang ke depannya. Secara rinci kondisi kepadatan penduduk tahun 2012 hingga 2022 dapat dilihat sebagai berikut.



Sumber: BPS Kota Semarang, 2023.

Gambar 3. 3 Kepadatan Penduduk Kota Semarang Tahun 2012-2022

Selama kurun waktu 10 tahun kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan penduduk paling tinggi di Kota Semarang antara lain adalah Kecamatan Semarang Selatan, Gayamsari, Candisari, Semarang Utara, dan Semarang Timur. Secara rinci kondisi kepadatan penduduk di Kota Semarang per Kecamatan dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel 3. 3 Kepadatan Penduduk Kota Semarang Per Kecamatan Tahun 2012-2022

Kecamatan	Kepadatan Wilayah											
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-Rata
Mijen	983	1.005	983	1.067	1.101	1.213	1.301	1.321	1.431	1.474	1.518	1.218
Gunungpati	1.387	1.402	1.387	1.453	1.478	2.023	2.161	2.195	1.682	1.688	1.693	1.686
Banyumanik	4.991	5.079	4.991	5.158	5.196	6.072	6.322	6.421	4.777	4.764	4.751	5.320
Gajahmungkur	6.993	7.012	6.993	7.024	7.030	6.611	6.587	6.690	6.018	5.978	5.939	6.625
Semarang Selatan	13.990	13.882	13.990	13.431	13.354	11.755	11.713	11.896	10.432	10.362	10.294	12.282
Candisari	12.217	12.187	12.217	12.119	12.059	11.613	11.570	11.752	11.795	11.717	11.640	11.899
Tembalang	3.234	3.338	3.234	3.549	3.599	4.394	4.667	4.740	4.806	4.853	4.902	4.120
Pedurungan	8.483	8.549	8.483	8.701	8.766	9.839	10.202	10.361	9.150	9.149	9.149	9.166
Genuk	3.342	3.411	3.342	3.561	3.633	4.045	4.278	4.345	4.747	4.849	4.954	4.046
Gayamsari	11.913	11.938	11.913	12.009	12.000	12.853	13.235	13.443	11.296	11.221	11.147	12.088
Semarang Timur	10.245	10.210	10.245	10.043	9.949	9.722	9.687	9.839	12.229	12.147	12.067	10.580
Semarang Utara	11.661	11.670	11.661	11.646	11.589	10.771	10.738	10.907	10.323	10.254	10.187	11.037
Semarang Tengah	11.673	11.596	11.673	11.430	11.353	9.833	9.798	9.951	10.643	10.572	10.503	10.820
Semarang Barat	7.313	7.298	7.313	7.274	7.247	7.408	7.475	7.592	6.868	6.822	6.778	7.217
Tugu	972	984	972	1.005	1.008	1.008	1.033	1.049	1.167	1.171	1.176	1.050
Ngaliyan	3.183	3.226	3.183	3.312	3.336	4.050	4.281	4.348	3.297	3.306	3.316	3.531
Kota Semarang	4.172	4.206	4.172	4.269	4.289	4.628	4.780	4.855	4.424	4.432	4.441	4.424

Sumber: BPS Kota Semarang, 2023

3.2.3. Jumlah Penduduk Menurut Usia

Jumlah penduduk menurut usia di Kota Semarang selama 10 tahun terakhir sejak tahun 2012 hingga 2022 rata-rata didominasi oleh penduduk usia 20 – 24 tahun, usia 15 – 19 tahun dan usia 30 – 34 tahun. Melihat kondisi tersebut dimungkinkan selama dua puluh tahun ke depan akan terjadi lonjakan penduduk pada usia 25 tahun hingga 44 tahun. Melihat kondisi tersebut maka perlu diperhatikan ketersediaan lapangan pekerjaan, pemenuhan pangan dan aspek lain yang penting bagi keberlanjutan pembangunan masyarakat. Kondisi jumlah penduduk Kota Semarang berdasarkan usia secara rinci dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 3. 4 Jumlah Penduduk Kota Semarang Berdasarkan Usia Tahun 2012-2022

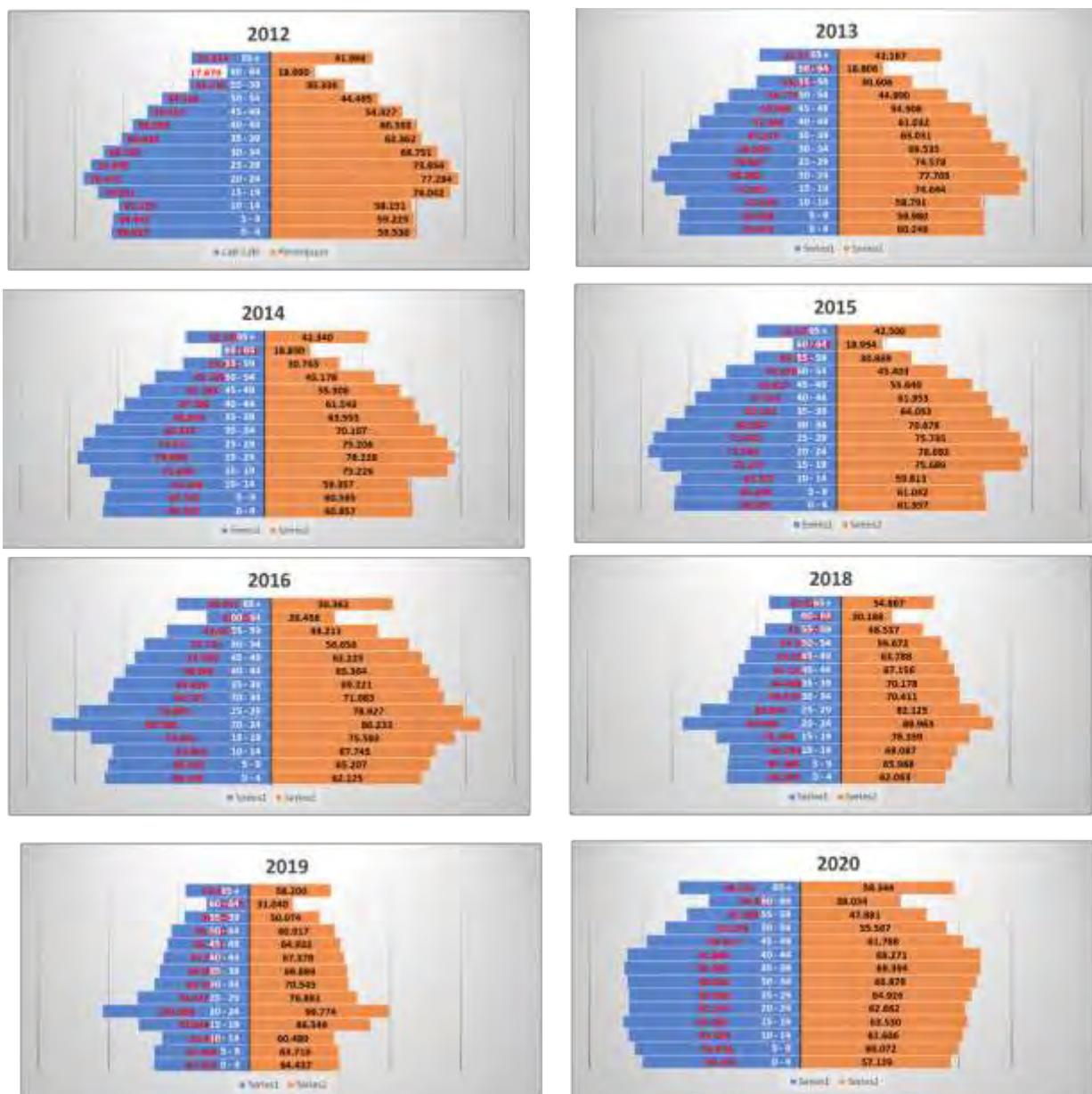
Kelompok Umur	Jumlah Penduduk											Rata-Rata
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
0 - 4	124.567	125.877	127.144	128.160	130.294	124.855	130.121	132.390	117.085	116.177	115.384	124.732
5 - 9	123.667	125.079	126.317	127.296	131.909	125.206	133.452	131.260	122.988	121.932	121.061	126.379
10 - 14	120.204	121.431	122.605	123.540	132.709	132.470	135.380	122.967	126.945	125.648	124.332	126.203
15 - 19	144.573	145.665	146.865	147.816	149.474	149.301	150.703	165.593	130.816	129.178	127.834	144.347
20 - 24	153.759	154.103	155.126	156.023	176.013	195.427	184.371	203.873	127.826	125.551	123.356	159.584
25 - 29	147.324	148.565	149.777	150.794	157.822	157.058	165.799	156.358	130.016	128.973	127.842	147.303
30 - 34	137.114	138.394	139.641	140.630	137.870	139.728	137.330	138.052	132.695	132.127	131.434	136.820
35 - 39	123.188	124.347	125.471	126.367	133.647	144.722	134.667	133.963	135.294	135.236	135.311	132.019
40 - 44	116.952	118.074	119.109	119.929	124.926	120.652	128.270	128.692	134.160	134.398	134.405	125.415
45 - 49	104.742	105.768	106.592	107.253	118.014	123.842	121.124	123.063	120.315	121.310	122.443	115.861
50 - 54	88.909	89.675	90.286	90.773	108.391	106.267	113.779	116.267	106.845	108.078	109.113	102.580
55 - 59	63.552	64.026	64.364	64.654	86.662	85.192	93.851	96.369	91.166	93.158	95.163	81.651
60 - 64	36.369	36.563	36.731	36.858	52.844	60.663	59.577	61.596	72.877	74.977	77.040	55.100
65 +	74.280	74.540	74.878	75.173	88.853	87.709	97.690	103.667	104.496	109.821	56.408	86.138
Jumlah	1.559.200	1.572.107	1.584.906	1.595.266	1.729.428	1.753.092	1.786.114	1.814.110	1.653.524	1.656.564	1.601.126	1.664.131

Sumber: BPS Kota Semarang, 2023

Analisis Demografi

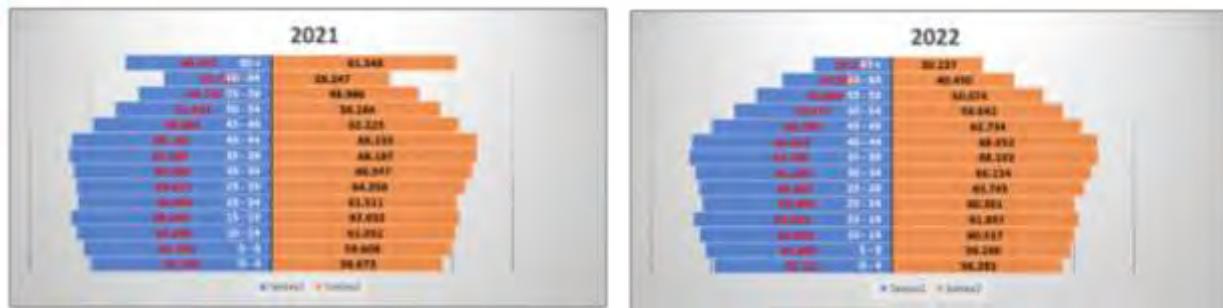
Untuk Penyusunan RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045

Kondisi penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin selanjutnya dapat dilihat detail melalui bentuk piramida penduduk. Selama 20 tahun kebelakang struktur penduduk di Kota Semarang menurut usia membentuk piramida penduduk statisioner. Dengan rata-rata komposisi penduduk paling banyak usia lebih dari 65 tahun sejak tahun 2012 hingga 2021, namun di tahun 2022 piramida penduduk menunjukkan bentuk statisioner dengan penduduk banyak pada usia 35-44 tahun. Gambaran piramida penduduk di Kota Semarang sejak tahun 2012 hingga 2022 dapat dilihat sebagai berikut.



Analisis Demografi

Untuk Penyusunan RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045

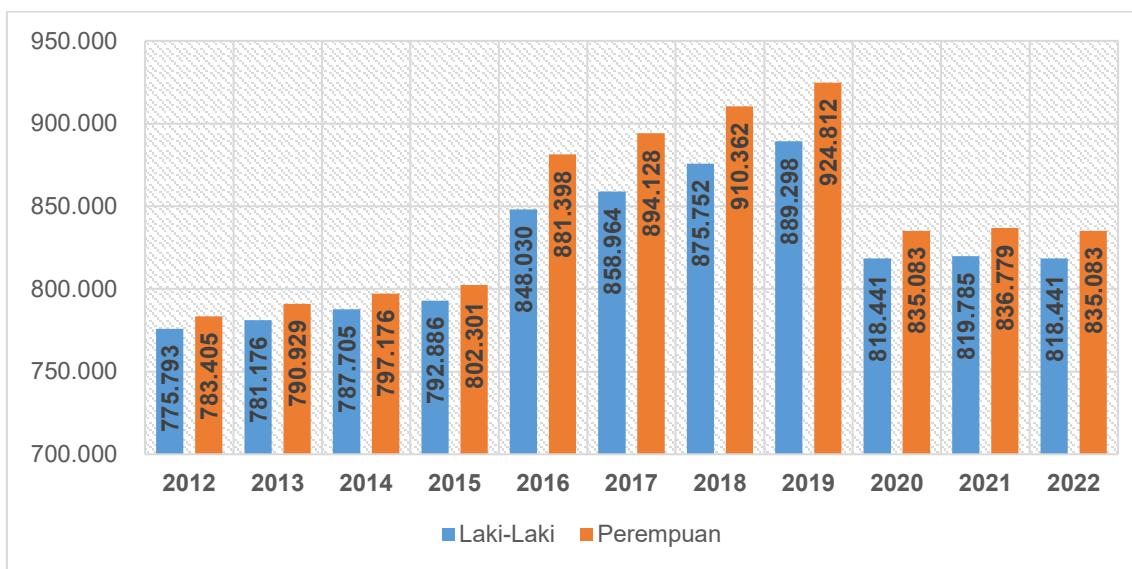


Sumber: BPS Kota Semarang, 2023

Gambar 3. 4 Piramida Penduduk Kota Semarang Tahun 2012-2022

3.2.4. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan

Penduduk Kota Semarang sejak tahun 2012 hingga 2022 di dominasi oleh penduduk berjenis kelamin perempuan. Dominasi penduduk perempuan dibandingkan penduduk laki-laki tertinggi terjadi pada tahun 2019, dengan kondisi terdapat 35.514 jiwa penduduk perempuan lebih banyak dibanding jumlah penduduk laki-laki. Sedangkan dominasi penduduk perempuan dibandingkan penduduk laki-laki paling kecil terjadi pada tahun 2012, dengan kondisi hanya sebanyak 7.612 jiwa penduduk perempuan mendominasi penduduk laki-laki. Secara rinci gambar jumlah penduduk menurut jenis kelamin di Kota Semarang dapat dilihat sebagai berikut.



Sumber: BPS Kota Semarang, 2023

Gambar 3. 5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Semarang Tahun 2012-2022

Lima Kecamatan dengan jumlah penduduk laki-laki paling tinggi terdapat di Kecamatan Pedurungan, Tembalang, Semarang Barat, Banyumanik, dan Ngaliyan. Sedangkan jumlah penduduk perempuan paling banyak terdapat di Kecamatan Pedurungan, Tembalang, Semarang Barat, Banyumanik dan Ngaliyan. Kondisi sebaran penduduk berdasarkan jenis kelamin juga perlu diperhatikan untuk memetakan kebutuhan sarana prasarana sesuai dengan kebutuhan gender. Secara rinci kondisi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan dapat dilihat pada Tabel 3.5 dan Tabel 3.6 berikut.

Tabel 3. 5 Jumlah Penduduk Berjenis Kelamin Laki-Laki Kota Semarang Tahun 2012-2022

Kecamatan	Laki laki											
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-Rata
Mijen	28.479	29.192	29.957	30.942	34.991	35.271	37.519	38.099	40.520	41.695	40.520	35.199
Gunungpati	37.534	37.963	38.713	39.403	54.366	43.772	58.058	58.956	49.023	49.179	49.023	46.908
Banyumanik	63.671	64.158	64.591	65.158	76.263	71.137	79.363	80.590	70.074	69.891	70.074	70.452
Gajahmungkur	31.760	31.859	31.890	31.909	29.852	34.299	29.731	30.190	27.592	27.396	27.592	30.370
Semarang Selatan	41.357	40.758	39.504	39.323	33.086	41.536	32.951	33.461	30.168	29.954	30.168	35.661
Candisari	39.649	39.517	39.551	39.333	37.157	41.854	37.006	37.578	37.232	36.967	37.232	38.461
Tembalang	72.234	74.629	78.378	79.440	96.198	87.580	102.115	103.695	94.453	95.369	94.453	88.959
Pedurungan	86.884	87.441	88.138	89.005	100.946	97.025	104.617	106.235	95.791	95.725	95.791	95.236
Genuk	45.928	46.912	47.861	49.086	55.506	54.909	58.681	59.589	61.884	63.182	61.884	55.038
Gayamsari	37.099	37.254	37.297	37.463	39.335	40.176	40.487	41.113	34.912	34.664	34.912	37.701
Semarang Timur	38.842	38.671	38.378	38.072	34.544	40.327	34.404	34.936	32.181	31.952	32.181	35.863
Semarang Utara	62.339	62.256	62.264	62.041	57.475	65.911	57.275	58.161	58.051	57.692	58.051	60.138
Semarang Tengah	35.023	64.766	34.541	34.333	27.912	36.188	27.798	28.228	26.373	26.186	26.373	33.429
Semarang Barat	79.214	78.970	78.884	78.650	78.420	83.877	79.089	80.312	73.130	72.610	73.130	77.844
Tugu	15.393	15.642	15.761	15.942	15.999	17.234	16.380	16.633	16.457	16.515	16.457	16.219
Ngaliyan	60.387	61.188	61.952	62.786	75.980	67.868	80.279	81.521	70.600	70.808	70.600	69.452
Kota Semarang	775.793	781.176	787.705	792.886	848.030	858.964	875.752	889.298	818.441	819.785	818.441	824.206

Sumber: BPS Kota Semarang, 2023

Tabel 3. 6 Jumlah Penduduk Berjenis Kelamin Perempuan Kota Semarang Tahun 2012-2022

Kecamatan	Perempuan											
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-Rata
Mijen	28.091	28.695	29.468	30.463	34.798	35.618	37.345	37.938	40.386	41.626	40.386	34.983
Gunungpati	37.493	37.922	38.595	39.238	55.079	44.974	58.870	59.804	49.000	49.164	49.000	47.194
Banyumanik	64.554	66.336	66.813	67.350	79.731	75.595	83.045	84.363	72.002	71.798	72.002	73.054
Gajahmungkur	31.670	31.740	31.770	31.798	30.108	35.211	30.013	30.489	28.640	28.461	28.640	30.776
Semarang Selatan	41.574	51.535	40.448	40.297	36.598	43.920	36.481	37.061	31.862	31.662	31.862	38.482
Candisari	40.253	40.189	40.095	39.925	38.789	43.798	38.665	39.279	38.224	37.985	38.224	39.584
Tembalang	70.707	79.935	76.319	77.428	98.033	88.152	104.156	105.809	95.227	96.191	95.227	89.744
Pedurungan	88.886	89.702	90.361	91.277	102.920	102.128	106.759	108.453	97.360	97.403	97.360	97.510
Genuk	45.599	46.527	47.357	48.459	55.280	55.646	58.493	59.421	61.426	62.785	61.426	54.765
Gayamsari	36.485	36.491	36.553	36.715	40.059	40.575	41.268	41.923	35.349	35.128	35.349	37.809
Semarang Timur	40.047	39.951	39.641	39.259	40.317	42.541	40.189	40.826	34.121	33.907	34.121	38.629
Semarang Utara	65.582	65.770	65.870	65.711	60.683	71.865	60.525	61.486	59.554	59.128	59.554	63.248
Semarang Tengah	36.651	36.434	36.186	35.846	32.463	38.766	32.360	32.874	28.691	28.510	28.691	33.407
Semarang Barat	79.767	79.698	79.626	79.481	82.634	87.438	83.412	84.736	75.749	75.275	75.749	80.324
Tugu	15.511	15.637	15.831	16.012	16.042	17.789	16.439	16.700	16.365	16.433	16.365	16.284
Ngaliyan	60.535	61.367	62.243	63.042	77.864	70.113	82.343	83.650	71.127	71.323	71.127	70.430
Kota Semarang	783.405	790.929	797.176	802.301	881.398	894.128	910.362	924.812	835.083	836.779	835.083	844.678

Sumber: BPS Kota Semarang, 2023

3.3 Kondisi Eksisting Sarana Prasarana Lingkungan di Kota Semarang

3.3.1. Kondisi Eksisting Rumah/Tempat Tinggal

Pemenuhan kebutuhan rumah/tempat tinggal sering kali dihadapkan pada permasalahan pemukiman kumuh yang cenderung mengakibatkannya munculnya rumah tidak layak huni. Pada tahun 2021, Pemerintah Kota Semarang menetapkan lokasi perumahan dan permukiman kumuh seluas 431,54 Ha yang meliputi 45 (empat puluh lima) kelurahan di 13 (tiga belas) kecamatan melalui SK Walikota Semarang Nomor 050/275 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Semarang, kondisi tersebut data dasar penanganan perumahan dan permukiman kumuh dalam Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh Tahun 2022-2026. Tercatat Lokasi perumahan dan permukiman kumuh meliputi 45 (empat puluh lima) kelurahan di 13 (tiga belas) kecamatan, dengan luas total sebesar 431, 54 Ha (empat ratus tiga puluh satu koma lima puluh empat hektar). Penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh di Kota Semarang menjadi acuan prioritas pembangunan daerah dalam bidang perumahan dan permukiman bersama pemerintah provinsi dan pusat.

Tabel 3.7 Lokasi Permukiman dan Perumahan Kumuh di Kota Semarang

No	Lokasi		Luas permukiman (Ha)	Skoring	Tingkat Kekumuhan
	KEC.	KEL.			
1	Banyumanik	Jabungan	18,5	19	Kumuh Ringan
2	Gayamsari	Kaligawe	7,86	18	Kumuh Ringan
3	Gayamsari	Tambakrejo	5,11	25	Kumuh Ringan
4	Genuk	Bangetayu Kulon	1,5	17	Kumuh Ringan
5	Genuk	Bangetayu Wetan	8,35	17	Kumuh Ringan
6	Genuk	Banjardowo	28,15	17	Kumuh Ringan
7	Genuk	Karang Roto	5,05	30	Kumuh Ringan
8	Genuk	Kudu	6,4	32	Kumuh Ringan
9	Genuk	Trimulyo	2,03	18	Kumuh Ringan
10	Gunungpati	Plalangan	3,19	39	Kumuh Sedang
11	Gunungpati	Pongangan	5,81	29	Kumuh Ringan
12	Gunungpati	Sukorejo	2,4	23	Kumuh Ringan
13	Mijen	Jatibarang	25,62	32	Kumuh Ringan
14	Mijen	Karangmalang	15,61	33	Kumuh Ringan
15	Mijen	Kedungpani	4,74	18	Kumuh Ringan

Analisis Demografi

Untuk Penyusunan RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045

No	Lokasi		Luas permukiman (Ha)	Skoring	Tingkat Kekumuhan
	KEC.	KEL.			
16	Mijen	Ngadirgo	10,97	29	Kumuh Ringan
17	Mijen	Polaman	11,54	34	Kumuh Ringan
18	Mijen	Purwosari	8,25	46	Kumuh Sedang
19	Mijen	Tambangan	19,62	39	Kumuh Sedang
20	Mijen	Wonolopo	11,96	22	Kumuh Ringan
21	Mijen	Wonoplumbon	14,97	41	Kumuh Sedang
22	Ngaliyan	Wates	8,74	23	Kumuh Ringan
23	Ngaliyan	Wonosari	18,1	21	Kumuh Ringan
24	Pedurungan	Muktiharjo Kidul	8,62	22	Kumuh Ringan
25	Semarang Barat	Tawangmas	2,6	16	Kumuh Ringan
26	Semarang Tengah	Jagalan	0,4	29	Kumuh Ringan
27	Semarang Tengah	Kauman	1,4	42	Kumuh Sedang
28	Semarang Timur	Kemijen	8,99	20	Kumuh Ringan
29	Semarang Utara	Bandarharjo	4,26	24	Kumuh Ringan
30	Semarang Utara	Bulu Lor	1,85	22	Kumuh Ringan
31	Semarang Utara	Dadapsari	25,32	18	Kumuh Ringan
32	Semarang Utara	Kuningan	14,1	18	Kumuh Ringan
33	Semarang Utara	Panggung Kidul	5,47	18	Kumuh Ringan
34	Semarang Utara	Plombokan	4,83	20	Kumuh Ringan
35	Semarang Utara	Purwosari	2,84	17	Kumuh Ringan
36	Semarang Utara	Tanjungmas	17,34	16	Kumuh Ringan
37	Tembalang	Kedungmundu	13,3	23	Kumuh Ringan
38	Tembalang	Meteseh	5,71	39	Kumuh Sedang
39	Tembalang	Rowosari	13,75	22	Kumuh Ringan
40	Tugu	Karanganyar	19,25	18	Kumuh Ringan
41	Tugu	Mangkang Kulon	6,37	22	Kumuh Ringan
42	Tugu	Mangkang Wetan	8,03	17	Kumuh Ringan
43	Tugu	Mangunharjo	2,55	18	Kumuh Ringan
44	Tugu	Randu Garut	13,9	23	Kumuh Ringan
45	Tugu	Tugurejo	6,19	27	Kumuh Ringan
TOTAL			431,54		

Sumber: Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh Tahun 2022-2026

Permukiman kumuh di Kota Semarang umumnya berada di pinggiran kota, bantaran rel dan bantaran sungai dengan tipologi dataran rendah dan tepi air. Seperti permasalahan– permasalahan permukiman kumuh umumnya, permasalahan yang banyak terjadi didaerah permukiman kumuh Kota Semarang adalah permasalahan sampah, jalan, dan drainase lingkungan.

Kawasan permukiman kumuh yang terdapat di Kota Semarang berupa kawasan kumuh bertipologi permukiman kumuh pesisir, permukiman kumuh pinggir kota, permukiman kumuh pusat kota, permukiman padat bangunan, permukiman baru, permukiman genangan banjir, permukiman dekat sungai, permukiman bantaran sungai, permukiman dekat pertanian dan permukiman

pesisir. Berdasarkan total keseluruhan kumuh yaitu sebesar 431,54 Ha. Lokasi kawasan kumuh Kota Semarang dapat dilihat pada tabel berikut.

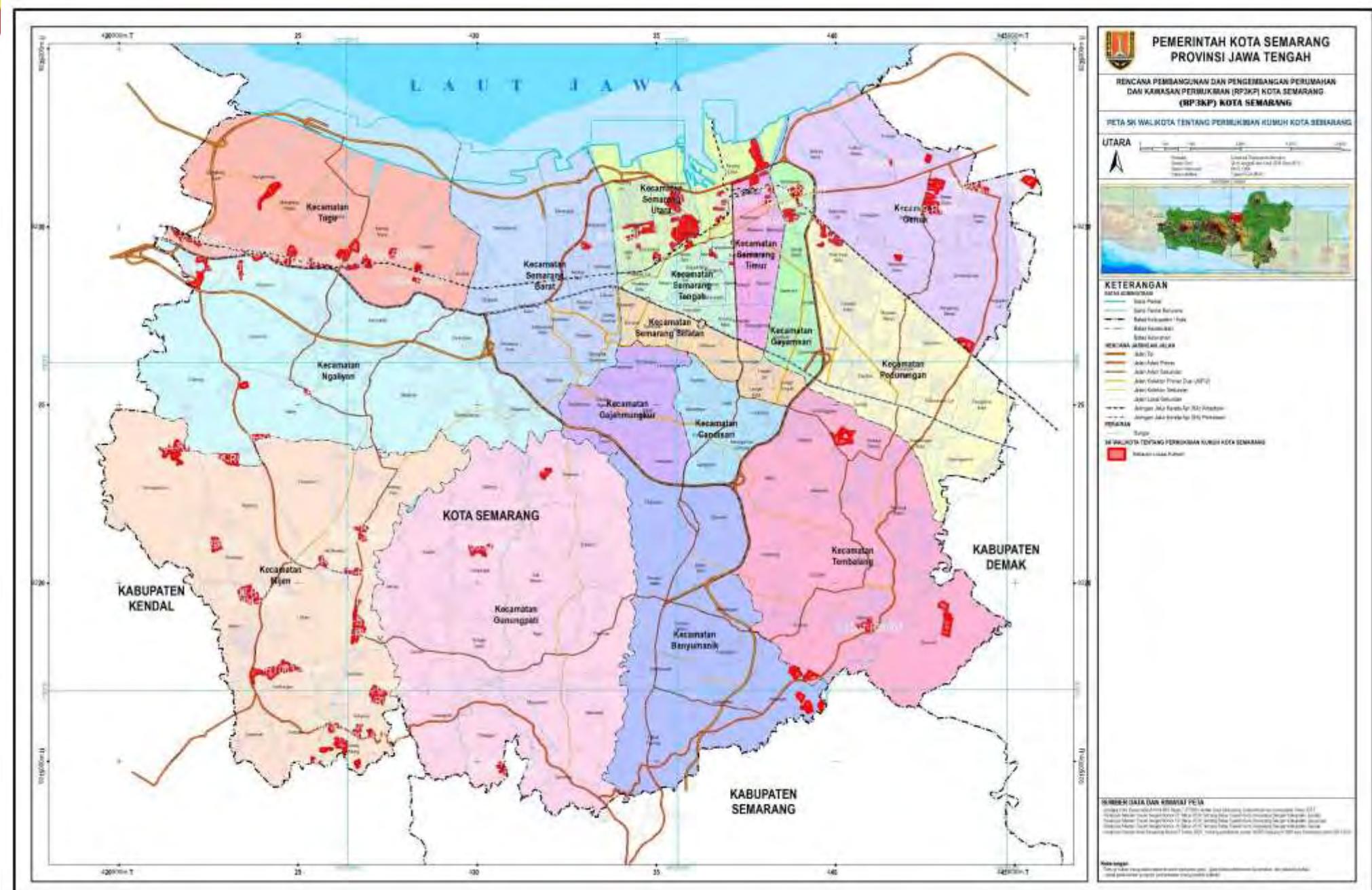
Tabel 3.8 Sebaran Kawasan Permukiman dan Perumahan Kumuh di Kota Semarang

No	Nama Kawasan	Kecamatan	Kelurahan	Kondisi Awal	Kondisi Akhir
1	Kawasan Banjardowo	Genuk	Banjardowo	28,15	28,15
2	Kawasan Tambangan	Mijen	Tambangan	19,62	19,62
3	Kawasan Karanganyar	Tugu	Karanganyar	19,25	19,25
4	Kawasan Jabungan	Banyumanik	Jabungan	18,5	18,5
5	Kawasan Jatibarang	Mijen	Jatibarang	25,62	25,62
6	Kawasan Dadapsari-Kuningan	Semarang Utara	Dadapsari	25,32	25,32
7	Kawasan Tanjung Mas	Semarang Utara	Tanjung Mas	17,34	17,34
Jumlah Luasan Permukiman Kumuh				167,9	167,9

Sumber: Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh Tahun 2022-2026

Analisis Demografi

Untuk Penyusunan RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045



Selanjutnya untuk menentukan kebutuhan rumah perlu untuk melihat kondisi eksisting *Backlog Rumah* di suatu daerah. *Backlog Rumah* adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur jumlah kebutuhan rumah. *Backlog* rumah dari perspektif kepenghunian dihitung dengan mengacu pada konsep perhitungan ideal: 1 keluarga menghuni 1 rumah. Rumus yang digunakan untuk menghitung backlog rumah dari perspektif kepenghunian adalah:

$$\text{Backlog} = \sum \text{Keluarga} - \sum \text{Rumah}$$

Data dasar kondisi *Backlog Rumah* di Kota Semarang pada tahun 2022 di masing-masing kecamatan **digambarkan** sebagai berikut.

Tabel 3. 9 Data Backlog Rumah di Kota Semarang Tahun 2022

Kecamatan	Jumlah KK	Jumlah Rumah	Backlog
Banyumanik	46.606	46.720	-114
Candisari	27.879	18.727	9.152
Gajahmungkur	19.984	16.958	3.026
Gayamsari	24.080	17.658	6.422
Genuk	36.580	37.113	-533
Gunungpati	31.364	33.185	-1.821
Mijen	24.620	27.389	-2.769
Ngaliyan	44.804	44.492	312
Pedurungan	62.372	58.321	4.051
Semarang Barat	52.518	40.407	12.111
Semarang Selatan	24.098	19.703	4.395
Semarang Tengah	22.985	19.388	3.597
Semarang Timur	25.710	19.981	5.729
Semarang Utara	43.115	29.417	13.698
Tembalang	57.635	57.873	-238
Tugu	11.383	10.454	929
Kota Semarang	555.733	497.786	57.947

Sumber: Dokumen Rencana Kawasan Permukiman (RKP) Kota Semarang Tahun 2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni. Data dasar RTLH menjadi salah satu data yang perlu diperhatikan untuk melihat kondisi kebutuhan rumah/tempat tinggal masyarakat kedepannya. Hingga bulan November 2023 masih terdapat 6.113 Rumah Tidak Layak Huni di Kota Semarang. Kecamatan dengan RTLH tertinggi terdapat di Kecamatan Semarnag Utara dengan RTLH

sebanyak 1.110 unit. Rincian kodisi RTLH Kota Semarang Tahun 2023 dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 3. 10 Data Rumah Tidak Layak Huni

KECAMATAN	JUMLAH
Semarang Tengah	299 Unit
Semarang Utara	1.110 Unit
Semarang Timur	348 Unit
Gayamsari	292 Unit
Genuk	667 Unit
Pedurungan	307 Unit
Semarang Selatan	123 Unit
Candisari	248 Unit
Gajahmungkur	153 Unit
Tembalang	840 Unit
Banyumanik	164 Unit
Gunungpati	248 Unit
Semarang Barat	294 Unit
Mijen	411 Unit
Ngaliyan	440 Unit
Tugu	169 Unit
Jumlah Kota Semarang	6.113 Unit

Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2023

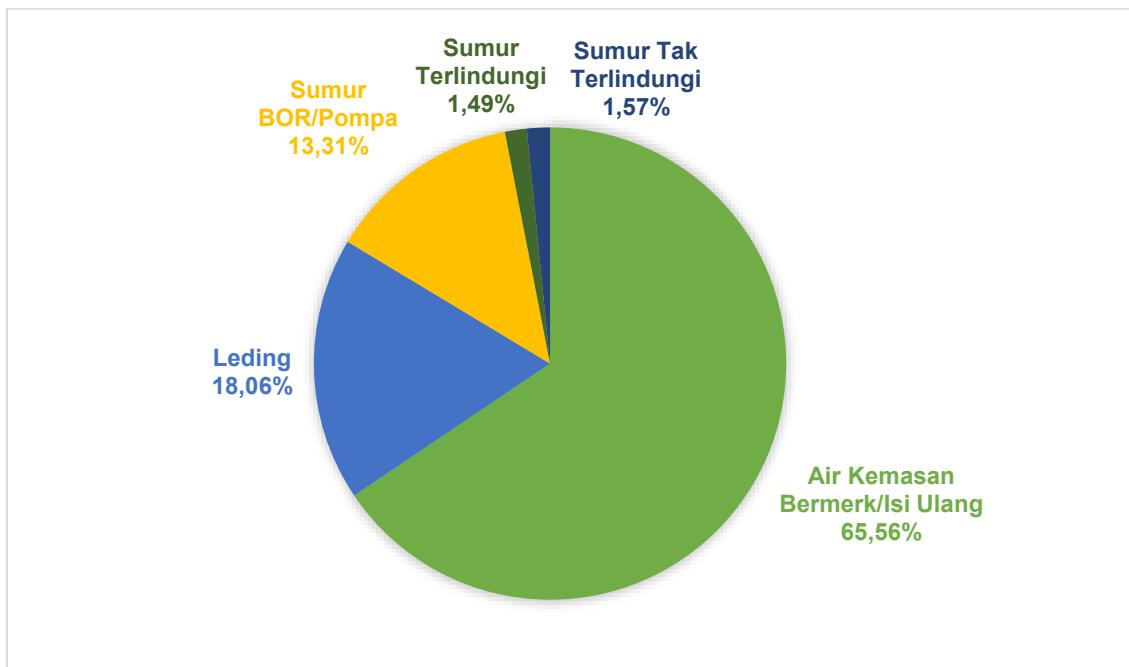
3.3.2. Kondisi Eksisting Pemenuhan Kebutuhan Air Minum

Air bersih merupakan kebutuhan manusia yang paling mendasar, terutama untuk kebutuhan minum dan memasak. Dalam satu hari seseorang membutuhkan air minum rata-rata 1,5 liter (sekitar 8 gelas). Di samping pemenuhan kebutuhan akan air harus mencukupi, tentunya harus diperhatikan pula faktor kebersihan dan kesehatan air yang digunakan. Ketiadaan air bersih dapat mengakibatkan berbagai penyakit, seperti diare dan cacingan.

Ketersediaan air bersih kini menjadi salah satu prioritas utama dalam pembangunan mengingat ketersediaan air bersih yang semakin tidak berimbang dengan pertambahan jumlah penduduk. Ketersediaan air bersih dalam rumah tangga dapat dilihat dari sumber air minum yang digunakan serta jarak sumber air minum ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat. Air bersih dikatakan tersedia dalam rumah tangga jika sumber air minumannya terlindung, seperti diperoleh dari air kemasan bermerk, air isi ulang, leding meteran, leding

eceran, sumur bor/pompa, dan sumur terlindung. Sumber air minum terlindung tersebut dianggap merupakan sumber air bersih dengan catatan sumur bor/pompa dan sumur terlindung memiliki jarak lebih dari 10 meter ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat. Bukan air bersih disini mencakup sumber air minum tidak terlindung seperti sumur tak terlindung, mata air tak terlindung, air sungai, air hujan, dan lainnya.

Terdapat Rumah Tangga 98,48% di Kota Semarang menggunakan sumber air minum terlindung, sedangkan 1,52% sisanya menggunakan sumber air minum dari sumber tak terlindung. Dari sumber air minum terlindung yang digunakan oleh rumah tangga, sebagian besar rumah tangga menggunakan sumber air minum yang berasal dari air kemasan bermerk/isi ulang, yaitu sebesar 63,77%. Secara rinci gambaran persentase rumah tangga menurut sumber air minum di Kota Semarang dapat dilihat pada gambar berikut.

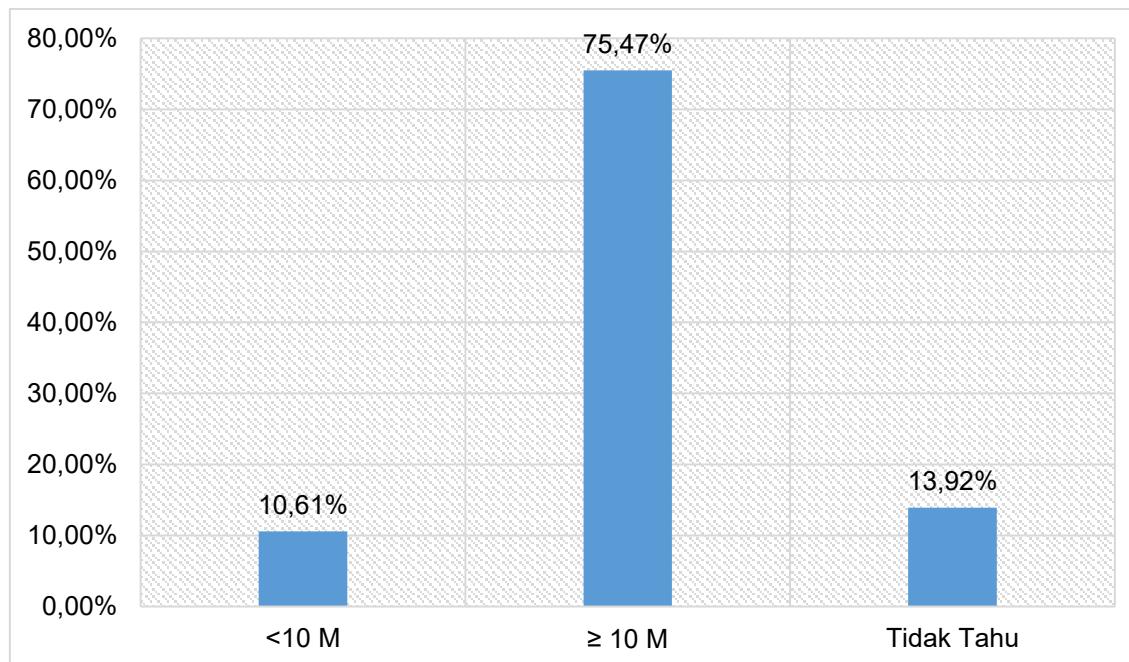


Sumber: Dokumen Rencana Kawasan Permukiman (RKP) Kota Semarang Tahun 2022

Gambar 3. 6 Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Minum di Kota Semarang

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, jarak sumber air minum ke tempat penampungan tinja juga menjadi syarat ketersediaan air bersih. Menurut Kementerian Kesehatan, agar tidak mencemari sumber air minum, maka lubang penampungan tinja sebaiknya berjarak 10-15meter dari sumber air bersih.

Berdasarkan gambar di bawah ini, tercatat bahwa sekitar 75,47% rumah tangga sudah memiliki sumber air minum yang berjarak lebih dari 10 meter dari tempat penampungan tinja terdekat. Sementara itu, rumah tangga yang tidak mengetahui jarak sumber air minumnya ke tempat penampungan tinja sebesar 10,61%.



Sumber: Dokumen Rencana Kawasan Permukiman (RKP) Kota Semarang Tahun 2022

Gambar 3.7 Persentase Rumah tangga menurut Jarak Sumber Air Minum ke Tempat Penampungan Limbah/Kotoran/Tinja Terdekat di Kota Semarang

3.3.3. Kondisi Eksisting Pemenuhan Listrik

Kebutuhan energi listrik akan terus meningkat sejalan dengan peningkatan roda perekonomian di Kota Semarang. Maka dari itu, PLN sebagai Perusahaan Negara yang menangani listrik terus meningkatkan kinerjanya sebagai antisipasi dari peningkatan kebutuhan tenaga listrik. Tercatat pada tahun 2021 jumlah produksi listrik PLN mencapai 4.261.932,38 MWh dengan daya terpasang sebesar 2.420,82 MVA dan MWh terjual hingga 4.007.835,61 MWh. Berikut kebutuhan energi listrik Kota Semarang berdasarkan golongan tarif tahun 2021.

Tabel 3. 11 Daya Terpasang, Produksi, dan Dsitrbusi Kota Semarang

Rayon/ULP	Daya Terpasang (MVA)	Produksi Listrik (MWh)	Listrik Terjual (MWh)	Dipakai Sendiri (MWh)	Susut/ Hilang (MWh)
Semarang Tengah	574.419	969,13	907,60	0,53	61,00
Semarang Barat	527.084	899,56	862,20	0,53	36,83
Semarang Timur	554.785	979,06	889,97	0,53	88,56
Semarang Selatan	265.977	413,84	388,35	0,53	24,96
Kota Semarang	1.922,265	3.261,59	3.048,12	2,12	211,35

Sumber: Kota Semarang dalam Angka, 2023

Kebutuhan energi listrik akan terus meningkat sejalan dengan peningkatan roda perekonomian di Kota Semarang. Maka dari itu, PLN sebagai Perusahaan Negara yang menangani lisirik terus meningkatkan kinerjanya sebagai antisipasi dari peningkatan kebutuhan tenaga listrik. Tercatat pada tahun 2021 jumlah produksi listrik PLN mencapai 3.120.718,06 MWh dengan daya terpasang sebesar 1.598,81 MVA dan listrik terjual hingga 2.943.455,47 MWh. Berikut kebutuhan energi listrik Kota Semarang berdasarkan golongan tarif tahun 2021.

Tabel 3. 12 Jumlah Pemakaian Energi Listrik PLN Kota Semarang

Golongan	Daya Terpasang (MVA)	Produksi Listrik (MWh)	Listrik Terjual (MWh)	Dipakai Sendiri (MWh)	Susut/ Hilang (MWh)
1. Sosial	156,07	18.737,93	18.737,93	2,12	0,25
2. Rumah Tangga	732,56	93.431,04	93.431,04	2,12	0,25
3. Usaha	538,93	67.943,66	67.943,66	2,12	0,25
4. Industri	501,04	63.004,37	63.004,37	2,12	0,25
5. Perkantoran	68,78	7.192,18	7.192,18	2,12	0,25
Jumlah	1.997,38	249.841,18	249.841,18	10,60	1,25

Sumber: Kota Semarang dalam Angka, 2023

Pada tahun 2021, jumlah pelanggan listrik di Kota Semarang mencapai 583.059 pelanggan. Berikut ini adalah jumlah pelanggan listrik berdasarkan rayon/ULP di Kota Semarang pada tahun 2019-2021:

Tabel 3. 13 Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Rayon/ULP di Kota Semarang Tahun 2018-2022

Rayon/ULP	2018	2019	2020	2021	2022
Semarang Tengah	126.594	129.785	133.166	135.912	138.957
Semarang Barat	101.240	104.784	108.038	111.386	114.864
Semarang Timur	208.143	218.899	228.706	237.994	247.048
Semarang Selatan	83.851	88.303	93.642	97.767	102.336
Jumlah	519.828	541.771	563.552	583.059	603.205

Sumber: Kota Semarang dalam Angka, 2023

3.3.4. Kondisi Eksisting Pengelolaan Persampahan

Pola pengumpulan sampah yang diterapkan di Kota Semarang dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu pola komunal tidak langsung, individual tidak langsung, dan individual langsung. Pada umumnya, sampah rumah tangga atau permukiman di tiap-tiap kecamatan yang berada di Kota Semarang menerapkan pola pengumpulan sampah individual tidak langsung dimana masyarakat membuang sampah rumah tangga atau permukiman ke gerobak untuk diangkut ke TPS terdekat sebelum truk mengangkut sampah yang terdapat di TPS ke TPA Jatibarang. Berbeda dengan pola pengumpulan sampah yang berasal dari fasilitas umum seperti pertokoan, perhotelan, sarana kesehatan, rumah makan, tempat hiburan, sekolah dan kantor. Pelayanan persampahan yang berasal dari fasilitas umum tidak hanya menggunakan sistem individual tidak langsung, melainkan sistem individual langsung dimana dump truck mengambil sampah secara door to door setiap harinya. Sedangkan untuk sistem komunal tidak langsung, yaitu masyarakat membawa sendiri sampahnya menuju ke lokasi TPS terdekat. Sistem jaringan persampahan yang ada di Kota Semarang mayoritas adalah diangkut dari unit terkecil (rumah tangga) sampai dengan ke TPA Jatibarang.

Berdasarkan jumlah produksi sampah dan jumlah sampah yang terangkut, rata-rata sudah di atas 80% sampah terangkut. Sehingga jaringan persampahan di Kota Semarang dapat dikatakan baik. Secara rinci jumlah produksi sampah dan jumlah sampah terangkut di Kota Semarang dapat dilihat sebagai berikut.

Analisis Demografi

Untuk Penyusunan RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045

Tabel 3. 14 Jumlah Produksi Sampah dan Jumlah Sampah Terangkut Kota Semarang

No	Kecamatan	Produksi	Terangkut	Persentase	Pelayanan
1	Mijen	177,94	154,63	87%	Baik
2	Gunungpati	238,22	206,98	87%	Baik
3	Banyumanik	405,68	358,31	88%	Baik
4	Gajahmungkur	204,72	177,90	87%	Baik
5	Semarang Selatan	269,56	234,19	87%	Baik
6	Candisari	259,25	225,22	87%	Baik
7	Tembalang	448,69	389,82	87%	Baik
8	Pedurungan	564,28	490,27	87%	Baik
9	Genuk	288,52	250,66	87%	Baik
10	Gayamsari	236,89	205,81	87%	Baik
11	Semarang Timur	258,05	224,18	87%	Baik
12	Semarang Utara	413,13	358,92	87%	Baik
13	Semarang Tengah	233,95	203,29	87%	Baik
14	Semarang Barat	519,20	451,10	87%	Baik
15	Tugu	96,67	83,99	87%	Baik
16	Ngaliyan	384,11	333,74	87%	Baik
	Total	4.998,85	4.349,00	87%	Baik

Sumber: Dokumen Rencana Kawasan Permukiman (RKP) Kota Semarang Tahun 2022

Dalam upaya mengurangi sampah yang terangkut ke TPA, di Kota Semarang terdapat bank sampah yang dikelola oleh masyarakat. Berikut ini adalah bank sampah yang ada di Kota Semarang.

Tabel 3. 15 Bank Sampah di Kota Semarang

No	Nama	m ³ /hr	Kelurahan	Kecamatan
1	BS Adi Dharma	38,20	Sendangguwo	Tembalang
2	BS Aisah	74,67	Pedurungan Kidul	Pedurungan
3	BS Aji Guna	19,76	Ngaliyan	Ngaliyan
4	BS APL Jomblang		Jomblang	Candisari
5	BS Bangkid		Jomblang	Candisari
6	BS Bangkit Sejahtera	7,67	Sumurejo	Gunungpati
7	BS Bina Mandiri	6,22	Pedurungan Kidul	Pedurungan
8	BS Cahaya Teratai		Kalipancur	Ngaliyan
9	BS Cinta Bunga		Tembalang	Tembalang
10	BS Guyup Rukun	2,10	Gunungpati	Gunungpati
11	BS Indria Jaya	48,37	Kalipancur	Ngaliyan
12	BS Kalicari Asri		Kalicari	Pedurungan
13	BS Karya Manunggal		Sendangguwo	Tembalang
14	BS Kemuning	2,00	Ngijo	Gunungpati
15	BS KSM Mawar	2,40	Mangkang Kulon	Tugu
16	BS KSM Melati Putih		Candi	Candisari
17	BS KSM Mukti Asih	2,30	Muktiharjo Kidul	Pedurungan
18	BS Lestari		Jomblang	Candisari
19	BS Lestari		Purwoyoso	Ngaliyan
20	BS M Ngaliyan		Ngaliyan	Ngaliyan

Analisis Demografi

Untuk Penyusunan RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045

No	Nama	m ³ /hr	Kelurahan	Kecamatan
21	BS Maju Mapan Krapyak		Purwoyoso	Ngaliyan
22	BS Mandiri		Trimulyo	Genuk
23	BS Matahari	2,40	Beringin	Ngaliyan
24	BS Mawar		Cepoko	Gunungpati
25	BS Mawar Merah	20,08	Tugurejo	Tugu
26	BS Mekar Jaya		Pedurungan Kidul	Pedurungan
27	BS Mekar Sari Sebumi	1,35	Karang malang	mijen
28	BS Melati		Jomblang	Candisari
29	BS Melati Jatingaleh		Jomblang	Candisari
30	BS Melati Mangkang	11,59	Mangkang Kulon	Tugu
31	BS Melati Ngaliyan		Ngaliyan	Ngaliyan
32	BS Mentari	5,92	pakintelan	Gunungpati
33	BS Mulya Sejahtera	22,68	plalangan	Gunungpati
34	BS Omah Resik	6,26	banyumanik	banyumanik
35	BS Pandan Wangi		sawah besar	gayamsari
36	BS Pandowo Berjaya		banyumanik	banyumanik
37	BS Payung Lestari	30,00	pudak payung	banyumanik
38	BS Persada		pudak payung	banyumanik
39	BS Plamongan Sari		plamongansari	Pedurungan
40	BS PMPL Waras	4,60	wonotingal	Candisari
41	BS Prigel		pleburan	semarang selatan
42	BS Raflesia	18,29	Jomblang	Candisari
43	BS Raos Emi	38,00	plamongansari	Pedurungan
44	BS Resik Apik		srondol kulon	banyumanik
45	BS Resik Becik	8,10	Krobokan	semarang barat
46	BS RT 2 RW XIII Tambakaji		Tambak aji	Ngaliyan
47	BS Rumah Kreasi Ibu		pleburan	semarang selatan
48	BS Sadar Diri	17,69	mangkang wetan	Tugu
49	BS Sami Guyub		Tambak aji	Ngaliyan
50	BS Sami Rukun		Tambak aji	Ngaliyan
51	BS Sari Asri 1	33,00	tandang	Tembalang
52	BS Sedyo Mulyo		brumbungan	semarang tengah
53	BS Sejahtera		brumbungan	semarang tengah
54	BS Sekarjati Sari		brumbungan	semarang tengah
55	BS Selingsri	8,00	Sendangguwo	Tembalang
56	BS Sempulur Asri		gedawang	banyumanik
57	BS Setuk		pudak payung	Banyumanik
58	BS SMP 5 Semarang		wonotingal	Candisari
59	BS Sri Rejeki	43,33	Tembalang	Tembalang
60	BS Srikandhi		Tembalang	Tembalang
61	BS Subur Makmur		pedurungan lor	Pedurungan
62	BS Sukses Pleburan		pleburan	semarang selatan
63	BS Sumurejo		sumurejo	Gunungpati
64	BS Walisongo		Purwoyoso	Ngaliyan
65	BS Bina Arta Mulia		srondol kulon	banyumanik
66	BS Bina Mandiri III	4,78	Pedurungan Kidul	Pedurungan

Analisis Demografi

Untuk Penyusunan RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045

No	Nama	m ³ /hr	Kelurahan	Kecamatan
No	Nama	m ³ /hr	Kelurahan	Kecamatan
67	BS Durian		petompon	Gajah mungkur
68	BS Gedawang Asri	8,78	gedawang	Banyumanik
69	BS Gemah Ripah	2,87	kedungmundu	Tembalang
70	BS Guyub Rukun		kemijen	Semarang Timur
71	BS Kemijen I	31,45	kemijen	Semarang Timur
72	BS Limbah Berkah	7,29	kembangarum	Semarang Barat
73	BS Mandiri	5,00	genuksari	Genuk
74	BS Mawar	1,50	mangkang kulon	Tugu
75	BS Rejo Asri	5,83	genuksari	Genuk
76	BS Resik Sejahtera		sambiroto	Tembalang
77	BS Seroja Asri	10,07	sukorejo	Gunungpati

Sumber: Dokumen Rencana Kawasan Permukiman (RKP) Kota Semarang Tahun 2022

Dalam upaya mengurangi sampah Kota Semarang juga dilayani oleh TPS3R. Berikut ini adalah TPS3R yang ada di Kota Semarang.

Tabel 3. 16 Sebaran TPS3R di Kota Semarang

No	Nama TPS3R	Alamat Lengkap	Luas Bangunan TPS3R (m ²)	Jumlah Layanan	Tahun Pembangunan
1	TPST Ngudi Kamulyan	Kec. Gajahmungkur	60	300 KK	2008
2	TPST Bulu Lor	Kec. Semarang Utara	60	200 KK	2008
3	TPST Padangsari	Kec. Banyumanik	60	200 KK	2010
4	TPST Pedurungan Kidul	Kec. Pedurungan	60	200 KK	2010
5	TPST Pedurungan Lor	Kec. Pedurungan	60	200 KK	2010
6	TPST ARHANUDSE	Kec. Candisari	60	100 KK	2013
7	TPST BSB	Kec. Mijen	1	1000 KK	2010
8	TPST Mangkang Wetan	Kec. Tugu	60	200 KK	2012
9	TPST Karanganyar Gunung	Kec. Candisari	60	200 KK	2014
10	TPST Ngaliyan	Kec. Ngaliyan	60	200 KK	2010
11	TPST Pleburan	Kec. Semarang Selatan	60	200 KK	2010
12	TPST Bon Bin Mangkang	Kec. Tugu	60	200 KK	2010

Analisis Demografi

Untuk Penyusunan RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045

No	Nama TPS3R	Alamat Lengkap	Luas Bangunan TPS3R (m ²)	Jumlah Layanan	Tahun Pembangunan
13	TPST Sambiroto	Kec. Tembalang	60	200 KK	2015
14	TPST Pudakpayung	Kec. Banyumanik	60	200 KK	2012
15	TPST Kaligawe	Kec. Gayamsari	60	200 KK	2012
16	TPST Kalicari	Kec. Pedurungan	60	200 KK	2015
17	TPST Tambakaji	Kec. Tugu	60	200 KK	2012
18	TPST Tembalang	Kec. Tembalang	60	200 KK	2015
19	TPST DLH	Kec. Tugu	30	Kantor	2008
20	TPST Ngesrep	Ngesrep Kecamatan Banyumanik	60	200 KK	2015
21	TPST Gua Kreo	Kel. Kandri Kec. Gunungpati	60	200 KK	2015
22	TPST Palebon	Kel. Palebon Kec. Pedurungan	40	200 KK	2015
23	TPST Muktiharjo Kidul	Kel. Muktiharjo Kidul Kec. Pedurungan	40	200 KK	2016
24	TPST Jabungan	Kel. Jabungan Kec. Banyumanik	40	200 KK	2016
25	TPST Rowosari	Kel. Rowosari Kec. Tembalang	40	200 KK	2016

Sumber: Dokumen Rencana Kawasan Permukiman (RKP) Kota Semarang Tahun 2022

Analisis Demografi

Untuk Penyusunan RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045



3.3.5. Kondisi Eksisting Fasilitas Kesehatan

Sarana kesehatan terdiri dari klinik, puskesmas, dan Rumah Sakit, baik swasta ataupun milik pemerintah. Sebaran sarana kesehatan per kelurahan di Kota Semarang diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 17 Jumlah Sarana Kesehatan Kota Semarang

No	Kelurahan	RS	RS Bersalin	Poliklinik/Balai Pengobatan	Puskesmas	Apotek
Kecamatan Mijen						
1	Cangkiran	0	0	1	0	3
2	Bubakan	0	0	0	0	1
3	Karangmalang	0	0	0	1	0
4	Polaman	0	0	0	0	0
5	Purwosari	0	0	0	0	0
6	Tambangan	1	0	0	1	0
7	Jatisari	0	0	1	0	4
8	Mijen	0	0	1	0	1
9	Jatibarang	0	0	0	0	0
10	Kedungpani	0	0	0	0	0
11	Pesantren	0	0	0	0	1
12	Ngadirgo	0	0	0	0	1
13	Wonolopo	0	0	1	0	1
14	Wonoplumbon	0	0	0	0	0
Kecamatan Gunungpati						
15	Gunungpati	0	0	2	1	2
16	Plalangan	0	0	0	1	1
17	Sumurejo	0	0	0	0	0
18	Pakintelan	0	0	0	0	0
19	Mangunsari	0	0	1	0	1
20	Patemon	0	0	1	0	1
21	Ngijo	0	0	1	0	0
22	Nongkosawit	0	0	0	0	0
23	Cepoko	0	0	0	0	0
24	Jatirejo	0	0	0	0	0
25	Kandri	0	0	0	0	0
26	Pungangan	0	0	0	0	0
27	Kalisegoro	0	0	0	0	0
28	Sekaran	0	0	0	1	3
29	Sukorejo	0	0	0	0	1
30	Sadeng	1	0	0	0	1
Kecamatan Banyumanik						
31	Pudakpayung	0	0	2	1	4
32	Gedawang	0	0	0	0	0
33	Jabungan	0	0	0	0	0

Analisis Demografi

Untuk Penyusunan RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045

No	Kelurahan	RS	RS Bersalin	Poliklinik/Balai Pengobatan	Puskesmas	Apotek
34	Padangsari	0	0	2	1	4
35	Banyumanik	0	0	1	0	4
36	Srondol Wetan	2	0	3	0	7
37	Pedalangan	0	0	3	0	3
38	Sumurboto	0	0	3	0	3
39	Srondol Kulon	0	0	3	1	3
40	Tinjomoyo	0	0	1	0	1
41	Ngesrep	0	0	1	1	3
Kecamatan Gajahmungkur						
42	Sampangan	0	0	1	1	4
43	Bendanduwur	0	0	0	0	0
44	Karangrejo	0	0	1	0	2
45	Gajahmungkur	0	0	1	0	1
46	Bendan Ngisor	0	0	2	0	2
47	Petompon	2	0	2	0	4
48	Bendungan	0	0	0	0	0
49	Lempongsari	0	0	0	0	0
Kecamatan Semarang Selatan						
50	Bulustalan	0	0	0	0	3
51	Barusari	2	0	1	0	5
52	Randusari	1	0	3	0	3
53	Mugassari	0	0	1	1	2
54	Pleburan	0	0	1	0	2
55	Wonodri	1	0	2	0	4
56	Peterongan	1	0	5	0	3
57	Lamper Kidul	0	0	5	0	5
58	Lamper Lor	0	0	2	0	0
59	Lamper Tengah	0	0	0	0	4
Kecamatan Candisari						
60	Jatingaleh	0	0	4	0	0
61	Karanganyar Gunung	0	0	0	0	2
62	Jomblang	0	0	1	1	0
63	Candi	0	0	1	0	1
64	Kaliwiru	0	0	2	0	3
65	Wonotingal	0	0	0	1	0
66	Tegalsari	1	0	2	0	2
Kecamatan Tembalang						
67	Rowosari	0	0	0	0	0
68	Meteseh	0	0	3	1	4
69	Kramas	0	0	0	0	0
70	Tembalang	1	0	1	0	2
71	Bulusan	0	0	1	0	2
72	Mangunharjo	1	0	0	0	1
73	Sendangmulyo	1	0	1	0	8

Analisis Demografi

Untuk Penyusunan RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045

No	Kelurahan	RS	RS Bersalin	Poliklinik/Balai Pengobatan	Puskesmas	Apotek
74	Sambiroto	0	0	2	1	6
75	Jangli	0	0	0	0	0
76	Tandang	0	0	1	0	1
77	Kedungmundu	0	0	2	0	3
78	Sendangguwo	0	0	0	0	2
Kecamatan Pedurungan						
79	Gemah	1	0	4	0	4
80	Pedurungan Kidul	0	0	0	0	2
81	Plamongan Sari	1	0	0	0	3
82	Penggaron Kidul	0	0	0	0	0
83	Pedurungan Lor	0	0	1	0	3
84	Tlogomulyo	0	0	0	0	1
85	Pedurungan Tengah	0	0	2	0	6
86	Palebon	0	0	2	0	4
87	Kalicari	0	0	1	0	4
88	Tlogosari Kulon	0	0	8	2	11
89	Tlogosari Wetan	0	0	1	0	1
90	Muktiharjo Kidul	0	0	2	0	3
Kecamatan Genuk						
91	Muktiharjo Lor	0	0	1	0	0
92	Gebangsari	0	0	2	0	3
93	Genuksari	0	0	2	1	1
94	Bangetayu Kulon	0	0	0	0	1
95	Bangetayu Wetan	0	0	0	1	0
96	Sembungharjo	0	0	1	0	3
97	Penggaron Lor	0	0	0	0	0
98	Kudu	0	0	0	0	0
99	Karangroto	0	0	1	0	1
100	Banjardowo	0	0	2	0	2
101	Trimulyo	0	0	2	0	1
102	Terboyo Wetan	0	0	0	0	0
103	Terboyo Kulon	1	0	0	0	1
Kecamatan Gayamsari						
104	Pandeans Lamper	0	0	5	0	4
105	Gayamsari	1	0	1	1	3
106	Siwalan	0	0	0	0	1
107	Sambirejo	0	0	2	0	3
108	Sawahbesar	0	0	1	0	2
109	Kaligawe	0	0	0	0	1
110	Tambakrejo	0	0	0	0	0
Kecamatan Semarang Timur						
111	Karangturi	0	0	0	0	1
112	Karangtempel	0	0	2	1	3
113	Rejosari	1	0	1	0	1

Analisis Demografi

Untuk Penyusunan RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045

No	Kelurahan	RS	RS Bersalin	Poliklinik/Balai Pengobatan	Puskesmas	Apotek
114	Sarirejo	0	0	0	0	1
115	Kebonagung	0	0	0	0	1
116	Bugangan	1	0	0	0	2
117	Mlatiharjo	1	0	1	0	1
118	Mlatibaru	0	0	0	0	1
119	Rejomulyo	0	0	2	1	1
120	Kemijen	0	0	1	0	1
Kecamatan Semarang Utara						
121	Bulu Lor	0	0	0	1	1
122	Plombokan	0	0	0	0	2
123	Panggungkidul	0	0	0	0	1
124	Panggung Lor	0	0	1	0	1
125	Kuningan	0	0	0	0	1
126	Purwosari	0	0	1	0	1
127	Dadapsari	0	0	0	0	3
128	Bandarharjo	0	0	1	1	0
129	Tanjung Mas	0	0	1	0	2
Kecamatan Semarang Tengah						
130	Pekunden	2	0	0	0	2
131	Karangkidul	0	0	4	0	5
132	Jagalan	0	0	1	0	1
133	Brumbungan	0	0	1	0	1
134	Miroto	0	0	0	1	2
135	Gabahan	0	0	0	0	3
136	Kranggan	0	0	1	0	2
137	Purwodinatan	0	0	1	0	1
138	Kauman	0	0	0	0	1
139	Bangunharjo	0	0	1	0	0
140	Kembangsari	0	0	0	0	2
141	Pandansari	0	0	2	0	1
142	Sekayu	0	0	1	1	2
143	Pendrikan Kidul	0	0	3	0	1
144	Pendrikan Lor	0	0	1	0	3
Kecamatan Semarang Barat						
145	Kembangarum	0	0	1	1	0
146	Manyaran	0	0	0	0	3
147	Ngemplaksimo ngan	0	0	3	1	2
148	Bongasari	0	0	0	0	2
149	Bojongsalaman	0	0	5	0	1
150	Cabeian	0	0	1	0	1
151	Salamanmloyo	0	0	0	0	2
152	Gisikdrono	0	0	1	0	3
153	Kalibanteng Kidul	0	0	3	0	4
154	Kalibanteng Kulon	1	0	2	1	3

Analisis Demografi

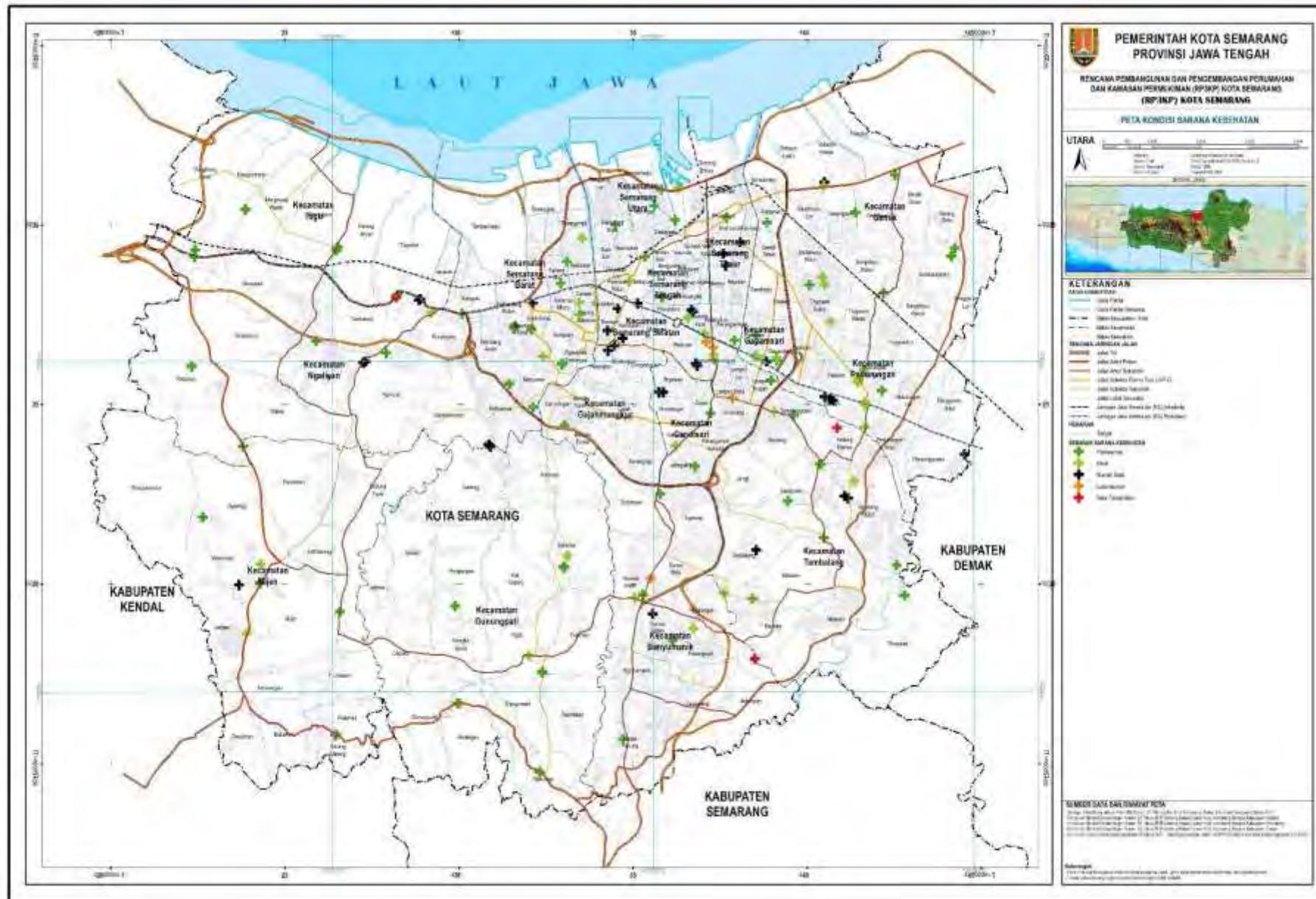
Untuk Penyusunan RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045

No	Kelurahan	RS	RS Bersalin	Poliklinik/Balai Pengobatan	Puskesmas	Apotek
155	Krapyak	0	0	1	0	2
156	Tambak Harjo	0	0	0	0	1
157	Tawangsari	0	0	1	0	1
158	Karang Ayu	0	0	2	1	3
159	Krobokan	0	0	1	1	3
160	Tawangmas	0	0	1	0	4
Kecamatan Tugu						
161	Jerakah	0	0	2	0	0
162	Tuugrejo	0	0	0	0	0
163	Karanganyar	0	0	0	1	0
164	Randu Garut	0	0	0	0	0
165	Mangkang Wetan	0	0	0	0	0
166	Mangunharjo	0	0	0	0	0
167	Mangkang Kulon	0	0	0	0	0
Kecamatan Ngaliyan						
168	Podorejo	0	0	0	0	0
169	Wates	0	0	2	0	3
170	Bringin	0	0	2	0	1
171	Ngaliyan	1	0	1	1	1
172	Bambankerep	0	0	0	0	0
173	Kalipancur	0	0	2	0	3
174	Purwoyoso	0	0	2	1	3
175	Tambakaji	1	0	1	1	1
176	Gondoriyo	0	0	0	0	0
177	Wonosari	0	0	3	0	5
Jumlah Kota Semarang		27	0	181	35	308

Sumber: Kota Semarang dalam Angka 2023

Analisis Demografi

Untuk Penyusunan RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045



3.3.6. Kondisi Eksisting Fasilitas Pendidikan

Jumlah sarana Pendidikan di Kota Semarang meliputi TK, RA, SD, MI, MTs, SMA, dan SMK sudah tergolong merata dan tersebar di seluruh wilayah Kecamatan yang ada. Berikut tabel sebaran jumlah unit sarana pendidikan per kelurahan di Kota Semarang

Tabel 3. 18 Jumlah Sarana Pendidikan Kota Semarang

Analisis Demografi

Untuk Penyusunan RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045

No	Kelurahan	SD		MI		SMP		MTS		SMA		MA		Akademi/PT
		N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	
31	Pudakpayung	3	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0
32	Gedawang	2	3	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
33	Jabungan	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Padangsari	2	2	0	0	0	2	0	0	1	1	0	0	0
35	Banyumanik	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
36	Srondol Wetan	6	2	0	0	2	3	0	0	1	1	0	0	0
37	Pedalangan	3	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2
38	Sumurboto	1	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Srondol Kulon	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
40	Tinjomoyo	3	1	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0
41	Ngesrep	3	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
Kecamatan Gajahmungkur														
42	Sampangan	2	2	0	0	1	1	0	0	0	2	0	0	1
43	Bendanduwur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Karangrejo	2	1	0	0	1	3	0	0	0	2	0	0	2
45	Gajahmungkur	4	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
46	Bendan Ngisor	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
47	Petompon	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Bendungan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Lempongsari	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kecamatan Semarang Selatan														
50	Bulustalan	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Barusari	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1
52	Randusari	0	4	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
53	Mugassari	0	3	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1
54	Pleburan	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
55	Wonodri	1	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	3
56	Peterongan	1	3	0	0	2	1	0	0	0	1	0	0	0
57	Lamper Kidul	2	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
58	Lamper Lor	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Lamper Tengah	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Kecamatan Candisari														
60	Jatingaleh	2	3	0	0	0	4	0	0	0	2	0	0	1
61	Karanganyar Gunung	2	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
62	Jomblang	5	2	0	0	1	2	0	0	0	1	0	0	1
63	Candi	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
64	Kaliwiru	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Woningtal	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
66	Tegalsari	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kecamatan Tembalang														
67	Rowosari	2	0	0	4	0	0	0	2	0	0	0	1	0
68	Meteseh	1	2	0	2	0	1	0	2	0	0	0	2	0

Analisis Demografi

Untuk Penyusunan RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045

No	Kelurahan	SD		MI		SMP		MTS		SMA		MA		Akademi/PT
		N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	
69	Kramas	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Tembalang	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
71	Bulusan	1	2	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	2
72	Mangunharjo	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
73	Sendangmulyo	4	3	0	0	1	3	1	0	0	0	0	0	0
74	Sambiroto	3	1	0	1	0	2	0	0	1	0	0	0	2
75	Jangli	0	3	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0
76	Tandang	4	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Kedungmundu	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
78	Sendangguwo	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kecamatan Pedurungan														
79	Gemah	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
80	Pedurungan Kidul	5	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1
81	Plamongan Sari	2	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
82	Penggaron Kidul	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1
83	Pedurungan Lor	2	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0
84	Tlogomulyo	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Pedurungan Tengah	2	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2
86	Palebon	3	0	0	0	1	3	0	0	0	1	0	0	2
87	Kalicari	3	6	0	1	1	2	1	0	0	2	0	0	0
88	Tlogosari Kulon	6	2	0	2	0	1	0	1	0	0	0	1	1
89	Tlogosari Wetan	2	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
90	Muktiharjo Kidul	4	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Kecamatan Genuk														
91	Muktiharjo Lor	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Gebangsari	3	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
93	Genuksari	2	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Bangetayu Kulon	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
95	Bangetayu Wetan	2	0	0	3	0	2	0	1	0	1	0	0	0
96	Sembunganharjo	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
97	Penggaron Lor	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	1	0
98	Kudu	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Karangroto	4	0	0	2	1	1	0	1	0	0	0	1	0
100	Banjardowo	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
101	Trimulyo	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Terboyo Wetan	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
103	Terboyo Kulon	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1
Kecamatan Gayamsari														
104	Pandeans Lamper	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Gayamsari	2	0	0	0	0	4	0	0	0	1	0	0	1
106	Siwalan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
107	Sambirejo	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1

Analisis Demografi

Untuk Penyusunan RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045

No	Kelurahan	SD		MI		SMP		MTS		SMA		MA		Akademi/PT
		N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	
108	Sawahbesar	2	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
109	Kaligawe	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
110	Tambakrejo	3	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
Kecamatan Semarang Timur														
111	Karangturi	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
112	Karangtempel	1	1	0	0	1	4	0	0	0	3	0	0	1
113	Rejosari	2	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
114	Sarirejo	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Kebonagung	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Bugangan	3	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
117	Mlatiharjo	2	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1
118	Mlatibaru	0	4	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1
119	Rejomulyo	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Kemijen	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kecamatan Semarang Utara														
121	Bulu Lor	1	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
122	Plombokan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Panggungkidul	1	1	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0
124	Panggung Lor	1	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
125	Kuningan	4	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
126	Purwosari	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Dadapsari	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
128	Bandarharjo	2	3	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0
129	Tanjung Mas	1	5	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Kecamatan Semarang Tengah														
130	Pekunden	1	3	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	1
131	Karangkidul	1	2	0	0	1	3	0	0	0	1	0	0	1
132	Jagalan	0	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
133	Brumbungan	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
134	Miroto	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
135	Gabahan	2	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
136	Kranggan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
137	Purwodinatan	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
138	Kauman	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
139	Bangunharjo	1	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
140	Kembangsari	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
141	Pandansari	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	Sekayu	1	2	0	0	0	2	0	0	2	1	0	0	0
143	Pendrikan Kidul	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	2
144	Pendrikan Lor	3	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
145	Kembangarum	3	1	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0
146	Manyaran	3	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1

Analisis Demografi

Untuk Penyusunan RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045

No	Kelurahan	SD		MI		SMP		MTS		SMA		MA		Akademi/PT
		N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	
147	Ngemplaksimongan	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	Bongasari	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
149	Bojongsalaman	2	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1
150	Cabean	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Salamanmloyo	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
152	Gisikdrono	3	3	0	1	1	3	0	0	0	1	0	0	1
153	Kalibanteng Kidul	3	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
154	Kalibanteng Kulon	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
155	Krapyak	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
156	Tambak Harjo	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
157	Tawangsari	0	3	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0
158	Karang Ayu	3	1	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0
159	Krobokan	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Kecamatan Tugu														
160	Tawangmas	2	2	0	1	0	2	0	1	0	2	0	0	1
161	Jerakah	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0
162	Tuugrejo	3	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
163	Karanganyar	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Randu Garut	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Mangkang Wetan	3	1	0	1	0	2	0	1	0	0	0	1	1
166	Mangunharjo	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	Mangkang Kulon	3	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0
168	Podorejo	3	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Kecamatan Ngaliyan														
169	Wates	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
170	Bringin	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
171	Ngaliyan	4	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
172	Bambankerep	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
173	Kalipancur	2	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
174	Purwoyoso	6	2	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
175	Tambakaji	5	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2
176	Gondoriyo	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	Wonosari	3	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0
	Jumlah	328	186	1	85	45	138	3	37	16	62	2	25	60

Keterangan: N (Negeri), S (Swasta)

Sumber: Kota Semarang dalam Angka 2023

BAB IV

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN RUANG DI KOTA SEMARANG

Persebaran penduduk dan pembangunan ruang merupakan dua aspek yang saling terkait satu sama lainnya. Pertumbuhan penduduk di Kota Semarang ke depannya tentu akan mempengaruhi pengelolaan ruang yang ada di Kota Semarang itu sendiri, demikian pula sebaliknya rencana pengelolaan ruang yang ke depannya akan terjadi juga akan mempengaruhi pertumbuhan dan persebaran penduduk di Kota Semarang. Berdasarkan kondisi tersebut perlu adanya tinjauan kebijakan rencana pengelolaan ruang dari dokumen-dokumen terkait untuk menjadi salah satu pedoman penentuan pola pertumbuhan penduduk, persebaran penduduk, dan kebutuhan infrastruktur lingkungan pemukiman kedepannya. Secara rinci tinjauan kebijakan pembangunan ruang yang akan mempengaruhi kondisi penduduk di Kota Semarang dijabarkan sebagai berikut.

4.1 Tinjauan Terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2039

Visi pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Jawa Tengah yaitu:

“Terwujudnya perumahan dan Kawasan permukiman yang layak, berkeadilan dan berkelanjutan bagi masyarakat Jawa Tengah”

Makna dari “Terwujudnya perumahan dan Kawasan permukiman yang layak, berkeadilan dan berkelanjutan bagi masyarakat Jawa Tengah” yaitu:

1. Perumahan dan kawasan permukiman yang layak, yaitu terciptanya lingkungan perumahan dan kawasan permukiman yang memenuhi persyaratan kebutuhan dasar bagi masyarakat secara merata di seluruh wilayah di Provinsi Jawa Tengah, serta meningkatkan kualitas perumahan dan kawasan permukiman yang layak

2. Perumahan dan kawasan yang berkeadilan, yaitu terwujudnya hasil pembangunan dibidang perumahan dan kawasan permukiman dapat dinikmati secara proporsional bagi seluruh warga negara Indonesia di Provinsi Jawa Tengah.
3. Perumahan dan kawasan yang berkelanjutan, yaitu kondisi perumahan dan kawasan permukiman yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung permukiman Provinsi Jawa Tengah guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Dengan mengacu kepada hakekat bahwa keberadaan perumahan dan kawasan permukiman yang layak akan sangat menentukan kualitas masyarakat dan lingkungannya di masa depan, serta prinsip pemenuhan kebutuhan akan perumahan dan kawasan permukiman yang layak adalah merupakan tanggung jawab masyarakat sendiri, maka penempatan masyarakat sebagai pelaku utama dengan strategi pemberdayaan merupakan upaya yang sangat strategis. Sehingga Misi yang harus dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Visi penyelenggaraan perumahan dan permukiman di Provinsi Jawa Tengah, adalah sebagai berikut:

- 1. Menyelenggarakan perumahan dan Kawasan permukiman yang layak huni dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta berkelanjutan**

Penyelenggaran perumahan dan kawasan permukiman yang layak sesuai Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman harus diikuti dengan kelengkapan prasarana lingkungan sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman. Dengan demikian, tujuan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman Provinsi Jawa Tengah yakni untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan sesuai Pasal 3 UU. No. 1 Tahun 2011.

Misi ini jika dikaitkan dengan rencana pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman Jawa Tengah yakni meliputi pada

kewenangan PKP Kumuh Provinsi dan PKP rawan bencana. Hal ini sebagai perwujudan PKP yang layak huni huni dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur di PKP kumuh dan rawan bencana.

2. Menyelenggarakan perumahan dan kawasan permukiman dengan prinsip keseimbangan yang dapat diakses oleh semua pihak

Perumahan dan kawasan permukiman Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan untuk mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan, terutama bagi MBR. Hal ini maksudkan agar, seluruh masyarakat di Jawa Tengah mampu mengakses pemenuhan perumahan dan kawasan permukiman.

Misi ini merupakan untuk mewujudkan misi pada kewenangan PKP lintas batas dan PKP Kabupaten/kota. Hal ini bertujuan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dapat diakses oleh seluruh wilayah (kabupaten/kota) di Jawa Tengah termasuk di wilayah perbatasan.

3. Menyelenggarakan perumahan dan kawasan permukiman yang berwawasan lingkungan, mendukung kegiatan perekonomian dan sosial budaya masyarakat

Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang layak termasuk bagian dari proses pembangunan berkelanjutan. Kegiatan ini juga mampu mendorong kegiatan perekonomian dan fungsi daya dukungan serta keberlangsungan sosial budaya. Hal ini terkait untuk mendukung fungsi nilai strategis kawasan, terutama fungsi strategis provinsi.

4. Menyelenggarakan perumahan dan kawasan permukiman pada lintas sektoral, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan

Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman merupakan kegiatan sektor yang terpadu dengan sektor lainnya. Hal ini senada dengan penyelenggaranya yang dilakukan antar stakeholder (pemerintah, pelaku usaha/ swasta, dan masyarakat). Selain itu

penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan asas kemitraan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yakni memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan melibatkan peran pelaku usaha dan masyarakat, dengan prinsip saling memerlukan, memercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang dilakukan, baik langsung maupun tidak langsung.

Selanjutnya pengembangan infratruktur juga mempedomani rencana aksi pada Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, khususnya yang turut berlokasi di Kota Semarang antara lain sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Rencana Aksi pada Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah di Kota Semarang

Lingkup	Lokasi (Kabupaten/Kota)	Usulan Program		Penanggungjawab
		Kebijakan Umum	Kebijakan Strategis	
PKP	Kabupaten/Kota di Jawa Tengah		Identifikasi potensi pengembangan dan pembangunan PKP perkotaan atau perdesaan yang meliputi potensi sumber daya alam, potensi sumber daya manusia, potensi ekonomi, potensi sosial dan potensi budaya;	Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Pemerintah Kab/Kota
	Kabupaten/Kota di Jawa Tengah		Kajian kebijakan peningkatan efisiensi potensi PKP perkotaan atau perdesaan dalam mendukung fungsi dan peranan perdesaan dan perkotaan, yang memanfaatkan sumber daya dan kegiatan sosial ekonomi setempat	Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Pemerintah Kab/Kota
	Kabupaten/Kota di Jawa Tengah		Rencana KASIBA/LISIBA	Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Pemerintah Kab/Kota
	Kabupaten/Kota di Jawa Tengah		Arahan penyediaan pelayanan PKP perkotaan atau	Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Pemerintah Kab/Kota

Analisis Demografi

Untuk Penyusunan RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045

Lingkup	Lokasi (Kabupaten/ Kota)	Usulan Program		Penanggungjawab
		Kebijakan Umum	Kebijakan Strategis	
			perdesaan yang belum ada	
	Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah	Pembangunan Rumah Baru (vertikal maupun horisontal) sebesar 25% (514.415 unit) dilima tahun pertama	Pembangunan Baru Terintegrasi Program Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Pemerintah Kab/Kota
	Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah	Pembangunan Rumah Baru (vertikal maupun horisontal) ebesar 30% (617.334 unit) dilima tahun kedua	Pembangunan Baru Terintegrasi Program Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Pemerintah Kab/Kota
	Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah	Pembangunan Rumah Baru (vertikal maupun horisontal) sebesar 30% (617.334 unit) dilima tahun ketiga	Pembangunan Baru Terintegrasi Program Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Pemerintah Kab/Kota
	Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah	Penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan RTRW	Penyediaan Tanah Bagi PKP	Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Pemerintah Kab/Kota
	Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah	Pembangunan PSU PK		Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Pemerintah Kab/Kota
	Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah	Penataan kembali bidang-bidang tanah termasuk hak atas tanah dan/atau penggunaan tanahnya dengan dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum		Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Pemerintah Kab/Kota
	Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah	Peningkatan kualitas permukiman	Penyelenggaraan PSU Permukiman	Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Pemerintah Kab/Kota
	Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah	Pembentukan kelompok swadaya masyarakat sebagai pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan perkotaan dan menjaga kualitas permukiman		Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Pemerintah Kab/Kota
	Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah	Pencegahan tumbuhnya perumahan dan permukiman kumuh		Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Pemerintah Kab/Kota
	Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah	Pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian perizinan, standar teknis, dan kelayakan fungsi		Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Pemerintah Kab/Kota

Sumber: Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2039

4.2 Tinjauan Terhadap Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, penataan ruang wilayah nasional bertujuan untuk mewujudkan:

1. Ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
2. Keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
3. Keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
4. Keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi dalam kerangka negara kesatuan republik indonesia;
5. Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dalam rangka pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang;
6. Pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
7. Keseimbangan dan keserasian perkembangan antarwilayah;
8. Keseimbangan dan keserasian kegiatan antarsektor;
9. Pertahanan dan keamanan negara yang dinamis serta integrasi nasional

Kota Semarang termasuk dalam Kawasan Perkotaan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-UngaranPurwodadi (Kedungsepur) tergolong dalam kategori Pusat Kegiatan Nasional yaitu II/C/3, yang merupakan pengembangan pada tahap II dengan fokus revitalisasi dan percepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan nasional yang diwujudkan dengan cara revitalisasi kota-kota yang telah berfungsi.

4.3 Tinjauan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029

Sistem pelayanan perkotaan di Provinsi Jawa Tengah didasarkan pada dua aspek, yaitu potensi dan permasalahan yang berkembang di lapangan dan arahan kebijakan yang tertuang dalam RTRWN. Rencana sistem pelayanan perkotaan di Provinsi Jawa Tengah untuk lebih lengkapnya dapat dilihat sebagai berikut:

- PKN** : 1. Kawasan perkotaan Semarang-Kendal-Demak-Ungaran-Purwodadi (Kedungsepur);
2. Semarang, meliputi Kota Semarang dan sekitarnya; dan
3. Cilacap, meliputi kawasan perkotaan Cilacap dan sekitarnya

PKW : Purwokerto, Kebumen, Wonosobo, Boyolali, Klaten, Cepu, Kudus, Kota Magelang, Kota Pekalongan, Kota Tegal, dan Kota Salatiga.

PKL : Kroya, Majenang, Wangon, Ajibarang, Banyumas, Purbalingga, Bobotsari, Sokaraja, Banjarnegara, Klampok, Gombong, Karanganyar Kebumen, Prembun, Kutoarjo, Purworejo, Mungkid, Muntilan, Mertoyudan, Borobudur, Secang, Ampel, Sukoharjo, Kartasura, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Jaten, Delanggu, Prambanan, Tawangmangu, Blora, Purwodadi, Gubug, Godong, Rembang, Pati, Juwana, Tayu, Jepara, Pecangaan, Demak, Mranggen, Ungaran, Ambarawa, Temanggung, Parakan, Kendal, Boja, Kaliwungu, Weleri, Sukorejo, Batang, Kajen, Wiradesa, Comal, Pemalang, Slawi-Adiwerna, Ketanggungan-Kersana, Bumiayu, Brebes, Kedungwuni, Karangkobar, Gemolong, Bangsri, Limpung.

Berdasarkan sistem pelayanan perkotaan di Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang merupakan PKN (Pusat Kegiatan Nasional). Dengan ditunjuknya Kota Semarang sebagai PKN, maka beberapa fungsi Kota Semarang adalah sebagai berikut:

1. Sebagai simpul utama kegiatan eksport-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional;
2. Sebagai pusat kegiatan industri dan jasa skala nasional atau yang melayani beberapa provinsi; dan/atau
3. Sebagai simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi.

4.4 Tinjauan Terhadap Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi

Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi yang selanjutnya disebut Kawasan Perkotaan Kedungsepur merupakan KSN dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi. Rencana sistem pusat permukiman dalam KSN ini terdiri atas:

1. Pusat Kegiatan di Kawasan Perkotaan Inti

Pusat kegiatan di Kawasan Perkotaan Inti ditetapkan sebagai pusat kegiatan utama dan pendorong pengembangan Kawasan Perkotaan di sekitarnya. Pusat kegiatan di Kawasan Perkotaan Inti berada di Kota Semarang, meliputi:

- 1) pusat pemerintahan provinsi;
- 2) pusat pemerintahan kota;
- 3) pusat perdagangan barang dan/ atau jasa skala internasional, nasional, dan regional;
- 4) pusat pelayanan pendidikan tinggi;
- 5) pusat pelayanan olahraga skala internasional, nasional, dan regional;
- 6) pusat pelayanan kesehatan skala internasional, nasional, dan regional;
- 7) pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional;
- 8) pusat pelayanan transportasi laut nasional;
- 9) pusat pelayanan transportasi udara internasional dan nasional;
- 10) pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;

- 11) pusat kegiatan industri;
- 12) pusat kegiatan Pariwisata dan ekonomi kreatif;
- 13) pusat pertumbuhan kelautan berupa sentra industri maritim; dan
- 14) pusat kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya.

2. Pusat Kegiatan di Kawasan Perkotaan Sekitarnya

Pusat kegiatan di Kawasan Perkotaan di sekitarnya ditetapkan sebagai penyeimbang perkembangan Kawasan Perkotaan Inti. Pusat kegiatan di Kawasan Perkotaan di sekitarnya meliputi:

Tabel 4.2 Pusat Kegiatan di Kawasan Perkotaan Sekitarnya

No	Pusat Kegiatan di Kawasan Perkotaan Sekitarnya	Fungsi
1	Kawasan Perkotaan Kendal di Kabupaten Kendal	<ul style="list-style-type: none">• pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang regional;• pusat kegiatan industri;• pusat kegiatan Pariwisata dan ekonomi kreatif;• pusat kegiatan pertanian;• pusat kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa; dan• pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara.
2	Kawasan Perkotaan Kaliwungu di Kabupaten Kendal	<ul style="list-style-type: none">• pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang regional;• pusat kegiatan industri;• pusat kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa; dan• pusat kegiatan pertanian.
3	Kawasan Perkotaan Weleri di Kabupaten Kendal	<ul style="list-style-type: none">• pusat pertahanan dan keamanan negara;• pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang regional;• pusat kegiatan perikanan;• pusat kegiatan pertanian.
4	Kawasan Perkotaan Boja di Kabupaten Kendal	<ul style="list-style-type: none">• pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang regional;• pusat kegiatan pertanian;• pusat kegiatan industri.
5	Kawasan Perkotaan Sukorejo di Kabupaten Kendal	<ul style="list-style-type: none">• pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang regional;• pusat kegiatan pertanian
6	Kawasan Perkotaan Demak di Kabupaten Demak	<ul style="list-style-type: none">• pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang regional;• pusat perdagangan barang dan/atau jasa;• pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan berupa sentra kegiatan usaha pergaraman;• pusat kegiatan pertanian;

Analisis Demografi

Untuk Penyusunan RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045

No	Pusat Kegiatan di Kawasan Perkotaan Sekitarnya	Fungsi
		<ul style="list-style-type: none">• pusat kegiatan industri;• pusat kegiatan Pariwisata dan ekonomi kreatif;• pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara.
7	Kawasan Perkotaan Mranggen di Kabupaten Demak	<ul style="list-style-type: none">• pusat kegiatan industri;• pusat kegiatan pertanian
8	Kawasan Perkotaan Sayung di Kabupaten Demak,	<ul style="list-style-type: none">• pusat kegiatan industri; pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan berupa sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau perikanan budi daya;• pusat kegiatan pertanian
9	Kawasan Perkotaan Ungaran di Kabupaten Semarang	<ul style="list-style-type: none">• pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional;• pusat kegiatan industri;• pusat kegiatan pertanian;• pusat kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa regional;• pusat kegiatan Pariwisata dan ekonomi kreatif.
10	Kawasan Perkotaan Ambarawa di Kabupaten Semarang	<ul style="list-style-type: none">• pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional; pusat perdagangan barang dan/ atau jasa skala regional;• pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;• pusat kegiatan pertanian;• pusat kegiatan perikanan;• pusat kegiatan Pariwisata dan ekonomi kreatif
11	Kawasan Perkotaan Bawen di Kabupaten Semarang	<ul style="list-style-type: none">• pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang regional;• pusat kegiatan perdagangan barang dan/ atau jasa;• pusat kegiatan industri;• pusat kegiatan pertanian;• pusat kegiatan Pariwisata dan ekonomi kreatif
12	Kawasan Perkotaan Salatiga di Kota Salatiga	<ul style="list-style-type: none">• pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional;• pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;• pusat kegiatan perdagangan barang dan/ atau jasa;• pusat kegiatan kesehatan;• pusat pelayanan pendidikan tinggi
13	Kawasan Perkotaan Purwodadi di Iz,abupaten Grobogan	<ul style="list-style-type: none">• pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang regional;• pusat kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa• pusat kegiatan industri;• pusat kegiatan pertanian;• pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara

No	Pusat Kegiatan di Kawasan Perkotaan Sekitarnya	Fungsi
14	Kawasan Perkotaan Gubug di Kabupaten Grobogan	<ul style="list-style-type: none">• pusat kegiatan industri;• pusat kegiatan pertanian

Sumber: *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi*

3. Pusat Pertumbuhan Kelautan

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi, pusat pertumbuhan kelautan terdiri atas:

- 1) Pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan meliputi: sentra kegiatan perikanan tangkap dan/ atau perikanan budidaya dan sentra kegiatan usaha pergaraman. Sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau perikanan budi daya sebagaimana dimaksud pada berada di Kecamatan Bonang pada Kabupaten Dernak. Sentra kegiatan usaha pergaraman berada di Kecamatan Wedung dan Kecamatan Karangtengah pada Kabupaten Demak.
- 2) Pusat industri kelautan, meliputi: sentra industri maritim berada di Kecamatan Semarang Utara pada Kota Semarang.

Indikasi program utama perwujudan Struktur Ruang Kawasan Perkotaan Kedungsepur terdiri atas:

- a. pengembangan, peningkatan, dan/atau pemantapan fungsi Kawasan Perkotaan Inti sebagai pusat pemerintahan daerah provinsi, pusat pemerintahan daerah kota, pusat perdagangan barang dan/atau jasa skala internasional, nasional, dan regional, pusat pelayanan pendidikan tinggi, pusat pelayanan olahraga skala internasional, nasional, dan regional, pusat pelayanan kesehatan skala internasional, nasional, dan regional, pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional, pusat pelayanan transportasi laut nasional,

pusat pelayanan transportasi udara internasional dan nasional, pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara, pusat kegiatan Pariwisata dan ekonomi kreatif, pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan, pusat kegiatan industri serta pusat kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya, serta penyusunan dan penetapan rencana detail tata ruang kabupaten/kota;

- b. pengembangan, peningkatan, dan/atau pemantapan fungsi Kawasan Perkotaan di Sekitarnya sebagai pusat perdagangan barang dan/atau jasa, pusat pelayanan pendidikan tinggi, pusat pelayanan kesehatan, pusat kegiatan industri, pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan, pusat kegiatan pertanian, pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara, pusat kegiatan Pariwisata dan ekonomi kreatif, pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang regional, pusat kegiatan perikanan serta penyusunan dan penetapan rencana detail tata ruang kabupaten/kota;
- c. pengembangan, peningkatan, dan/atau pemantapan kualitas sistem jaringan transportasi yang meliputi sistem jaringan jalan, sistem jaringan transportasi sungai dan penyeberangan, sistem jaringan perkeretaapian, sistem jaringan transportasi laut, dan sistem jaringan transportasi udara;
- d. pengembangan, peningkatan, dan/atau pemantapan sistem jaringan energi yang meliputi jaringan pipa minyak dan gas bumi, jaringan gas kota, pembangkitan tenaga listrik, dan jaringan transmisi tenaga listrik;
- e. pengembangan, peningkatan, dan/atau pemantapan sistem jaringan telekomunikasi yang meliputi jaringan tetap dan jaringan bergerak;
- f. pengembangan, peningkatan, dan/atau pemantapan sistem jaringan sumber daya air yang meliputi sungai, waduk, CAT, sistem pengendalian banjir dan kenaikan paras muka air laut/rob, sistem jaringan irigasi, dan sistem pengamanan pantai;
- g. pengembangan, peningkatan, dan/atau pemantapan sistem jaringan prasarana perkotaan yang meliputi SPAM, sistem jaringan drainase, sistem jaringan air limbah, sistem pengelolaan persampahan; dan
- h. pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan jalur evakuasi untuk kawasan rawan bencana.

Indikasi program utama perwujudan Rencana Pola Ruang Kawasan Perkotaan Kedungsepur terdiri atas:

Tabel 4.3 Indikasi Program Utama Rencana Pola Ruang Kawasan Perkotaan Kedungsepur

No	Pola Ruang Kawasan	Fungsi
1	Kawasan Lindung	Zona Lindung diprioritaskan untuk pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi lindung pada kawasan yang memberikan pelindungan terhadap kawasan bawahnya, kawasan pelindungan setempat, kawasan konservasi, Kawasan Lindung geologi, dan Kawasan Lindung lainnya.
2	Kawasan Budidaya	Zona Budi Daya diprioritaskan untuk: <ul style="list-style-type: none">• pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan permukiman teratur dengan kepadatan tinggi, kepadatan sedang, dan kepadatan rendah;• pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, kota, dan/atau kecamatan;• pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan perdagangan barang dan/atau jasa skala internasional, nasional, dan regional;• pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan pelayanan olahraga skala internasional, nasional, regional, dan lokal;• pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan pelayanan kesehatan skala internasional, nasional, regional, dan lokal;• pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional;• pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan pelayanan transportasi laut internasional, nasional, dan regional;• pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan pelayanan transportasi udara internasional, nasional, dan regional;• pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan kegiatan pertahanan dan keamanan negara;• pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan kegiatan Pariwisata dan ekonomi kreatif;• pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan kegiatan pertanian, perkebunan, dan peternakan;• pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan perikanan;• pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan industri skala nasional baik berupa Kawasan Industri maupun pusat kegiatan industri;

Analisis Demografi

Untuk Penyusunan RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045

No	Pola Ruang Kawasan	Fungsi
		<ul style="list-style-type: none">• pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan kegiatan hutan produksi tetap; dan• pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya

Sumber: *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi*

4.5 Tinjauan Terhadap Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031

Tinjauan terhadap Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 berfungsi untuk melihat lokus-lokus pembangunan berdasarkan rencana struktur ruang dan pola ruang yang ada di dalamnya. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 memiliki keterkaitan yang erat dengan proyeksi arah persebaran penduduk di Kota Semarang dalam waktu 20 tahun ke depan. Secara rinci kondisi rencana struktur ruang dan pola ruang dalam RTRW tahun 2011-2031 dijabarkan sebagai berikut.

4.5.1 Rencana Struktur Ruang

4.5.1.1. Struktur Ruang

A. Pusat Kegiatan

Pusat kegiatan meliputi pusat pelayanan kota, sub pusat pelayanan kota, dan pusat lingkungan, dengan rincian masing-masing sebagai berikut:

Tabel 4.4 Rencana Pusat Kegiatan Kota Semarang

No	Pusat Kegiatan	Lokasi	Daerah Pelayanan	Keterangan
1	Pusat Pelayanan Kota	BWK I, II, III		Pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud dilengkapi dengan prasarana

Analisis Demografi

Untuk Penyusunan RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045

No	Pusat Kegiatan	Lokasi	Daerah Pelayanan	Keterangan	
				dan sarana ekonomi, sosial, dan/atau administrasi skala pelayanan Kota dan/ atau Regional. Prasarana dan sarana ekonomi, sosial, dan/atau administrasi diarahkan memiliki ruang interaksi publik yang berupa RTH dan/atau RTNH.	
2	Sub pusat pelayanan kota	BWK IV	Kelurahan Genuksari dan Kelurahan Banjardowo	Sub pusat pelayanan kota dilengkapi dengan prasarana dan sarana ekonomi, sosial, dan/atau administrasi skala pelayanan BWK. Prasarana dan sarana ekonomi, sosial, dan/atau administrasi di sub pelayanan kota diarahkan memiliki ruang interaksi publik yang berupa RTH dan/atau RTNH.	
		BWK V	Kelurahan Palebon, Kelurahan Gemah, Kelurahan Pedurungan Kidul, Kelurahan Pedurungan Tengah, dan Kelurahan Pedurungan Lor		
		BWK VI	Kelurahan Meteseh dan Kelurahan Sendangmulyo		
		BWK VII	Kelurahan Srondol Kulon, Kelurahan Srondol Wetan, Kelurahan Banyumanik		
		BWK VIII	Kelurahan Gunungpati, Kelurahan Plalangan, Kelurahan Cepoko, dan Kelurahan Nongkosawit		
		BWK IX	Kelurahan Mijen, Kelurahan Jatibarang, Kelurahan Wonolopo		
		BWK X	Kelurahan Mangkang Kulon, Kelurahan Mangkang Wetan, dan Kelurahan Wonosari		
3	Pusat lingkungan			Pusat lingkungan dilengkapi dengan prasarana dan sarana pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi skala pelayanan lingkungan permukiman. Prasarana dan sarana ekonomi, sosial, dan/atau administrasi di pusat lingkungan diarahkan memiliki ruang interaksi publik yang berupa RTH dan/atau RTNH.	
3.1	Pusat lingkungan BWK I	Pusat lingkungan I.1	Kelurahan Sekayu	Kelurahan Pindrikan Lor, Kelurahan Pindrikan Kidul, Kelurahan Pandansari, Kelurahan Kembang Sari, Kelurahan Bangunharjo, Kelurahan Kauman, Kelurahan Kranggan, Kelurahan Purwodinatan, Kelurahan Miroto, Kelurahan Pekunden, Kelurahan Gabahan, Kelurahan Brumbungan, Kelurahan Jagalan dan Kelurahan Karang Kidul	
		Pusat lingkungan I.2	Kelurahan Kemijen	Kelurahan Rejomulyo, Kelurahan Mlatiharjo, Kelurahan Mlatibaru, Kelurahan Kebonagung dan Kelurahan Bugangan	

Analisis Demografi

Untuk Penyusunan RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045

No	Pusat Kegiatan	Lokasi		Daerah Pelayanan	Keterangan
		Pusat lingkungan I.3	Kelurahan Rejosari	Kelurahan Sarirejo, Kelurahan Karangturi dan Kelurahan Karangtempel	
		Pusat lingkungan I.4	Kelurahan Mugasari	Kelurahan Bulustalan, Kelurahan Barusari dan Kelurahan Randusari	
		Pusat lingkungan I.5	Kelurahan Peterongan	Kelurahan Pleburan, Kelurahan Wonodri, Kelurahan Lamper Lor, Kelurahan Lamper Kidul dan Kelurahan Lamper Tengah.	
3.2	Pusat lingkungan BWK II	Pusat lingkungan II.1	Kelurahan Sampangan	Kelurahan Petompon, Kelurahan Bendan Ngisor dan Kelurahan Bendan Duwur	
		Pusat lingkungan II.2	Kelurahan Gajahmungkur	Kelurahan Bendungan, Kelurahan Lempongsari dan Kelurahan Karangrejo	
		Pusat lingkungan II.3	Kelurahan Candi	Kelurahan Candi dan Kelurahan Wonotingal dengan daerah pelayanan Kelurahan Kaliwiru dan Kelurahan Tegalsari	
		Pusat lingkungan II.4	Kelurahan Jatingaleh	Kelurahan Jomblang dan Kelurahan Karanganyar Gunung	
3.3	Pusat lingkungan BWK III	Pusat lingkungan III.1	Kelurahan Tanjungmas	Kelurahan Bandarharjo	
		Pusat lingkungan III.2	Kelurahan Kuningan	Kelurahan Purwosari dan Kelurahan Dadapsari	
		Pusat lingkungan III.3	Kelurahan Panggung Lor	Kelurahan Panggung Kidul, Kelurahan Plombokan dan Kelurahan Bulu Lor	
		Pusat lingkungan III.4	Kelurahan Tawangmas	Kelurahan Tawangsari, Kelurahan Krobokan, Kelurahan Tambakharjo dan Kelurahan Karangayu	
		Pusat lingkungan III.5	Kelurahan Cebean	Kelurahan Salaman Moyo, Kelurahan Bojongsalaman, Kelurahan Ngemplak Simongan dan Kelurahan Bongsari	
		Pusat lingkungan III.6	Kelurahan Manyaran	Kelurahan Girikdrono dan Kelurahan Kalibanteng Kidul	
		Pusat lingkungan III.7	Kelurahan Kalibanteng Kulon	Kelurahan Krupyak dan Kelurahan Kembangarum	
3.4	Pusat lingkungan BWK IV	Pusat lingkungan IV.1	Kelurahan Terboyo Wetan	Kelurahan Terboyo Kulon, Kelurahan Trimulyo, Kelurahan Muktiharjo Lor, Kelurahan Gebangsari, Kelurahan Genuksari dan Kelurahan Bangetayu Kulon	
		Pusat lingkungan IV.2	Kelurahan Banjardowo	Kelurahan Karangroto, Kelurahan Kudu, Kelurahan Sambungharjo, Kelurahan Bangetayu Wetan dan Kelurahan Penggaron Lor	
3.5	Pusat lingkungan BWK V	Pusat lingkungan V.1	Kelurahan Kaligawe	Kelurahan Tambakrejo dan Kelurahan Sawah Besar	
		Pusat lingkungan V.2	Kelurahan Gayamsari	Kelurahan Sambirejo, Kelurahan Siwalan dan Kelurahan Pandean Lamper	

Analisis Demografi

Untuk Penyusunan RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045

No	Pusat Kegiatan	Lokasi		Daerah Pelayanan	Keterangan
		Pusat lingkungan V.3	Kelurahan Tlogosari Kulon	Kelurahan Muktiharjo Kidul	
		Pusat lingkungan V.4	Kelurahan Palebon	Kelurahan Kalicari dan Kelurahan Gemah	
		Pusat lingkungan V.5	Kelurahan Pedurungan Kidul	Kelurahan Tlogosari Wetan, Kelurahan Tlogomulyo, Kelurahan Pedurungan Tengah, Kelurahan Pedurungan Lor, Kelurahan	
3.6	Pusat lingkungan BWK VI	Pusat lingkungan VI.1	Kelurahan Bulusan	Kelurahan Tembalang, Kelurahan Mangunharjo, Kelurahan Kramas, Kelurahan Meteseh dan Kelurahan Rowosari	
		Pusat lingkungan VI.2	Kelurahan Sendangmulyo	Kelurahan Kedungmundu	
		Pusat lingkungan VI.3	Kelurahan Sambiroto	Kelurahan Sendangguwo, Kelurahan Tandang dan Kelurahan Jangli	
3.7	Pusat lingkungan BWK VII	Pusat lingkungan VII.1	Kelurahan Ngesrep	Kelurahan Tinjomoyo, Kelurahan Srondol Kulon dan Kelurahan Sumurboto	
		Pusat lingkungan VII.2	Kelurahan Pedalangan	Kelurahan Srondol Wetan dan Kelurahan Padangsari	
		Pusat lingkungan VII.3	Kelurahan Gedawang	Kelurahan Banyumanik, Kelurahan Jabungan dan Kelurahan Pudakpayung	
3.8	Pusat lingkungan BWK VIII	Pusat lingkungan VIII.1	Kelurahan Nongkosawit	Kelurahan Gunungpati, Kelurahan Plalangan, Kelurahan Cepoko, Kelurahan Jatirejo, Kelurahan Kandri, Kelurahan Pongangan dan Kelurahan Sadeng	
		Pusat lingkungan VIII.2	Kelurahan Sekaran	Kelurahan Sumurejo, Kelurahan Pakintelan, Kelurahan Mangunsari, Kelurahan Ngijo, Kelurahan Patemon, Kelurahan Kalisegoro dan Kelurahan Sukorejo	
3.9	Pusat lingkungan BWK IX	Pusat lingkungan IX.1	Kelurahan Kedungpane	Kelurahan Jatibarang dan Kelurahan Pesantren	
		Pusat lingkungan IX.2	Kelurahan Mijen	Kelurahan Wonolopo Kelurahan Ngadirgo dan Kelurahan Wonoplumbon	
		Pusat lingkungan IX.3	Kelurahan Cangkirian	Kelurahan Bubakan, Kelurahan Tambangan dan Kelurahan Jatisari	
		Pusat lingkungan IX.4	Kelurahan Purwosari	Kelurahan Polaman dan Kelurahan Karangmalang	
3.10	Pusat lingkungan BWK X	Pusat lingkungan X.1	Kelurahan Ngaliyan	Kelurahan Bambankerep, Kelurahan Kalipancur dan Kelurahan Purwoyoso	
		Pusat lingkungan X.2	Kelurahan Tambakaji	Kelurahan Wonosari, Kelurahan Gondoriyo, Kelurahan Beringin, Kelurahan Wates dan Kelurahan Podorejo	
		Pusat lingkungan X.3	Kelurahan Mangunharjo	Kelurahan Mangkang Kulon, Kelurahan Mangkang Wetan, Kelurahan Randugarut, Kelurahan Karanganyar,	

No	Pusat Kegiatan	Lokasi		Daerah Pelayanan	Keterangan
				Kelurahan Tugurejo dan Kelurahan Jerakah	

Sumber: Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031

B. Rencana Sistem Jaringan Prasarana

Rencana sistem jaringan prasarana meliputi: jaringan transportasi, energi, sumber daya air, sistem jaringan persampahan, sistem penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah, sistem drainase, sistem jaringan pejalan kaki, jalur dan ruang evakuasi bencana, dan sistem jaringan lainnya.

1. Rencana Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud meliputi pengembangan transportasi wisata sungai Kaligarang, Banir Kanal Barat, Banir Kanal Timur, Kali Semarang dan pengembangan transportasi wisata waduk Jatibarang.

2. Rencana Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan

Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud meliputi:

1. Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya meliputi:
 - a. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tambak Lorok di Kecamatan Semarang Utara;
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jatibarang;
 - c. Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Tempat Pengolahan Akhir (TPA) Sampah Jatibarang di Kecamatan Mijen.
2. Gardu indukGardu induk sebagaimana dimaksud berada di: Kecamatan Ngaliyan, Semarang Barat, Semarang Utara, Kecamatan Gayamsari, dan Banyumanik.
3. Infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya Infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya meliputi:
 - a. Jaringan transmisi tenaga listrik meliputi:

- 1) Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) melewati:
 - a) Kecamatan Gunung Pati; dan
 - b) Kecamatan Mijen
- 2) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud melewati:
 - a) Kecamatan Ngaliyan;
 - b) Kecamatan Mijen;
 - c) Kecamatan Gunungpati;
 - d) Kecamatan Gajahmungkur;
 - e) Kecamatan Semarang Selatan;
 - f) Kecamatan Semarang Tengah;
 - g) Kecamatan Semarang Utara;
 - h) Kecamatan Semarang Timur;
 - i) Kecamatan Genuk;
 - j) Kecamatan Gayamsari;
 - k) Kecamatan Pedurungan;
 - l) Kecamatan Tembalang; dan
 - m) Kecamatan Banyumanik.
- b. Jaringan distribusi tenaga listrik meliputi:
 - 1) Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) dan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) yang terdapat di seluruh wilayah Daerah; dan
 - 2) Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM) berada Kecamatan Semarang Tengah, Kecamatan Semarang Selatan, dan Semarang Timur.

Analisis Demografi

Untuk Penyusunan RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045



3. Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud meliputi:

1. Sistem jaringan irigasi

Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud berupa perlindungan dan peningkatan jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier meliputi D.I Lintas Kabupaten/Kota yang meliputi: D.I Penggaron, D.I Sidopangus, D.I Dolok.

2. Sistem pengendalian banjir

Sistem pengendalian banjir berupa pembangunan fasilitas penangkap dan penampung air meliputi:

- a. Embung pada sub sistem drainase Sungai Mangkang meliputi: Embung Wonosari di Kelurahan Wonosari, Embung Tambakaji di Kelurahan Tambakaji, Embung Bringin di Kelurahan Bringin dan Kelurahan Gondoriyo, Embung Kedungpane di Kelurahan Kedungpane dan Embung Wates di Kelurahan Wates.
- b. Embung pada sub sistem drainase Sungai Plumbon berupa Embung Ngadirgo di Kelurahan Ngadirgo embung pada sub sistem drainase Sungai Silandak meliputi Embung Purwoyoso di Kelurahan Purwoyoso dan Embung Bambankerep di Kelurahan Bambankerep.
- c. Embung pada sub sistem drainase Sungai Madukoro berupa Embung Madukoro di Kelurahan Tawangmas;
- d. Rencana embung pada sub sistem drainase Sungai Semarang Indah meliputi Embung Semarang Indah di Kelurahan Krobokan;
- e. Embung pada sub sistem drainase Sungai Banjir Kanal Timur meliputi Embung Sambiroto I di Kelurahan Sambiroto, Embung Sambiroto II di Kelurahan Sambiroto, Embung Jangli di Kelurahan Jangli dan Embung Mangunharjo di Kelurahan Mangunharjo;

- f. Embung pada Sub Sistem Drainase Sungai Babon meliputi Embung Bulusan di Kelurahan Bulusan, Embung Undip di Kelurahan Tembalang, Embung Gedawang di Kelurahan Gedawang dan Embung Rowosari di Kelurahan Rowosari.
3. Jaringan air baku untuk air bersih

Jaringan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud berupa pengembangan jaringan perpipaan yang menghubungkan sumber air dan prasarana sumber air menuju ke kawasan yang membutuhkan air bersih di seluruh wilayah Daerah.



4. Rencana Sistem Jaringan Persampahan

Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud meliputi:

1. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah sebagaimana dimaksud meliputi: TPA Jatibarang di Kecamatan Mijen dan TPA Regional

2. Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS)

Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud meliputi pengembangan dan penyediaan TPS di kawasan permukiman dan kawasan pusat pelayanan.

Analisis Demografi

Untuk Penyusunan RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045



5. Rencana Sistem Penyediaan Air Minum

Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud meliputi:

1. Jaringan perpipaan

Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud meliputi:

a. Unit air baku

Unit air baku permukaan berada di Kecamatan Tembalang, Kecamatan Gajahmungkur, Kecamatan Gunungpati, Kecamatan Mijen, dan Kecamatan lainnya. Unit air baku dari dalam tanah berada di Kecamatan Mijen, kecamatan Pedurungan, dan Kecamatan lainnya.

b. Unit produksi

Unit produksi Unit air baku sebagaimana dimaksud berada di Kecamatan Tembalang, Kecamatan Gajahmungkur, Kecamatan Gunungpati, Kecamatan Mijen, Kecamatan Mijen, kecamatan Pedurungan, dan Kecamatan lainnya.

c. Unit distribusi

Unit distribusi sebagaimana dimaksud dilakukan melalui:

1) jaringan primer, meliputi:

- a) peningkatan sistem jaringan primer yang melalui Jalan Banjardowo-Pertigaan Jalan Brigjend. Sudiarto-Sendangmulyo;
- b) peningkatan sistem jaringan primer yang melalui Jalan di Kelurahan Karangroto;
- c) peningkatan sistem jaringan primer yang melalui Jalan Tentara Pelajar – Jalan Raya Kedungmundu;
- d) peningkatan sistem jaringan primer yang melalui Jalan S. Parman – Jalan Sultan Agung – Jalan Teuku Umar – Jalan Setiabudi – Jalan Perintis Kemerdekaan;
- e) peningkatan sistem jaringan primer yang melalui Jalan Diponegoro;
- f) peningkatan sistem jaringan primer yang melalui Jalan Raya Ungaran-Gunungpati; dan

- g) peningkatan sistem jaringan primer yang melalui Jalan Kedungpane -Boja.
- 2) sistem jaringan sekunder, meliputi:
 - a) peningkatan sistem jaringan sekunder yang melalui Jalan Raya Semarang Kendal – Jalan Siliwangi – Jalan Jend. Sudirman – Jalan Mgr. Sugiyopranoto – Jalan Pandanaran – Simpang Lima – Jalan A. Yani – Jalan Brigjend. Katamso – Jalan Majapahit – Jalan Brigjend. Sudiarto;
 - b) peningkatan sistem jaringan sekunder yang melalui Jalan Raya Banjardowo – Jalan Citarum – Pedurungan;
 - c) peningkatan sistem jaringan sekunder yang melalui Jalan Raya Tlogosari – Supriyadi;
 - d) peningkatan sistem jaringan sekunder yang melalui Jalan di kawasan lingkungan industri kecil (LIK) Terboyo;
 - e) peningkatan sistem jaringan sekunder yang melalui Jalan Raya Kaligawe – Jalan R. Patah – Jalan Widoharjo – Jalan Dr. Cipto – Jalan Kompol Maksum – Jalan Mataram – Jalan Dr. Wahidin;
 - f) peningkatan sistem jaringan sekunder yang melalui Jalan Sriwijaya – Jalan Veteran – Jalan Kaligarang – Jalan Kelud Raya;
 - g) peningkatan sistem jaringan sekunder yang melalui Jalan Ronggowarsito – Jalan Cendrawasih – Jalan MT. Haryono;
 - h) peningkatan sistem jaringan sekunder yang melalui Jalan Sompok Lama – Jalan Sompok Baru – Jalan Tentara Pelajar – Jalan Raya Kedungmundu;
 - i) peningkatan sistem jaringan sekunder yang melalui Jalan Imam Bonjol – Jalan Hasanudin;

- j) peningkatan sistem jaringan sekunder yang melalui Jalan Mpu Tantular – Jalan Pemuda;
- k) peningkatan sistem jaringan sekunder yang melalui Jalan Pahlawan – Jalan Gajahmada – Jalan Dr. Panjaitan – Jalan Kartini – Jalan ke Kelurahan Sambirejo;
- l) peningkatan sistem jaringan sekunder yang melalui Jalan Prof. Sudarto – Sendangmulyo;
- m) peningkatan sistem jaringan sekunder yang melalui Jalan Durian Selatan;
- n) peningkatan sistem jaringan sekunder yang melalui Jalan Karangrejo Raya;
- o) peningkatan sistem jaringan sekunder yang melalui Jalan di Kelurahan Pudakpayung – Banyumanik;
- p) peningkatan sistem jaringan sekunder yang melalui Jalan Dr. Soetomo – Jalan S. Parman – Jalan Sultan Agung – Jalan Teuku Umar – Jalan Setiabudi – Jalan Perintis Kemerdekaan;
- q) peningkatan sistem jaringan sekunder yang melalui Jalan Tegalsari Raya – Jalan Kawi;
- r) peningkatan sistem jaringan sekunder yang melalui Jalan Sisingamangaraja – Jalan Papandayan – Jalan Menoreh Raya – Jalan Dewi Sartika – Jalan Raya Sekaran Gunungpati;
- s) peningkatan sistem jaringan sekunder yang melalui Jalan Bojongsalaman-Jalan Simongan;
- t) peningkatan sistem jaringan sekunder yang melalui Jalan Pamularsih;
- u) peningkatan sistem jaringan sekunder yang melalui Jalan Abdulrachman Saleh (dari Pertigaan Jalan Suratmo) – Jalan Raya Manyaran Gunungpati;

- v) peningkatan sistem jaringan sekunder yang melalui Jalan Hanoman Raya;
- w) peningkatan sistem jaringan sekunder yang melalui Jalan Gatot Subroto – Jalan Manyaran – Mijen;
- x) peningkatan sistem jaringan sekunder yang melalui Jalan Raya Semarang - Boja – Jalan di Kelurahan Cangkirian;
- y) peningkatan sistem jaringan sekunder yang melalui Jalan Kedungpane – Jalan Koptu Suyono; dan aa) peningkatan sistem jaringan sekunder yang melalui Jalan Kokrosono – Jalan Madukoro – Jalan Indraprasta

d. Unit pelayanan

Unit pelayanan sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- 1) Semarang Bagian Barat;
- 2) Semarang Bagian Utara;
- 3) Semarang Bagian Timur;
- 4) Semarang Bagian Selatan; dan
- 5) Semarang Bagian Tengah.

2. Bukan Jaringan perpipaan

Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud meliputi:

a. Sumur dangkal

Sumur dangkal berada di Kecamatan Gunungpati, Kecamatan Ngaliyan, Kecamatan Gajahmungkur, Kecamatan Candisari, Kecamatan Tembalang, dan Kecamatan Banyumanik.

b. Sumur pompa

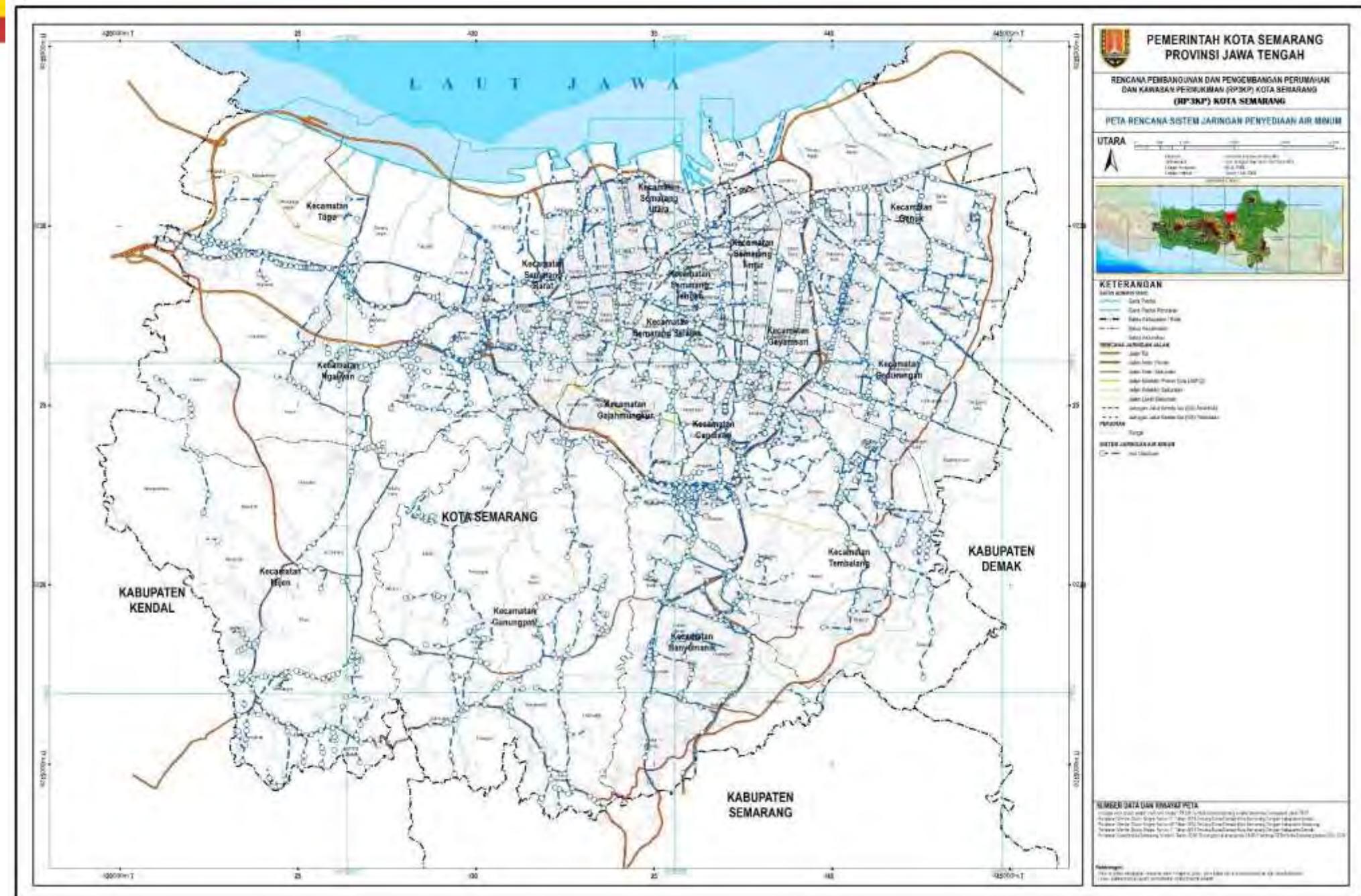
Sumur pompa berada di Kecamatan Gajahmungkur, Kecamatan Candisari, Kecamatan Tembalang, Kecamatan Banyumanik, Kecamatan, Mijen, Kecamatan Gunungpati, Kecamatan Ngaliyan.

c. Fasilitas penampungan air hujan

Fasilitas penampungan air hujan sebagaimana dimaksud berada di seluruh wilayah daerah

Analisis Demografi

Untuk Penyusunan RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045



4.5.2 Rencana Pola Ruang

Rencana Pola Ruang yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 terdiri dari Kawasan Peruntukan Lindung, dan Kawasan Peruntukan Budidaya: Kawasan Budidaya Permukiman. Tinjauan rencana pola ruang yang termuat dalam RTRW difokuskan pada rencana Kawasan Peruntukan Budidaya: Kawasan Budidaya Permukiman untuk menjadi pedoman penentuan persebaran penduduk dan kebutuhan rumah tinggal ke depannya. Kawasan permukiman meliputi kawasan perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, pendidikan, olahraga, transportasi, kesehatan, dan peribadatan.

A. Kawasan Perumahan

Kawasan perumahan dengan luas kurang lebih 15.447 (Lima belas ribu empat ratus empat puluh tujuh) hektar meliputi:

1. Kawasan perumahan di daratan, dengan luas kurang lebih 15.360 (lima belas ribu tiga ratus enam puluh) hektar yang tersebar di seluruh kecamatan; dan
2. Kawasan perumahan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan masih ditetapkan sebagai kawasan perairan selanjutnya disebut kawasan reklamasi perairan/kawasan perumahan dengan luas kurang lebih 87 (Delapan puluh tujuh) hektar berada di pantai utara Kecamatan Tugu.

Pengaturan kawasan perumahan meliputi:

1. Perumahan dengan kepadatan tinggi meliputi perumahan pusat kota yaitu di BWK I, BWK II, BWK III, BWK V. Rencana pengembangan kawasan perumahan kepadatan tinggi meliputi:
 - a. peningkatan kualitas prasarana lingkungan perumahan dan penyediaan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau; dan
 - b. peningkatan kualitas hunian di kawasan perumahan melalui pembangunan perumahan secara vertikal.
2. Perumahan dengan kepadatan sedang meliputi perumahan di BWK IV, BWK VI, BWK VII, dan BWK X khusus Kecamatan Tugu. Rencana pengembangan kawasan perumahan kepadatan sedang meliputi:

- a. peningkatan kualitas prasarana lingkungan perumahan dan penyediaan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau; dan
 - b. penyediaan prasarana dan sarana umum dengan proporsi 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan.
3. Perumahan dengan kepadatan rendah meliputi perumahan di BWK VIII, BWK IX, dan BWK X khusus Kecamatan Ngaliyan. Rencana pengembangan kawasan perumahan kepadatan rendah meliputi:
 - a. peningkatan kualitas prasarana lingkungan perumahan dan
 - b. penyediaan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau; dan
 - c. penyediaan prasarana dan sarana umum dengan proporsi 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan.

B. Kawasan Perdagangan dan Jasa

Kawasan perdagangan dan jasa dengan luas kurang lebih 4.473 (Empat ribu empat ratus tujuh puluh tiga) hektar meliputi:

1. Kawasan perdagangan dan jasa di daratan, dengan luas kurang lebih 4.428 (empat ribu empat ratus dua puluh delapan) hektar yang tersebar diseluruh kecamatan; dan
2. Kawasan perdagangan dan jasa yang berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan masih ditetapkan sebagai kawasan perairan selanjutnya disebut kawasan reklamasi perairan/kawasan perdagangan dan jasa dengan luas kurang lebih 45 (empat puluh lima) hektar berada di pantai utara Kecamatan Tugu.

Jenis kegiatan perdagangan dan jasa yang dikembangkan meliputi:

1. Perdagangan dan jasa skala pelayanan regional/ nasional/ internasional

Pengembangan perdagangan dan jasa skala regional/ nasional/ internasional meliputi: BWK I, BWK II, BWK III, BWK V, BWK VII, BWK X, dan BWK lainnya yang berada dalam jangkauan jalan kolektor dan arteri primer.

2. Perdagangan dan jasa skala pelayanan kota
Pengembangan perdagangan dan jasa skala Kota meliputi: BWK I, BWK II, BWK III, BWK V, BWK VI, BWK VII, BWK IX, dan BWK X.
3. Perdagangan dan jasa skala pelayanan BWK
Pengembangan perdagangan dan jasa skala pelayanan BWK berada di seluruh BWK.
4. Perdagangan dan jasa skala pelayanan lingkungan
Pengembangan perdagangan dan jasa skala lingkungan berada di seluruh BWK.
5. Perdagangan dan jasa lainnya, meliputi:
 - a. pengembangan jasa pameran (exhibition center) dan jasa pertemuan (convention center) di Kecamatan Pedurungan, Kecamatan Semarang Selatan, Kecamatan Gajahmungkur dan Kecamatan Semarang Utara; dan
 - b. meningkatkan dan mengarahkan pengembangan jasa penginapan di pusat kota dan pusat BWK.

C. Kawasan Perkantoran

Kawasan perkantoran dengan luas kurang lebih 483 (Empat ratus delapan puluh tiga) hektar meliputi:

1. Kawasan perkantoran di daratan, dengan luas kurang lebih 482 (empat ratus delapan puluh dua) hektar yang tersebar diseluruh kecamatan; dan
2. Kawasan perkantoran yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan masih ditetapkan sebagai Kawasan perairan selanjutnya disebut kawasan reklamasi perairan/kawasan perkantoran dengan luas kurang lebih 1 (satu) hektar berada di pantai utara Kecamatan Tugu.

Jenis kegiatan perkantoran meliputi:

1. Perkantoran pemerintah

Pengembangan perkantoran pemerintah meliputi:

- a. peningkatan kawasan perkantoran Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah di Jalan Pahlawan, Jalan Madukoro, dan lokasi lainnya;
- b. peningkatan kawasan Kantor Walikota dan DPRD di Jalan Pemuda;

- c. pengembangan kawasan kantor pelayanan publik Pemerintah Daerah di Kecamatan Mijen;
 - d. peningkatan kawasan perkantoran pemerintah skala kelurahan dan kecamatan di seluruh Daerah; dan
 - e. peningkatan kawasan balai kota atau Kantor Walikota dan DPRD serta Kantor Gubernur Jawa Tengah dan DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan penyediaan terbuka publik yang dapat digunakan untuk interaksi sosial.
2. Perkantoran swasta
- Pengembangan perkantoran swasta meliputi:
- a. mengarahkan dan mengembangkan kegiatan perkantoran swasta besar berlokasi di kawasan perdagangan dan jasa; dan
 - b. pemenuhan sarana dan prasarana kegiatan perkantoran.

D. Kawasan Pendidikan

Kawasan pendidikan dengan luas kurang lebih 779 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan) hektar yang tersebar diseluruh kecamatan. Rencana pengembangan kawasan pendidikan meliputi:

- 1. Peningkatan kualitas kawasan pendidikan tinggi di BWK I, BWK II, BWK IV, BWK V, BWK VI, BWK VII, BWK VIII, dan BWK X melalui pengaturan kawasan dan penataan lingkungan; dan
- 2. Pengembangan fasilitas pendidikan dasar sampai menengah diarahkan disetiap BWK sebagai bagian dari fasilitas lingkungan.

E. Kawasan Olahraga

Kawasan olahraga dengan luas kurang lebih 381 (tiga ratus delapan puluh satu) hektar yang tersebar di seluruh kecamatan. Rencana peningkatan kawasan olahraga meliputi:

- 1. peningkatan Gelanggang olahraga Jatidiri di Kecamatan Gajahmungkur;
- 2. peningkatan Stadion Citarum di Kecamatan Semarang Timur;
- 3. peningkatan Stadion Tri Lomba Juang di Kecamatan Semarang Tengah;
- 4. peningkatan Stadion Diponegoro di Kecamatan Semarang Tengah;

5. peningkatan Gelanggang olahraga Manunggal Jati di Kecamatan Pedurungan;
6. pengembangan Pusat olahraga di Kecamatan Pedurungan; dan
7. pengembangan Pusat olahraga di Kecamatan Mijen.

Kawasan olahraga beskala BWK dan lingkungan direncanakan terpadu dengan rencana ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau serta dikembangkan di setiap BWK.

F. Kawasan Transportasi

Kawasan transportasi dengan luas kurang lebih 1.222 (Seribu dua ratus dua puluh dua) hektar meliputi:

1. Kawasan transportasi di daratan, dengan luas kurang lebih 941 Sembilan ratus empat puluh satu) hektar. Kawasan transportasi di daratan terdapat di: Kecamatan Mijen, Gunungpati, Genuk, Tugu, Semarang Utara, Semarang Timur, Semarang Barat, dan Pedurungan.
2. Kawasan transportasi yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan masih ditetapkan sebagai kawasan perairan selanjutnya disebut kawasan reklamasi perairan/kawasan transportasi dengan luas kurang lebih 281 (dua ratus delapan puluh satu) hektar berada di pantai utara Kecamatan Semarang Utara.

Pengembangan kegiatan transportasi meliputi: terminal angkutan umum, stasiun kereta api antar kota dan kereta api perkotaan, Bandar Udara Internasional Ahmad Yani, Pelabuhan Tanjung Emas, dan pengembangan dermaga angkutan sungai dan penyeberangan. Pengelolaan dan pembangunan kegiatan di kawasan transportasi memperhatikan keterpaduan dengan lingkungan sekitarnya.

G. Kawasan Kesehatan

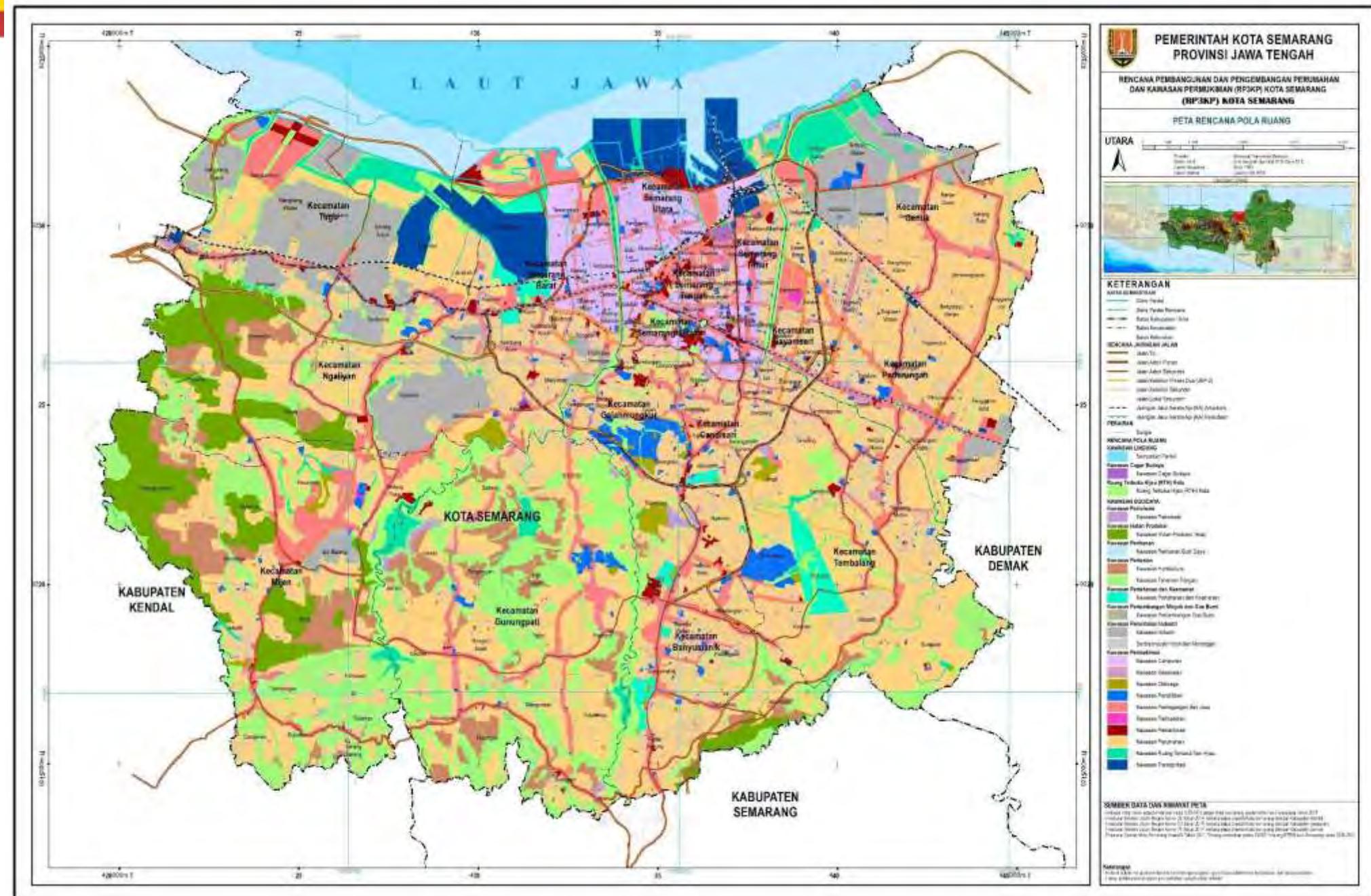
Kawasan kesehatan dengan luas kurang lebih 90 (sembilan puluh) hektar berada di seluruh wilayah Daerah.

H. Kawasan Peribadatan

Kawasan peribadatan dengan luas kurang lebih 101 (seratus satu) hektar berada di seluruh wilayah Daerah.

Analisis Demografi

Untuk Penyusunan RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045



4.5.3 Program Terkait Pengembangan Perumahan dan Kawasan

Permukiman Dalam RTRW Kota Semarang

Adapun rangkaian program terkait perumahan dan kawasan permukiman antara lain:

Tabel 4. 5 Program Terkait Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Dalam RTRW Kota

No	Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana
1	Peremajaan perumahan di kawasan - kawasan kumuh, melalui konsolidasi lahan dan pengembangan perumahan secara vertikal di seluruh Kota Semarang	Seluruh Wilayah Kota	<ul style="list-style-type: none">• KemenPU,• Dinas PU
2	Pengaturan kebijakan penyediaan sarana dan prasarana permukiman	Seluruh Wilayah Kota	<ul style="list-style-type: none">• KemenPU,• Dinas PU
3	Pembangunan Rusun Pekerja		KemenPU
4	Peningkatan dan Pembangunan Jalan Kota	Seluruh Wilayah Kota	Dinas PU
5	Peningkatan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya	Seluruh Wilayah Kota	<ul style="list-style-type: none">• Kemen ESDM• PT. PLN
6	Peningkatan dan pengembangan jaringan telekomunikasi	Seluruh Wilayah Kota	<ul style="list-style-type: none">• Dinas Kominfo• Swasta
7	Peningkatan sediaan dan prasarana sumber air	Seluruh Wilayah Kota	Dinas PU
8	Peningkatan infrastruktur perkotaan: sistem persampahan, penyediaan air minum, air limbah, drainase, angkutan umum	Seluruh Wilayah Kota	<ul style="list-style-type: none">• Dinas Kebersihan & Pertamanan• Dinas Lingkungan Hidup• Dinas PU• PDAM Tirta Moedal• Kemen LHK• Swasta• Kementerian Perhubungan• Dinas Perhubungan

Sumber: Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031

BAB V

HASIL PROYEKSI DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

5.1 Hasil Proyeksi Penduduk

Perhitungan proyeksi jumlah penduduk Kota Semarang tahun 2025-2045 menggunakan 2 metode pendekatan. Proyeksi jumlah total penduduk di hitung berdasarkan metode pendekatan yang digunakan BPS dengan menggunakan asumsi *Total Fertility Rate* (TFR) dan *Infant Mortality Rate* (IMR). Selain itu perhitungan jumlah penduduk juga menggunakan pendekatan statistic matematik dengan menggunakan metode arimatika, eksponensial, dan geometrik. Dari ketiga metode yang digunakan untuk memproyeksikan jumlah penduduk digunakan metode dengan nilai atau tingkat eror paling kecil yakni metode geometrik. Tahap selanjutnya dengan mempertimbangkan kebijakan pengelolaan ruang yang ada di Kota Semarang, maka dilakukan smoothing data untuk mendapatkan hasil persebaran penduduk yang rasional di setiap kecamatannya. Hasil proyeksi jumlah penduduk di Kota Semarang secara rinci dijabarkan sebagai berikut.

5.1.1 Jumlah Penduduk Kota Semarang

Parameter proyeksi penduduk di Kota Semarang menggunakan BPS Kota Semarang dengan data dasar tahun 2020 yang bersumber dari log form hasil sensus penduduk 2020. *Total Fertility Rate* (TFR) merupakan jumlah rata-rata anak yang dilahirkan setiap wanita. Diproyeksikan kondisi *Total Fertility Rate* (TFR) mengalami mengalami penurun dari tahun 2025-2045, penurunan TFR yang ada dimasyakarat dimungkinkan terjadi salah satunya karena adanya pola faktor usia pernikahan di masyarakat semakin tinggi mulai berkisar antara 25-30 tahun, sehingga menyebabkan kecenderungan angka kelahiran juga semakin kecil. Selain itu menurut *New household economics* adanya kecenderungan meningkatnya pendapatan dan Pendidikan penduduk perempuan menyebabkan semain banyaknya waktu yang digunakan untuk mengurus anak (khususnya waktu ibu), sehingga beripmact pada berkurangnya

minat melahirkan anak diusia muda atau dengan rentan waktu pendek (Ritonga,2003:7). Dengan mempertimbangkan tren pola kehidupan masyarakat di Kota Semarang maka TFR di Kota Semarang dari tahun 2025 hingga 2045 terus mengalami penurunan dari nilai 1,76 tahun 2025 menjadi 1,72 di tahun 2045.

Paramter yang kedua yang digunakan untuk memproyeksi jumlah penduduk adalah *Infant Mortality Rate* (IMR). Angka kematian bayi/*Infant Mortality Rate* adalah kematian yang terjadi sebelum bayi berumur satu tahun per 1.000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. Angka ini digunakan sebagai indikator kemajuan tingkat pelayanan kesehatan ibu dan anak. Kondisi *Infant Mortality Rate* (IMR) di Kota Semarang diproyeksi terus mengalami penurunan dengan mempertimbangkan semakin baiknya pelayanan terhadap kesehatan ibu dan anak sehingga tingkat kematian bayi dapat terus ditekan dan diminimalisir. Selain itu semakin meningkatnya tingkat Pendidikan ibu juga memiliki peran yang penting dalam penurunan *Infant Mortality Rate* (IMR) di Kota Semarang semala 20 tahun yang akan datang. Kondisi *Infant Mortality Rate* (IMR) di tahun 2025 diproyeksikan berada diangka 9,32 kemudian berangsur menurun hingga tahun 2045 *Infant Mortality Rate* (IMR) di Kota Semarang sebar 6,06. Secara rinci parameter hasil proyeksi penduduk di Kota Semarang tahun 2025 hingga 2045 dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel 5. 1. Parameter Hasil Proyeksi Penduduk Kota Semarang Tahun 2025-2045

Parameter	2020	2025	2030	2035	2040	2045
FERTILITAS						
<i>Total Fertility Rate (TFR)</i>	1,79	1,76	1,75	1,74	1,73	1,72
MORTALITAS						
<i>Infant Mortality Rate (IMR)</i>	10,59	9,32	8,18	6,86	6,40	6,06

Keterangan: Data tahun 2020 berdasarkan hasil Long Form Sensus Penduduk 2020

Data tahun 2025-2035 berdasarkan hasil proyeksi penduduk

Berdasarkan parameter pertumbuhan penduduk, selanjutnya diproyeksikan jumlah penduduk di Kota Semarang pada tahun 2025-2045. Hasil proyeksi menunjukan bahwa dari tahun 2025 hingga 2045 akan terus jadi peningkatan jumlah penduduk di Kota Semarang. Diproyeksikan di tahun 2025

Jumlah penduduk Kota Semarang sebesar 1.722.421 jiwa meningkat 3,49% menjadi 1.782.575 jiwa di tahun 2030, kemudian meningkat kembali 2,60% menjadi 1.828.904 jiwa di tahun 2035, meningkat kembali 1,69% menjadi 1.859.868 jiwa di tahun 2040, dan meningkat 0,80% di tahun 2045 menjadi 1.874.716 jiwa. Secara rinci perumbuhan jumlah penduduk di Kota Semarang digambarkan dalam gambar berikut .



Gambar 5. 1. Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Semarang Tahun 2025-2045

5.1.2 Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Umur

Berdasarkan kelompok umur, jumlah penduduk usia 0-44 tahun selama 2025-2045 setiap tahunnya diproyeksikan akan terus mengalami penurunan, dikarenakan semakin kecilnya angka kelahiran yang disebabkan oleh adanya perubahan pola hidup penduduk khususnya perempuan, dari segi Pendidikan maupun pendapatan/pekerjaan. Selanjutnya jumlah penduduk usia 45-49 tahun diprediksi akan mulai mengalami penurunan di tahun 2040 hingga 2045, sedangkan jumlah penduduk usia 55-95 tahun akan mulai mengalami penurunan di tahun 2045.

Berbanding terbalik dengan kondisi jumlah penduduk usia ≤ 54 tahun, jumlah penduduk usia ≥ 64 tahun akan terus mengalami peningkatan selama kurun waktu 2025-2045. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa pertumbuhan

jumlah penduduk lansia (usia tua) akan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Secara rinci kondisi jumlah penduduk berdasarkan usia di Kota Semarang tahun 2025 hingga 2045 dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 5. 2. Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Semarang Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2025-2045

Kelompok Umur	2020 (Data Dasar)	2025	2030	2035	2040	2045
0-4	116.860	113.924	111.097	108.847	106.041	102.648
5-9	122.751	117.215	114.261	111.436	109.192	106.380
10-14	126.699	123.226	117.671	114.709	111.877	109.625
15-19	130.562	127.173	123.702	118.130	115.164	112.324
20-24	127.577	130.482	127.098	123.645	118.080	115.107
25-29	129.763	127.065	129.955	126.591	123.166	117.624
30-34	132.437	129.679	126.964	129.858	126.496	123.083
35-39	135.027	132.159	129.413	126.716	129.613	126.251
40-44	133.889	134.288	131.451	128.727	126.060	128.955
45-49	120.067	132.694	133.113	130.335	127.661	125.036
50-54	106.624	118.067	130.563	131.046	128.379	125.788
55-59	90.978	103.726	114.992	127.299	127.893	125.381
60-64	72.728	86.525	98.842	109.791	121.734	122.432
65-69	51.905	66.683	79.667	91.324	101.744	113.038
70-74	26.349	44.848	57.986	69.774	80.418	89.955
75+	25.372	34.667	55.800	80.676	106.350	131.089
Jumlah	1.649.588	1.722.421	1.782.575	1.828.904	1.859.868	1.874.716

Jika dilihat dari komposisi jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia muda (0-14 tahun), usia produktif (15-64 tahun) dan usia tua (≥ 65 tahun), diproyeksikan jumlah usia produktif masih mendominasi atau lebih banyak dibandingkan usia non produktif (penduduk usia muda dan tua) di tahun 2025 hingga 2045. Meskipun demikian angka ketergantungan penduduk diproyeksikan terus mengalami peningkatan dari 2025 angka ketergantungan sebesar 40,97% (artinya dalam 100 penduduk usia produktif menanggung beban 41 penduduk usia non produktif) meningkat setiap tahunnya hingga ditahun 2045 angka ketergantungan Kota Semarang menjadi 53,42% artinya dalam 100 penduduk usia produktif menanggung beban 53 penduduk usia non produktif). Secara rinci proyeksi kondisi jumlah penduduk Kota Semarang berdasarkan kelompok umur dan angka ketergantungan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 3 Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Semarang Berdasarkan Pengelompokan Usia dan Angka Ketergantungan Tahun 2025-2045

Kelompok Usia	2020 (Data Dasar)	2025	2030	2035	2040	2045
0-14 (usia muda)	366.310	354.365	343.029	334.992	327.110	318.653
15-64 (usia produktif)	1.179.652	1.221.858	1.246.093	1.252.138	1.244.246	1.221.981
≥65 (usia tua)	103.626	146.198	193.453	241.774	288.512	334.082
Jumlah	1.649.588	1.722.421	1.782.575	1.828.904	1.859.868	1.874.716
Angka Ketergantungan	39,84%	40,97%	43,05%	46,06%	49,48%	53,42%

Angka ketergantungan penduduk atau yang biasa disebut Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) merupakan dapat menjadi metode pendekatan untuk menentukan bonus demografi. Terdapat dua metode pendekatan yang yakni metode Cheung et al (Makripuddin, 2019) dan metode Adioetomo (BPS, 2012) yang menggunakan rasio ketergantungan sebagai perhitungan bonus demografi. Metode Cheung et al., (2003) menggunakan rasio ketergantungan (*dependency ratio*) sebagai pendekatan untuk menghitung bonus demografi dimana penduduk usia tidak produktif yang dimaksud adalah penduduk muda (0-14 tahun) dan penduduk tua atau lanjut usia (≥65 tahun), sedangkan penduduk usia produktif adalah penduduk usia 15 sampai 64 tahun. Dalam metode Cheung et al., (2003) suatu negara atau daerah dinyatakan telah mengalami bonus demografi, ketika rasio ketergantungan (*dependency ratio*) berada **dibawah 50**. Jika berdasar pada metode pendekatan bonus demografi berdasarkan Cheung et al., (2003) maka Kota Semarang telah mengalami bonus demografi mulai tahun 2025 hingga 2040, sedangkan ditahun diatas tahun 2040 Kota Semarang tidak lagi mengalami bonus demografi melainkan memasuki kondisi mayoritas penduduk lansia.

Sedangkan metode Adioetomo (2012) juga menggunakan rasio ketergantungan (*dependency ratio*)s ebagai pendekatan untuk menghitung bonus demografi dimana penduduk usia tidak produktif yang dimaksud Adioetomo adalah penduduk muda (0-14 tahun) dan penduduk tua atau lanjut usia (≥65 tahun), sedangkan penduduk usia produktif adalah penduduk usia 15 sampai 64 tahun. Dalam metode Adioetomo (2012) suatu negara atau daerah dinyatakan telah mengalami bonus demografi, ketika rasio ketergantungan

(dependency ratio) mencapai 44. Berdasarkan metode Adiortomo Kota Semarang mengalami bonus demografi mulai tahun 2030 hingga 2045.

Berdasarkan kedua metode pendekatan tersebut maka dapat diasumsikan bahwa Kota Semarang akan mengalami bonus demografi pada kisaran tahun 2030-2040. Sehingga dalam rentan waktu tersebut perlu diperkirakan dan dipersiapkan kebijakan terkait peningkatan kualitas SDM untuk menyiapkan tenaga kerja yang produktif dan unggul sehingga dapat menekan angka tingkat pengangguran. Di tahun 2025 perlu adanya kebijakan berbasis peningkatan SDM yang berdaya saing untuk mendorong kompetensi masyarakat sekalius mendorong terbukanya peluang usaha baru. Memasuki Tahun 2030 hingga 2040 perlu penguatan kapasitas SDM dan penguatan sektor usaha baik dibidang UMKM maupun sektor yang perpotensi lainnya untuk mendorong serapan tenaga kerja dan tumbuhnya ekonomi masyarakat yang mandiri. Selanjutnya memasuki tahun 2045 perlu adanya dorongan untuk menumbuhkan peluang kerja berbasis lansia sebagai upaya memfasilitasi masyarakat usia lansia yang membutuhkan pekerjaan.

Komposisi penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin dari tahun 2025 hingga 2045 mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Pada tahun 2025 hingga 2030 diproyeksikan piramida penduduk Kota Semarang berbentuk Piramida stasioner berbentuk granat atau segi empat dengan jumlah penduduk paling banyak pada udia produktif. Sedangkan memasuki tahun 2035-2045 piramida penduduk di Kota Semarang diproyeksikan berbentuk Piramida konstruktif memiliki bentuk seperti batu nisan atau guci terbalik atau sarang tawon dengan jumlah penduduk usia >75 tahun lebih besar dibanding penduduk usia lainnya. Secara rinci proyeksi bentuk piramida penduduk Kota Semarnag tahun 2025-2045 digambarkan sebagai berikut.

Analisis Demografi

Untuk Penyusunan RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045



Gambar 5. 2. Piramida Penduduk Kota Semarang Tahun 2025-2045

Proyeksi jumlah penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin dari tahun 2025-2045 selanjutnya digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 5.4 Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Semarang Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin Tahun 2025-2045

Kelompok Umur	2020 (Data Dasar)			2025			2030			2035			2040			2045		
	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
0-4	59.841	57.019	116.860	58.107	55.817	113.924	56.673	54.424	111.097	55.543	53.304	108.847	54.128	51.913	106.041	52.411	50.237	102.648
5-9	62.794	59.957	122.751	60.107	57.108	117.215	58.362	55.899	114.261	56.931	54.505	111.436	55.805	53.387	109.192	54.387	51.993	106.380
10-14	65.212	61.487	126.699	63.281	59.945	123.226	60.575	57.096	117.671	58.820	55.889	114.709	57.384	54.493	111.877	56.250	53.375	109.625
15-19	67.155	63.407	130.562	65.455	61.718	127.173	63.527	60.175	123.702	60.813	57.317	118.130	59.059	56.105	115.164	57.621	54.703	112.324
20-24	65.037	62.540	127.577	66.912	63.570	130.482	65.218	61.880	127.098	63.309	60.336	123.645	60.608	57.472	118.080	58.857	56.250	115.107
25-29	64.963	64.800	129.763	64.368	62.697	127.065	66.227	63.728	129.955	64.548	62.043	126.591	62.665	60.501	123.166	59.989	57.635	117.624
30-34	65.688	66.749	132.437	64.606	65.073	129.679	64.003	62.961	126.964	65.856	64.002	129.858	64.188	62.308	126.496	62.320	60.763	123.083
35-39	66.768	68.259	135.027	65.603	66.556	132.159	64.513	64.900	129.413	63.914	62.802	126.716	65.771	63.842	129.613	64.103	62.148	126.251
40-44	65.756	68.133	133.889	66.326	67.962	134.288	65.168	66.283	131.451	64.083	64.644	128.727	63.494	62.566	126.060	65.351	63.604	128.955
45-49	58.406	61.661	120.067	64.953	67.741	132.694	65.518	67.595	133.113	64.386	65.949	130.335	63.326	64.335	127.661	62.757	62.279	125.036
50-54	51.172	55.452	106.624	57.135	60.932	118.067	63.572	66.991	130.563	64.159	66.887	131.046	63.086	65.293	128.379	62.071	63.717	125.788
55-59	43.196	47.782	90.978	49.318	54.408	103.726	55.129	59.863	114.992	61.415	65.884	127.299	62.050	65.843	127.893	61.071	64.310	125.381
60-64	34.772	37.956	72.728	40.437	46.088	86.525	46.254	52.588	98.842	51.819	57.972	109.791	57.839	63.895	121.734	58.518	63.914	122.432
65-69	24.264	27.641	51.905	31.061	35.622	66.683	36.237	43.430	79.667	41.601	49.723	91.324	46.768	54.976	101.744	52.333	60.705	113.038
70-74	11.954	14.395	26.349	20.180	24.668	44.848	25.954	32.032	57.986	30.456	39.318	69.774	35.164	45.254	80.418	39.720	50.235	89.955
75+	9.528	15.844	25.372	13.788	20.879	34.667	22.606	33.194	55.800	32.325	48.351	80.676	41.325	65.025	106.350	49.930	81.159	131.089
Jumlah	816.506	833.082	1.649.588	851.637	870.784	1.722.421	879.536	903.039	1.782.575	899.978	928.926	1.828.904	912.660	947.208	1.859.868	917.689	957.027	1.874.716

5.1.3 Jumlah Penduduk Kota Semarang Berdasarkan Kecamatan

Proyeksi jumlah penduduk di Kota Semarang selain di hitung secara matematis juga memperhatikan kebijakan pengembangan infrastruktur dalam beberapa dokumen perencanaan ruang di Kota Semarang. Dari tahun 2025 hingga 2045 terdapat 7 kecamatan yang terus mengalami pertambahan jumlah penduduk setiap tahunnya yakni Kecamatan Mijen, Gunungpati, Banyumanik, Tembalang, Pedurungan, Genuk, dan Ngaliyan. Selain karena tren selama 10 tahun kebelakang di 7 kecamatan tersebut terus mengalami kenaikan, pertambahan jumlah penduduk juga diprediksi terjadi karena arah persebaran penduduk yang mulai menuju daerah pinggi (pusat pelayanan kota) atau daerah perbatasan, dan juga karena faktor pembangunan infratruktur daerah pinggiran kota yang semakin massif. Dilain sisi pertambahan jumlah penduduk di 7 kecamatan tersebut, menyebabkan jumlah penduduk di 9 kecamatan lainnya semakin menurun setiap tahunnya.

Hingga akhir 2045, terdapat 4 kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil yakni Kecamatan Candisari, Semarang Timur, Semarang Tengah, dan Tugu, dimana ke-4 kecamatan tersebut saat ini dapat dikatakan sebagai pusat perkotaan yang nantinya diprediksi penduduknya akan cenderung bergeser ke daerah pinggiran yang memiliki kemudahan akses mobilitas, cenderung terhindar dari macet, dan memiliki luas lahan yang cukup memadai untuk tempat tinggal. Secara rinci proyeksi jumlah penduduk di Kota Semarang berdasarkan kecamatan pada tahun 2025- 2045 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 5 Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Semarang Berdasarkan Kecamatan Tahun 2025-2045

Kecamatan	2022 (Data Dasar)	Jumlah				
		2025	2030	2035	2040	2045
Mijen	56.570	100.328	122.796	149.069	171.399	177.508
Gunungpati	75.027	113.089	128.740	144.898	155.732	163.831
Banyumanik	128.225	149.586	155.556	159.496	166.084	172.017
Gajahmungkur	63.430	51.650	45.294	36.631	27.300	24.128
Semarang Selatan	82.931	51.808	41.008	28.882	21.891	19.818
Candisari	79.902	72.190	66.966	59.268	48.749	44.354
Tembalang	142.941	221.346	256.573	295.815	330.863	348.778
Pedurungan	175.770	202.856	211.113	217.443	221.536	223.078
Genuk	91.527	144.999	168.835	195.084	211.348	216.464
Gayamsari	73.584	67.550	62.859	55.671	48.641	43.694
Semarang Timur	78.889	59.252	50.761	40.257	32.344	27.918

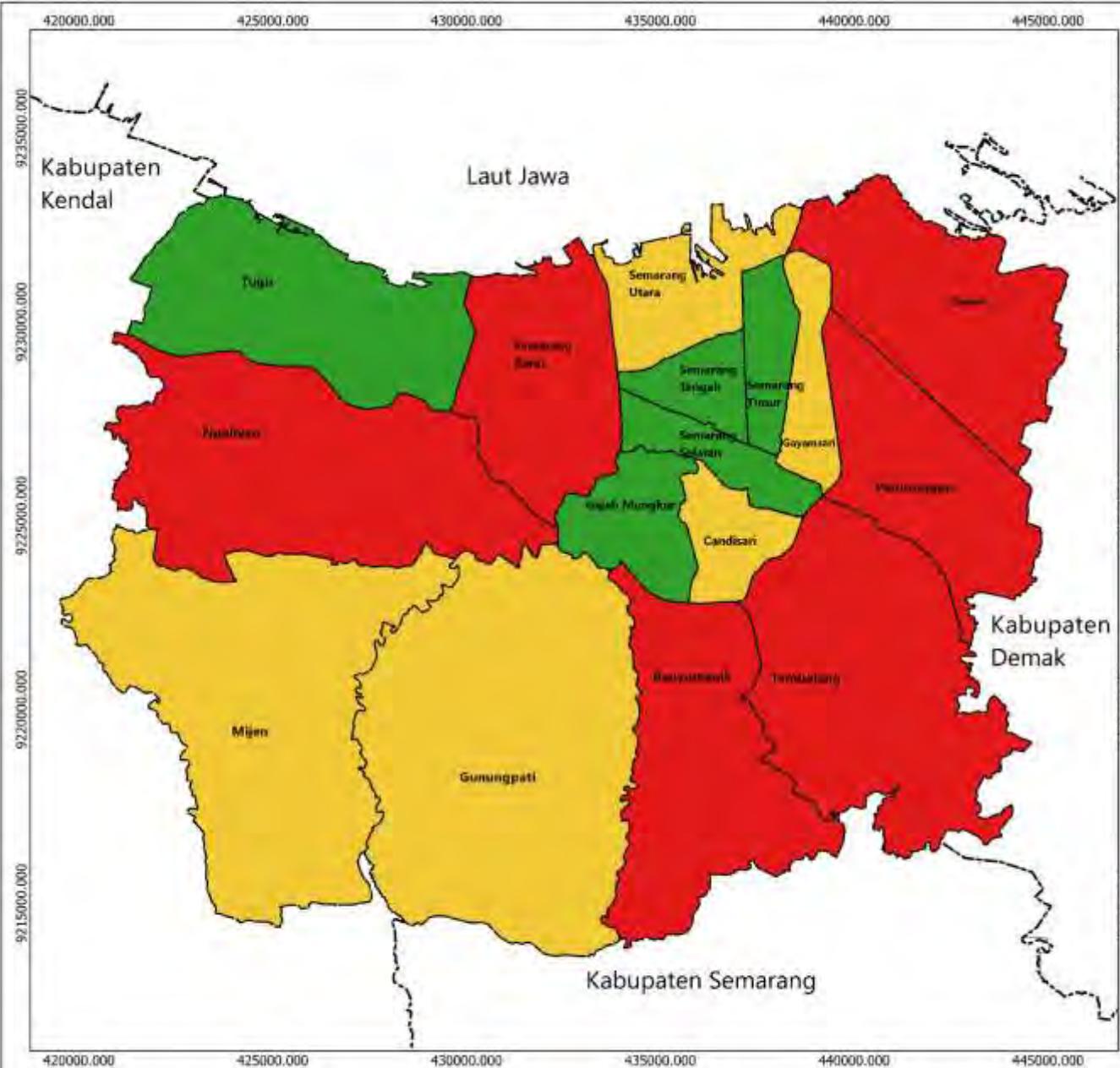
Analisis Demografi

Untuk Penyusunan RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045

Kecamatan	2022 (Data Dasar)	Jumlah				
		2025	2030	2035	2040	2045
Semarang Utara	127.921	111.418	103.435	93.132	85.154	79.437
Semarang Tengah	71.674	46.618	37.212	26.173	20.026	16.603
Semarang Barat	158.981	142.529	134.363	123.859	112.664	108.714
Tugu	30.904	33.114	31.409	27.196	24.134	21.149
Ngaliyan	120.922	154.087	165.653	176.030	182.004	187.225
Kota Semarang	1.559.198	1.722.421	1.782.575	1.828.904	1.859.869	1.874.717

Analisis Demografi

Untuk Penyusunan RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

PETA PROYEKSI JUMLAH PENDUDUK
KOTA SEMARANG TAHUN 2025



SKALA 1: 10.000

0 1 2 3 km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal
Transverse Mercator
Datum Horizontal : WGS 84 - Zone 49S

INSET PETA



LEGENDA

Batas Administrasi
--- Batas Administrasi Kecamatan
---- Batas Administrasi Kabupaten

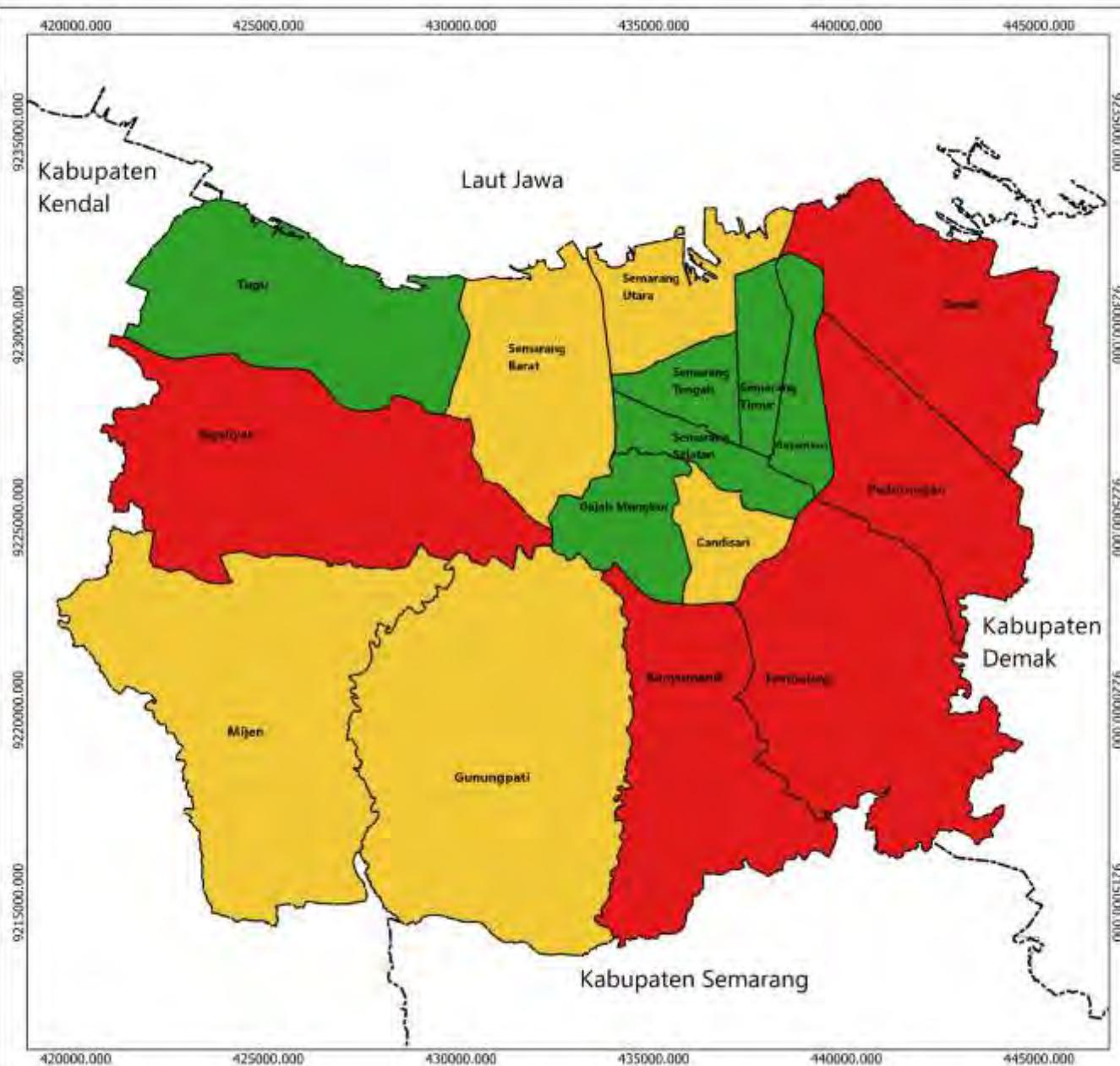
Klasifikasi Jumlah Penduduk

- <65.000(Rendah)
- 65.001 - 139.999(Sedang)
- >140.000(Tinggi)

SUMBER PETA: BADAN PUSAT STATISTIK KOTA
SEMARANG, 2023

Analisis Demografi

Untuk Penyusunan RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

PETA PROYEKSI JUMLAH PENDUDUK
KOTA SEMARANG TAHUN 2030

U

SKALA 1: 10.000

0 1 2 3 km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal
Transverse Mercator
Datum Horizontal : WGS 84 - Zone 49S

INSET PETA



LEGENDA

Batas Administrasi

- Batas Administrasi Kecamatan
- Batas Administrasi Kabupaten

Klasifikasi Jumlah Penduduk

- <65.000(Rendah)
- 65.001 - 139.999(Sedang)
- >140.000(Tinggi)

SUMBER PETA: BADAN PUSAT STATISTIK KOTA SEMARANG, 2023

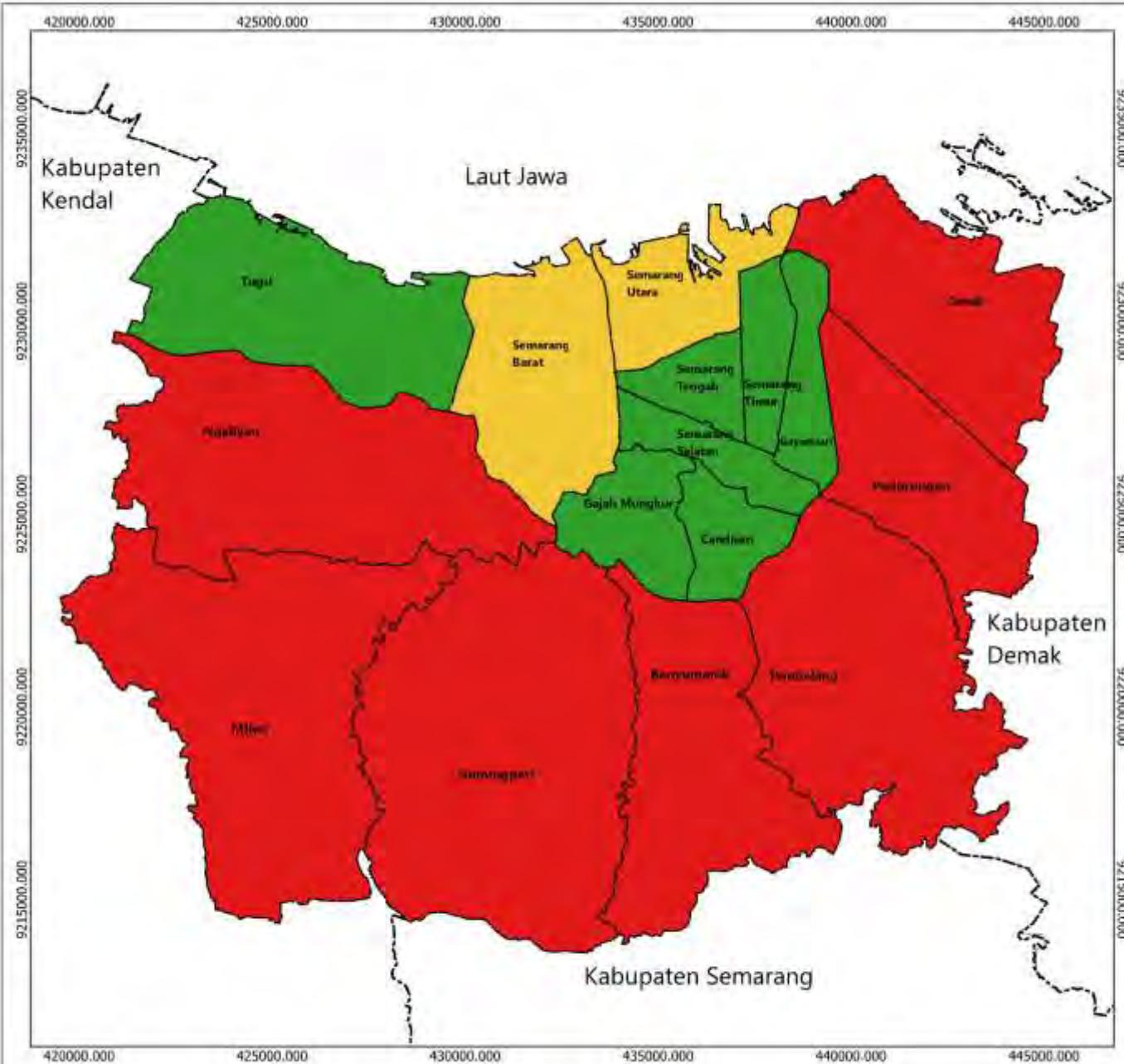
Analisis Demografi

Untuk Penyusunan RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045



Analisis Demografi

Untuk Penyusunan RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

PETA PROYEKSI JUMLAH PENDUDUK KOTA SEMARANG TAHUN 2040



SKALA 1: 10.000

0 1 2 3 km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal
Transverse Mercator
Datum Horizontal : WGS 84 - Zone 49S

INSET PETA



LEGENDA

Batas Administrasi

- Batas Administrasi Kecamatan
- Batas Administrasi Kabupaten

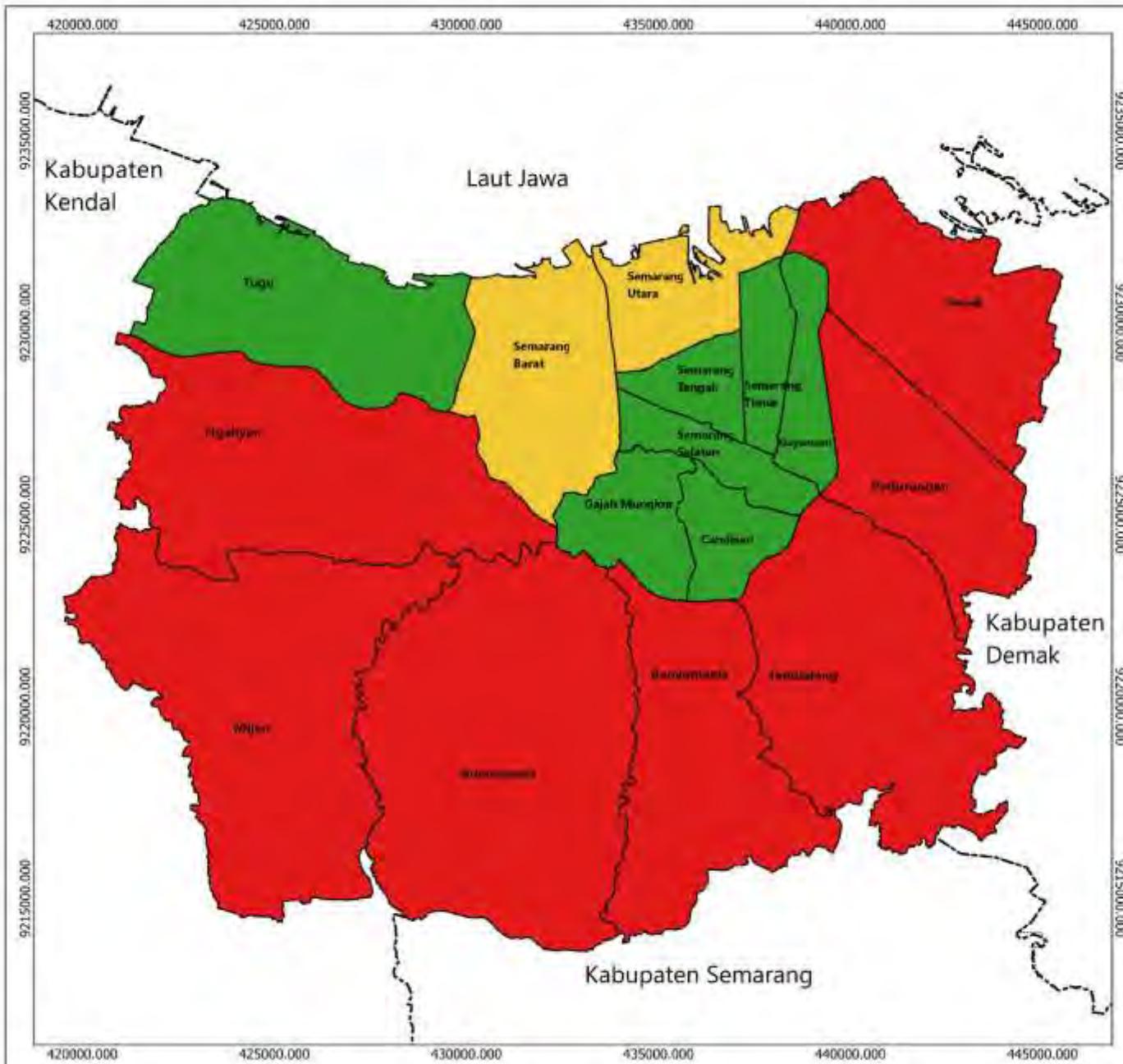
Klasifikasi Jumlah Penduduk

- <65.000(Rendah)
- 65.001 - 139.999(Sedang)
- >140.000(Tinggi)

SUMBER PETA: BADAN PUSAT STATISTIK KOTA SEMARANG, 2023

Analisis Demografi

Untuk Penyusunan RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

PETA PROYEKSI JUMLAH PENDUDUK KOTA SEMARANG TAHUN 2045

U

SKALA 1: 10.000

0 1 2 3 km

Proyeksi : Universal Tranverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal
Transverse Mercator
Datum Horizontal : WGS 84 - Zone 49S

INSET PETA



LEGENDA

Batas Administrasi

- Batas Administrasi Kecamatan
- Batas Administrasi Kabupaten

Klasifikasi Jumlah Penduduk

- <65.000(Rendah)
- 65.001 - 139.999(Sedang)
- >140.000(Tinggi)

SUMBER PETA: BADAN PUSAT STATISTIK KOTA SEMARANG, 2023

Selanjutnya komposisi jumlah penduduk Kota Semarang munurut kecamatan dan jenis kelamin diproyeksikan bahwa dari tahun 2025 hingga 2025 masih di dominasi penduduk berjenis kelamin perempuan. Namun terdapat 6kecamatan yang penduduk berjenis kelamin laki-laki diproyeksikan cenderung lebih banyak dari penduduk berjenis kelamin perempuan, kecamatan tersebut antara lain yakni Kecamatan Gunungpati, Tembalang, Pedurungan, Genuk, Tugu dna Ngaliyan. Sedangkan 10 kecamatan lainnya seperti Kecamatan Mijen, Banyumanik, Gajahmungkur, Semarang Selatan, Candisari, Gayamsari, Semarang Timur, Semarang Utara, Semarang Tengah, dan Semarang Barat diproyeksikan cenderung di dominasi oleh penduduk berjenis kelamin laki-laki. Secara rinci proyeksi jumlah penduduk berdaekan kecamatan dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 6 Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Semarang Berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2020-2045

Kecamatan	2022 (Data Dasar)			2025			2030		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Mijen	28.479	28.091	56.570	49.917	50.411	100.328	60.578	62.218	122.796
Gunungpati	37.534	37.493	75.027	57.333	55.756	113.089	66.062	62.678	128.740
Banyumanik	63.671	64.554	128.225	73.805	75.781	149.586	76.606	78.950	155.556
Gajahmungkur	31.760	31.670	63.430	24.676	26.975	51.650	20.756	24.539	45.294
Semarang Selatan	41.357	41.574	82.931	24.176	27.632	51.808	17.950	23.058	41.008
Candisari	39.649	40.253	79.902	35.203	36.987	72.190	32.030	34.936	66.966
Tembalang	72.234	70.707	142.941	111.095	110.251	221.346	129.684	126.889	256.573
Pedurungan	86.884	88.886	175.770	101.222	101.634	202.856	105.833	105.281	211.113
Genuk	45.928	45.599	91.527	73.967	71.033	144.999	87.450	81.385	168.835
Gayamsari	37.099	36.485	73.584	33.017	34.533	67.550	29.972	32.887	62.859
Semarang Timur	38.842	40.047	78.889	28.017	31.234	59.252	23.050	27.711	50.761
Semarang Utara	62.339	65.582	127.921	54.928	56.490	111.418	50.716	52.719	103.435
Semarang Tengah	35.023	36.651	71.674	21.494	25.124	46.618	16.113	21.099	37.212
Semarang Barat	79.214	79.767	158.981	68.973	73.556	142.529	63.791	70.572	134.363
Tugu	15.393	15.511	30.904	16.565	16.548	33.114	15.504	15.905	31.409
Ngaliyan	60.387	60.535	120.922	77.249	76.838	154.087	83.441	82.211	165.653
Kota Semarang	775.793	783.405	1.559.198	851.637	870.784	1.722.421	879.536	903.039	1.782.575

Kecamatan	2035			2040			2045		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Mijen	72.866	76.203	149.069	78.379	93.020	171.399	78.958	98.550	177.508
Gunungpati	75.258	69.640	144.898	79.109	76.623	155.732	82.200	81.631	163.831
Banyumanik	78.249	81.247	159.496	80.579	85.505	166.084	83.463	88.555	172.017
Gajahmungkur	15.571	21.061	36.631	10.948	16.352	27.300	9.902	14.226	24.128
Semarang Selatan	11.074	17.808	28.882	10.247	11.644	21.891	9.482	10.336	19.818
Candisari	27.466	31.802	59.268	21.352	27.398	48.749	18.813	25.541	44.354
Tembalang	150.549	145.267	295.815	165.208	165.655	330.863	175.362	173.416	348.778
Pedurungan	109.402	108.041	217.443	111.798	109.739	221.536	112.875	110.203	223.078
Genuk	102.617	92.467	195.084	110.951	100.397	211.348	114.122	102.341	216.464
Gayamsari	25.529	30.142	55.671	22.529	26.112	48.641	19.099	24.594	43.694
Semarang Timur	16.992	23.266	40.257	14.644	17.700	32.344	12.101	15.817	27.918
Semarang Utara	45.166	47.966	93.132	43.114	42.039	85.154	41.686	37.751	79.437
Semarang Tengah	9.870	16.303	26.173	8.514	11.512	20.026	7.094	9.509	16.603
Semarang Barat	57.330	66.529	123.859	51.424	61.240	112.664	49.194	59.520	108.714
Tugu	13.030	14.166	27.196	12.987	11.147	24.134	11.505	9.644	21.149
Ngaliyan	89.009	87.020	176.030	90.878	91.126	182.004	91.832	95.393	187.225
Kota Semarang	899.978	928.926	1.828.904	912.660	947.208	1.859.868	917.689	957.027	1.874.716

5.1.4 Kepadatan Penduduk Kota Semarang Berdasarkan Kecamatan

Kepadatan penduduk adalah banyaknya penduduk per satuan luas. Kegunaannya perhitungan kepadatan penduduk adalah sebagai dasar kebijakan pemerataan penduduk dalam program transmigrasi. Kepadatan penduduk kasar atau *crude population density* (CPD) menunjukkan jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi luas wilayah. Klasifikasi kepadatan penduduk menurut SNI 03-6981-2004 memiputi:

1. Rendah yaitu kepadatan penduduk di <150 jiwa/ha atau 15.000 jiwa/km²
2. Sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151–200 jiwa/ha atau 15.100–20.000 jiwa/km²
3. Tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201–400 jiwa/ha atau 20.100–40.000 jiwa/km²
4. Sangat padat yaitu kepadatan penduduk >400 jiwa/ha atau 40.000 jiwa/km²

Selama kurun waktu 20 tahun dari tahun 2025 hingga 2045, kepadatan penduduk di Kota Semarang diproyeksikan terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk di Kota Semarang. Pada tahun 2025 kepadatan penduduk di Kota Semarang di prediksi mencapai 4.608 jiwa/km², kemudian terus mengalami kenaikan setiap tahunnya hingga tahun 2045 diprediksi kepadatan penduduk di Kota Semarang mencapai 5.016 jiwa/km².

Dari tahun 2025 hingga 2045 Kota Semarang mengalami perubahan wilayah dilihat dari kepadatan penduduknya. Pada tahun 2025 diproyeksikan terdapat 5 Kecamatan dengan kepadatan penduduk berstatus rendah yakni Kecamatan Mijen, Gunungpati, Banyumanik, Tugu dan Ngaliyan. Di tahun 2030-2035 diproyeksikan terdapat 5 kecamatan dengan kepadatan penduduk berstatus rendah yakni kecamatan Mijen, Gunungpati, Gajahmungkur, Tugu dan Ngaliyan. Jika dilihat secara detail Kecamatan Banyumanik mengalami perubahan kondisi yang awalnya memiliki kepadatan penduduk rendah berubah menjadi kecamatan dengan kepadatan penduduk sedang, berbanding terbalik dengan Kecamatan Gajahmungkur yang mulai berubah menjadi kecamatan dengan kepadatan penduduk bersatus rendah.

Di tahun 2040 hingga 2045 diproyeksikan terdapat 6 kecamatan dengan kondisi status kepadatan penduduknya rendah yakni Kecamatan Mijen,

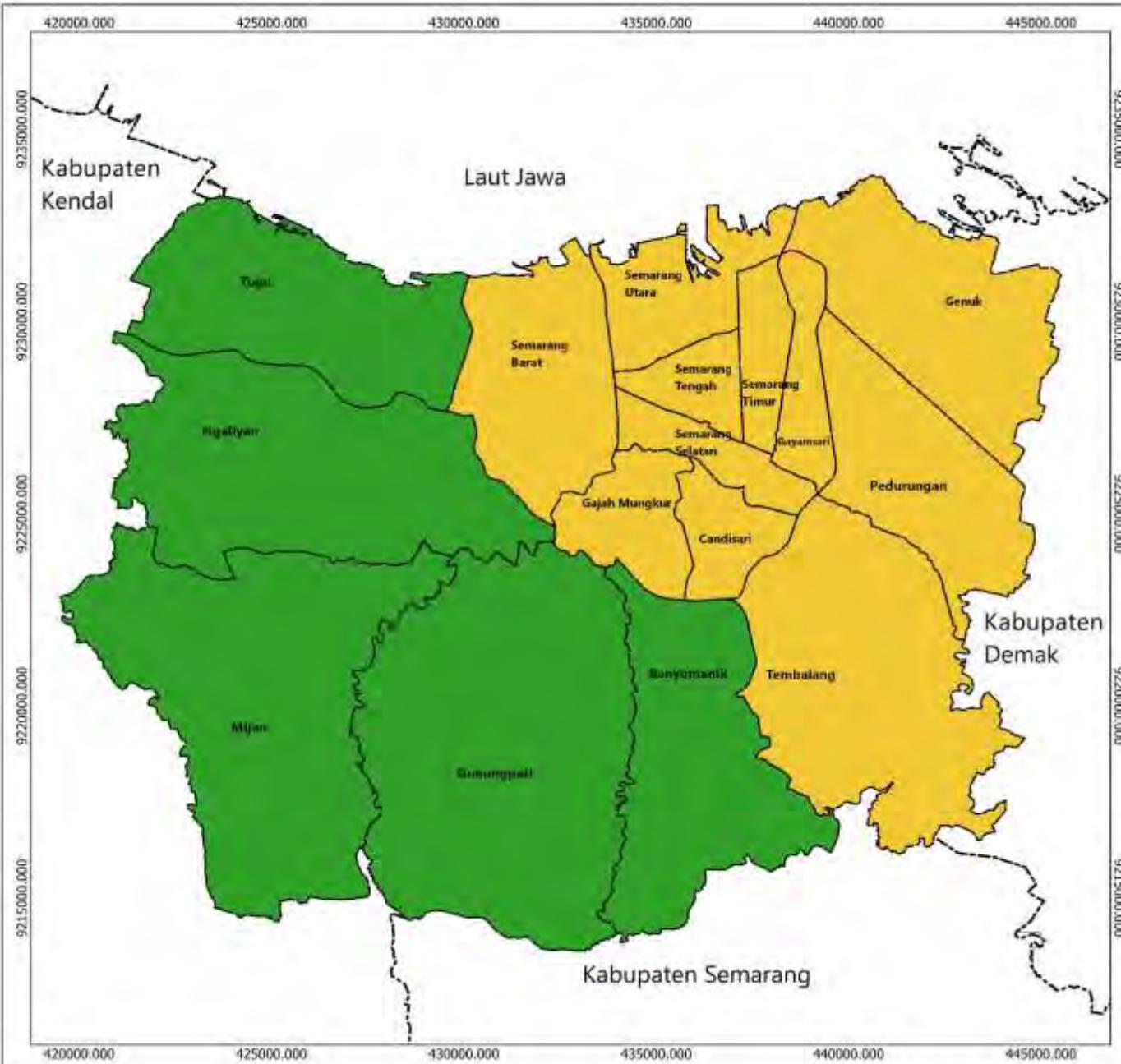
Gunungpati, Gajahmungkur, Semarang Tengah, Tugu, dan Ngaliyan. Proyeksi terjadi perubahan kondisi kepadatan penduduk di Kecamatan Semarang Tengah yang semula berkepadatan penduduk sedang berubah menjadi rendah, yang diasumsikan terjadi karena adanya perpindahan penduduk menuju daerah pinggiran. Secara rinci proyeksi kondisi kepadatan penduduk di Kota Semarang Tahun 2025-2045 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 7 Proyeksi Kepadatan Penduduk Kota Semarang Berdasarkan Kecamatan Tahun 2025-2045

Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan Penduduk Jiwa/Km ²				
		2025	2030	2035	2040	2045
Mijen	56,52	1.775	2.173	2.637	3.033	3.141
Gunungpati	58,27	1.941	2.209	2.487	2.673	2.812
Banyumanik	29,74	5.030	5.231	5.363	5.585	5.784
Gajahmungkur	9,34	5.530	4.850	3.922	2.923	2.583
Semarang Selatan	5,95	8.707	6.892	4.854	3.679	3.331
Candisari	6,40	11.280	10.463	9.261	7.617	6.930
Tembalang	39,47	5.608	6.500	7.495	8.383	8.837
Pedurungan	21,11	9.609	10.001	10.300	10.494	10.567
Genuk	25,98	5.581	6.499	7.509	8.135	8.332
Gayamsari	6,22	10.860	10.106	8.950	7.820	7.025
Semarang Timur	5,42	10.932	9.366	7.428	5.967	5.151
Semarang Utara	11,39	9.782	9.081	8.177	7.476	6.974
Semarang Tengah	5,17	9.017	7.198	5.062	3.873	3.211
Semarang Barat	21,68	6.574	6.198	5.713	5.197	5.014
Tugu	28,13	1.177	1.117	967	858	752
Ngaliyan	42,99	3.584	3.853	4.095	4.234	4.355
Kota Semarang	374	4.608	4.769	4.893	4.976	5.016

Analisis Demografi

Untuk Penyusunan RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

PETA PROYEKSI KEPADATAN PENDUDUK KOTA SEMARANG TAHUN 2025



SKALA 1: 10.000

0 1 2 3 km

Proyeksi : Universal Tranverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal
Transverse Mercator
Datum Horizontal : WGS 84 - Zone 49S

INSET PETA



LEGENDA

Batas Administrasi

- Batas Administrasi Kecamatan
- Batas Administrasi Kabupaten

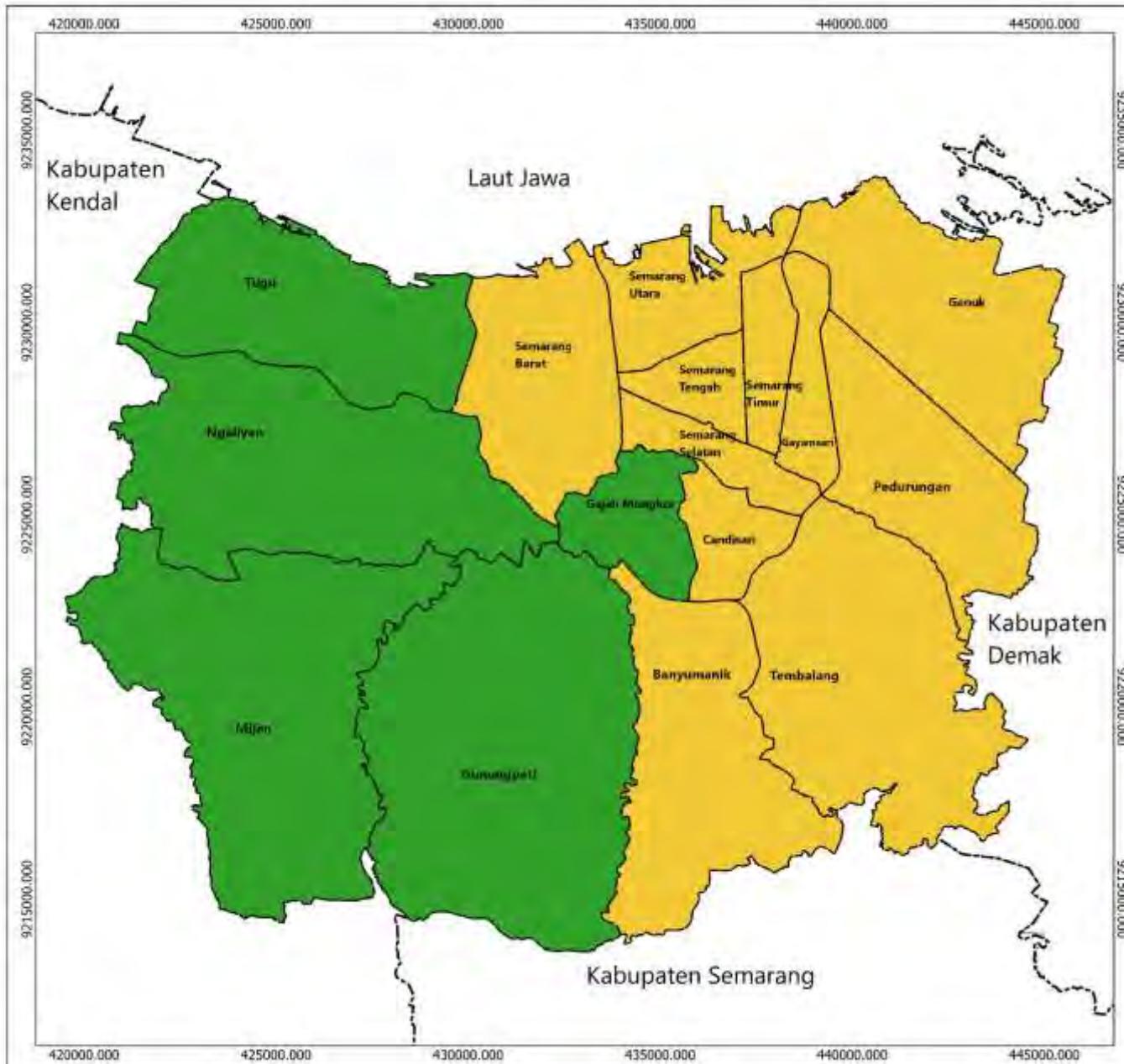
Klasifikasi Kepadatan Penduduk (SNI 03-1722-2004)

- [Green Box] <50 jiwa/ha (Rendah)
- [Yellow Box] 51 - 200 jiwa/ha (Sedang)

SUMBER PETA: BADAN PUSAT STATISTIK KOTA SEMARANG, 2023

Analisis Demografi

Untuk Penyusunan RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

PETA PROYEKSI KEPADATAN PENDUDUK KOTA SEMARANG TAHUN 2030



SKALA 1: 10,000

0 1 2 3 km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal
Transverse Mercator
Datum Horizontal : WGS 84 - Zone 48S

INSET PETA



LEGENDA

Batas Administrasi

- Batas Administrasi Kecamatan
- Batas Administrasi Kabupaten

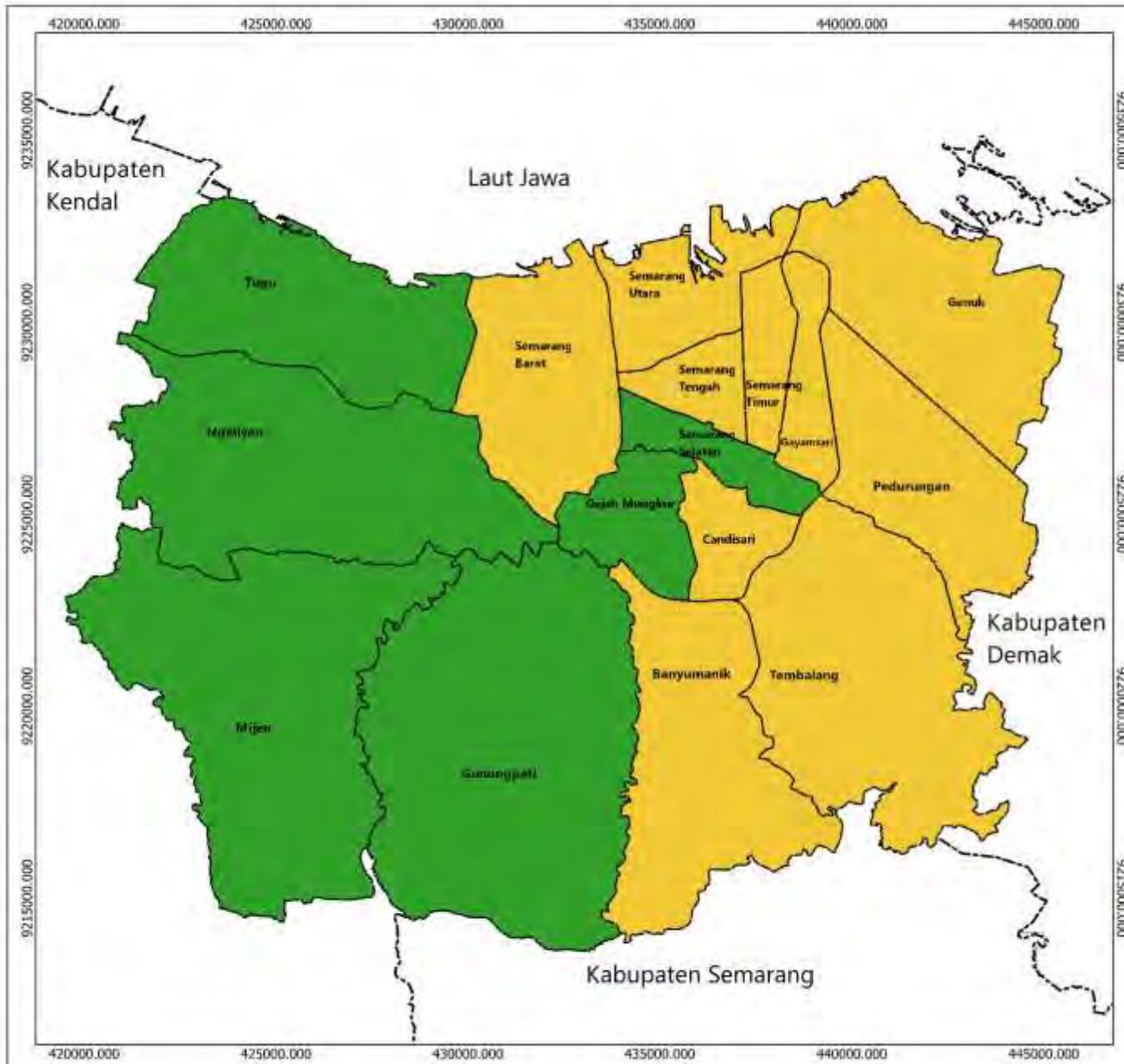
Klasifikasi Kepadatan Penduduk (SNI 03-1722-2004)

- [Green square] <50 jiwa/ha (Rendah)
- [Yellow square] 51 - 200 jiwa/ha (Sedang)

SUMBER PETA: BADAN PUSAT STATISTIK KOTA SEMARANG, 2023

Analisis Demografi

Untuk Penyusunan RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

PETA PROYEKSI KEPADATAN PENDUDUK KOTA SEMARANG TAHUN 2035

U

SKALA 1: 10.000

0 1 2 3 km

Proyeksi : Universal Transevere Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal
Transevere Mercator
Datum Horizontal : WGS 84 - Zone 49S

INSET PETA



LEGENDA

Batas Administrasi

- Batas Administrasi Kecamatan
- Batas Administrasi Kabupaten

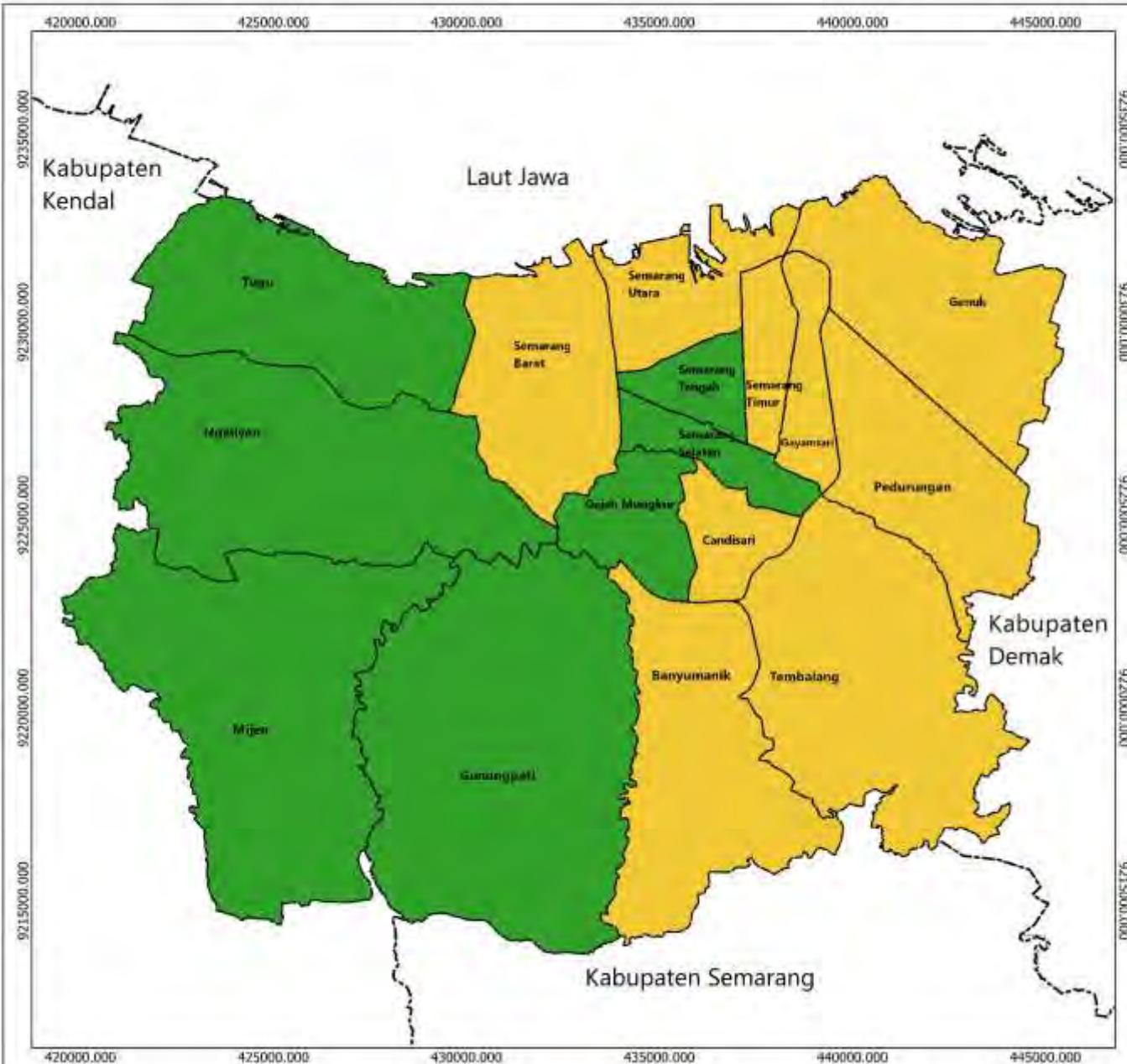
Klasifikasi Kepadatan Penduduk (SNI 03-1722-2004)

- <50 jiwa/ha (Rendah)
- 51 - 200 jiwa/ha (Sedang)

SUMBER PETA: BADAN PUSAT STATISTIK KOTA SEMARANG, 2023

Analisis Demografi

Untuk Penyusunan RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

PETA PROYEKSI KEPADATAN PENDUDUK KOTA SEMARANG TAHUN 2040



SKALA 1: 10.000

0 1 2 3 km

Proyeksi : Universal Tranverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal
Transverse Mercator
Datum Horizontal : WGS 84 - Zone 49S

INSET PETA



LEGENDA

Batas Administrasi

- Batas Administrasi Kecamatan
- Batas Administrasi Kabupaten

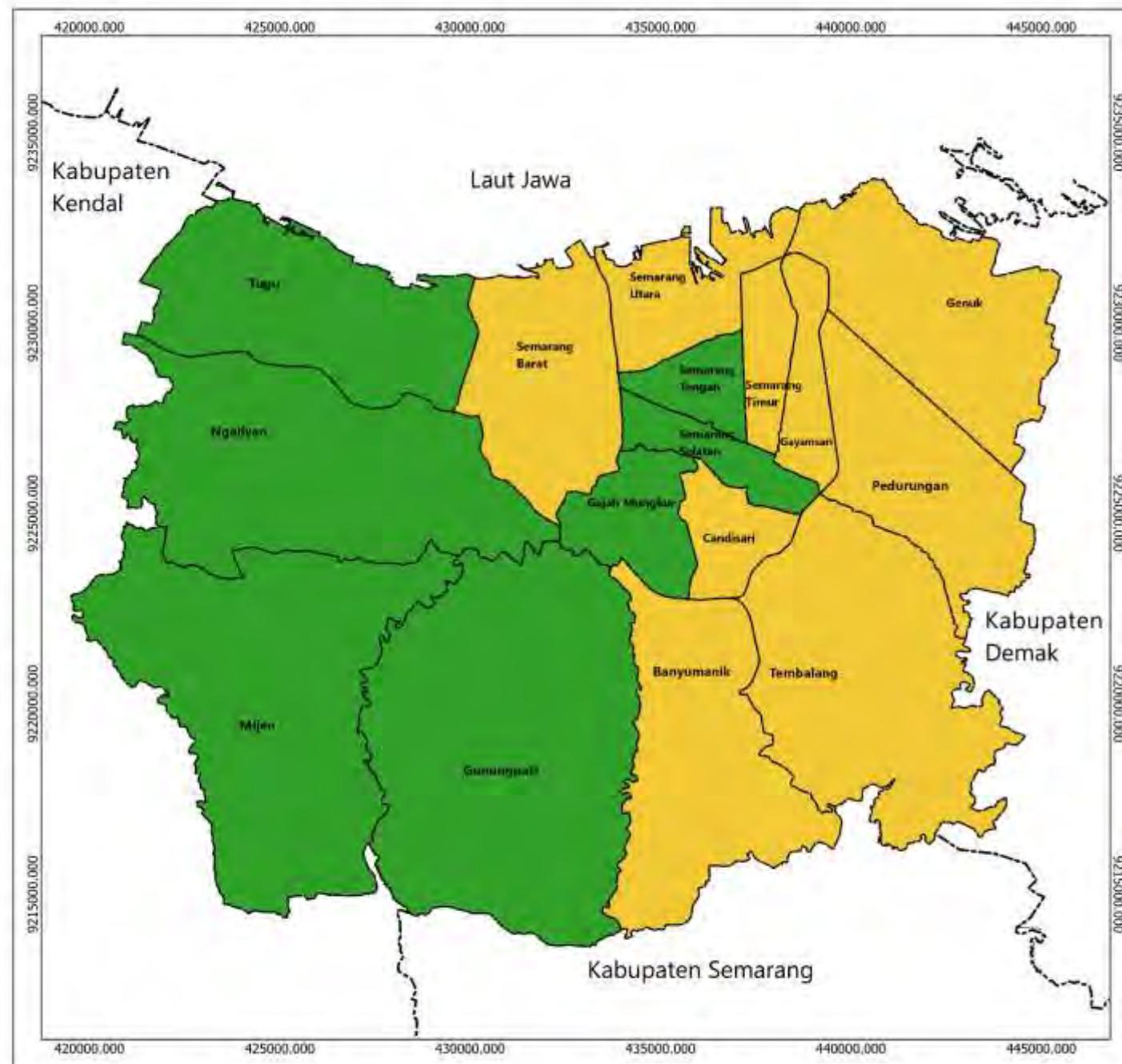
Klasifikasi Kepadatan Penduduk (SNI 03-1722-2004)

- <50 jiwa/ha (Rendah)
- 51 - 200 jiwa/ha (Sedang)

SUMBER PETA: BADAN PUSAT STATISTIK KOTA SEMARANG, 2023

Analisis Demografi

Untuk Penyusunan RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

PETA PROYEKSI KEPADATAN PENDUDUK KOTA SEMARANG TAHUN 2045



SKALA 1: 10.000

0 1 2 3 km

Proyeksi : Universal Tranverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal
Transverse Mercator
Datum Horizontal : WGS 84 - Zone 49S

INSET PETA



LEGENDA

Batas Administrasi

- Batas Administrasi Kecamatan
- - - Batas Administrasi Kabupaten

Klasifikasi Kepadatan Penduduk (SNI 03-1722-2004)

- <50jiwa/ha(Rendah)
- 51 - 200jiwa/ha(Sedang)

SUMBER PETA: BADAN PUSAT STATISTIK KOTA SEMARANG, 2023

5.2 Analisis Kebutuhan Hunian serta Sarana dan Prasarana

5.2.1 Kebutuhan Hunian

Berdasarkan Penyusunan Profil Kependudukan Kota Semarang Tahun 2022, rata-rata jumlah anggota keluarga di Kota Semarang adalah sebanyak 3,03 yang artinya setiap keluarga rata-rata terdiri dari 3 orang. Apabila diasumsikan 1 Kepala Keluarga memiliki 1 hunian, maka kebutuhan hunian Kota Semarang pada tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.8 Kebutuhan Hunian Kota Semarang Tahun 2025-2045

Kecamatan	2025	2030	2035	2040	2045
Mijen	33.443	40.932	49.690	57.133	59.169
Gunungpati	37.696	42.913	48.299	51.911	54.610
Banyumanik	49.862	51.852	53.165	55.361	57.339
Gajahmungkur	17.217	15.098	12.210	9.100	8.043
Semarang Selatan	17.269	13.669	9.627	7.297	6.606
Candisari	24.063	22.322	19.756	16.250	14.785
Tembalang	73.782	85.524	98.605	110.288	116.259
Pedurungan	67.619	70.371	72.481	73.845	74.359
Genuk	48.333	56.278	65.028	70.449	72.155
Gayamsari	22.517	20.953	18.557	16.214	14.565
Semarang Timur	19.751	16.920	13.419	10.781	9.306
Semarang Utara	37.139	34.478	31.044	28.385	26.479
Semarang Tengah	15.539	12.404	8.724	6.675	5.534
Semarang Barat	47.510	44.788	41.286	37.555	36.238
Tugu	11.038	10.470	9.065	8.045	7.050
Ngaliyan	51.362	55.218	58.677	60.668	62.408
Kota Semarang	574.140	594.192	609.635	619.956	624.906

Kebutuhan hunian Kota Semarang adalah sebanyak 574.140 hunian pada tahun 2025, 594.192 hunian pada tahun 2030, 609.635 hunian pada tahun 2035, 619.956 hunian pada tahun 2040, dan 624.906 hunian pada tahun 2045.

Berdasarkan SNI 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan, kebutuhan udara segar orang dewasa per jam adalah 16–24 m³, sedangkan kebutuhan udara segar anak-anak per jam adalah 8–12 m³. Dengan pergantian udara dalam ruang sebanyak-banyaknya 2 kali per jam dan tinggi plafon rata-rata 2,5 m, maka kebutuhan luas lantai minimum per orang dewasa adalah 9,6 m², sedangkan kebutuhan luas lantai minimum bagi anak-anak adalah 4,8 m². Apabila 1 Kepala Keluarga terdiri dari 3

anggota keluarga yang meliputi 2 orang dewasa (Ayah dan Ibu) dan 1 anak, maka kebutuhan luas lantai minimum untuk keluarga tersebut dihitung sebagai berikut:

$$\text{Luas lantai utama} = (2 \times 9,6) + (1 \times 4,8) \text{ m}^2 = 24 \text{ m}^2$$

$$\text{Luas lantai pelayanan} = 50\% \times 28,8 \text{ m}^2 = 12 \text{ m}^2$$

$$\text{Total luas lantai} = 36 \text{ m}^2$$

Apabila koefisien dasar bangunan 50%, maka luas kavling minimum untuk keluarga dengan 3 anggota keluarga adalah sebagai berikut:

$$\text{Luas kavling minimum} = \frac{100}{50} \times 36 \text{ m}^2 = 72 \text{ m}^2$$

Oleh karena itu, kebutuhan luas kavling minimum untuk hunian Kota Semarang pada tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.9 Kebutuhan Luas Kavling Minimum Hunian Kota Semarang
Tahun 2025-2045 (m²)**

Kecamatan	2025	2030	2035	2040	2045
Mijen	2.407.876	2.947.096	3.577.661	4.113.580	4.260.189
Gunungpati	2.714.144	3.089.757	3.477.559	3.737.574	3.931.943
Banyumanik	3.590.069	3.733.345	3.827.897	3.986.019	4.128.410
Gajahmungkur	1.239.601	1.087.067	879.154	655.190	579.076
Semarang Selatan	1.243.389	984.194	693.174	525.395	475.633
Candisari	1.732.559	1.607.188	1.422.428	1.169.983	1.064.495
Tembalang	5.312.311	6.157.762	7.099.562	7.940.714	8.370.681
Pedurungan	4.868.547	5.066.723	5.218.624	5.316.873	5.353.879
Genuk	3.479.986	4.052.046	4.682.020	5.072.348	5.195.128
Gayamsari	1.621.210	1.508.616	1.336.101	1.167.385	1.048.651
Semarang Timur	1.422.039	1.218.270	966.179	776.252	670.041
Semarang Utara	2.674.036	2.482.450	2.235.163	2.043.688	1.906.491
Semarang Tengah	1.118.838	893.078	628.152	480.622	398.463
Semarang Barat	3.420.688	3.224.718	2.972.615	2.703.926	2.609.142
Tugu	794.724	753.817	652.708	579.207	507.578
Ngaliyan	3.698.080	3.975.666	4.224.711	4.368.094	4.493.394
Kota Semarang	41.338.098	42.781.793	43.893.705	44.636.849	44.993.197

Kebutuhan luas kavling minimum hunian Kota Semarang adalah sebesar 41.338.098 m² pada tahun 2025, 42.781.793 m² pada tahun 2030, 43.893.705 m² pada tahun 2035, 44.636.849 m² pada tahun 2040, dan 44.993.197 m² pada tahun 2045.

5.2.2 Kebutuhan Air Bersih

Berdasarkan SNI 19-6728.1-2002 Tentang Penyusunan Neraca Sumber Daya – Bagian 1: Sumber Daya Air Spasial, konsumsi air penduduk perkotaan adalah sebesar 120 L/hari untuk setiap orang. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) (2007) juga menyampaikan bahwa angka tersebut merupakan kebutuhan pokok minimal pemakaian air setiap orang. Angka tersebut termasuk dalam kategori akses optimal menurut *World Health Organization (WHO)* (2003). Oleh karena itu, kebutuhan air bersih Kota Semarang pada tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.10 Kebutuhan Air Bersih Kota Semarang Tahun 2025-2045 (L/Hari)

Kecamatan	2025	2030	2035	2040	2045
Mijen	12.039.381	14.735.481	17.888.304	20.567.898	21.300.945
Gunungpati	13.570.719	15.448.784	17.387.796	18.687.870	19.659.717
Banyumanik	17.950.343	18.666.723	19.139.483	19.930.096	20.642.052
Gajahmungkur	6.198.006	5.435.335	4.395.768	3.275.950	2.895.379
Semarang Selatan	6.216.945	4.920.972	3.465.869	2.626.976	2.378.167
Candisari	8.662.795	8.035.939	7.112.139	5.849.914	5.322.476
Tembalang	26.561.556	30.788.808	35.497.809	39.703.570	41.853.405
Pedurungan	24.342.735	25.333.614	26.093.118	26.584.364	26.769.394
Genuk	17.399.931	20.260.229	23.410.099	25.361.738	25.975.640
Gayamsari	8.106.050	7.543.082	6.680.503	5.836.926	5.243.257
Semarang Timur	7.110.194	6.091.352	4.830.896	3.881.259	3.350.204
Semarang Utara	13.370.181	12.412.252	11.175.813	10.218.442	9.532.457
Semarang Tengah	5.594.192	4.465.391	3.140.759	2.403.109	1.992.317
Semarang Barat	17.103.441	16.123.588	14.863.075	13.519.630	13.045.711
Tugu	3.973.621	3.769.084	3.263.542	2.896.035	2.537.892
Ngaliyan	18.490.400	19.878.332	21.123.554	21.840.469	22.466.971
Kota Semarang	206.690.490	213.908.966	219.468.527	223.184.247	224.965.984

Kebutuhan air bersih Kota Semarang adalah sebanyak 206.690.490 L/hari pada tahun 2025, 213.908.966 L/hari pada tahun 2030, 219.468.527 L/hari pada tahun 2035, 223.184.247 L/hari pada tahun 2040, dan 224.965.984 L/hari pada tahun 2045.

5.2.3 Kebutuhan Energi Listrik

Kebutuhan energi listrik dilihat dari konsumsi listrik per kapita. Konsumsi listrik per kapita adalah jumlah energi listrik yang digunakan atau dimanfaatkan di suatu daerah, dibagi dengan jumlah penduduknya dalam periode satu tahun. Hal tersebut menunjukkan rata-rata konsumsi energi listrik tiap penduduk. Konsumsi energi listrik Kota Semarang pada tahun 2021 adalah sebesar 2.943.455.470 kWh. Jika dibagi dengan jumlah penduduknya pada tahun 2021, maka diperoleh konsumsi listrik per kapita sebesar 1.777 kWh per kapita. Angka tersebut meningkat sebesar 0,24% dari konsumsi listrik per kapita tahun 2020 (1.773 kWh). Mengacu pada perhitungan pertumbuhan konsumsi listrik per kapita tersebut, maka kebutuhan energi listrik Kota Semarang pada tahun 2025-2045 sebagai berikut:

Tabel 5.11 Kebutuhan Energi Listrik Kota Semarang Tahun 2025-2045

(kWh)

Kecamatan	2025	2030	2035	2040	2045
Mijen	180.006.435	222.977.551	273.915.803	318.660.739	333.863.748
Gunungpati	202.902.195	233.771.263	266.251.736	289.533.254	308.139.703
Banyumanik	268.384.001	282.465.161	293.074.566	308.779.200	323.536.481
Gajahmungkur	92.669.298	82.247.584	67.310.478	50.754.661	45.381.191
Semarang Selatan	92.952.462	74.464.232	53.071.345	40.700.038	37.274.574
Candisari	129.521.518	121.599.961	108.905.078	90.633.370	83.422.676
Tembalang	397.134.300	465.896.761	543.562.487	615.131.842	655.995.991
Pedurungan	363.959.660	383.348.676	399.552.551	411.874.511	419.574.357
Genuk	260.154.544	306.578.126	358.468.650	392.932.244	407.133.316
Gayamsari	121.197.367	114.142.050	102.295.625	90.432.151	82.181.019
Semarang Timur	106.307.847	92.174.434	73.973.408	60.132.780	52.509.957
Semarang Utara	199.903.848	187.822.405	171.130.350	158.315.467	149.408.484
Semarang Tengah	83.641.390	67.570.373	48.093.073	37.231.629	31.226.891
Semarang Barat	255.721.582	243.982.412	227.591.798	209.461.138	204.474.018
Tugu	59.411.469	57.033.840	49.973.195	44.868.597	39.778.054
Ngaliyan	276.458.651	300.799.250	323.455.778	338.376.818	352.139.645
Kota Semarang	3.090.326.566	3.236.874.080	3.360.625.921	3.457.818.437	3.526.040.105

Kebutuhan energi listrik Kota Semarang adalah sebanyak 3.090.326.566 kWh pada tahun 2025, 3.236.874.080 kWh pada tahun 2030, 3.360.625.921 kWh pada tahun 2035, 3.457.818.437 kWh pada tahun 2040, dan 3.526.040.105 kWh pada tahun 2045.

5.2.4 Kebutuhan Pengelolaan Persampahan

Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), total produksi sampah nasional pada tahun 2020 telah mencapai 67,8 juta ton. Hal tersebut berarti ada sekitar 185.753 ton sampah dihasilkan oleh 270 juta penduduk setiap harinya atau setiap penduduk memproduksi sekitar 0,7 kg sampah setiap harinya. Oleh karena itu, timbulan sampah per hari Kota Semarang pada tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.12 Timbulan Sampah Kota Semarang Tahun 2025-2045 (kg/Hari)

Kecamatan	2025	2030	2035	2040	2045
Mijen	70.230	85.957	104.348	119.979	124.256
Gunungpati	79.163	90.118	101.429	109.013	114.682
Banyumanik	104.710	108.889	111.647	116.259	120.412
Gajahmungkur	36.155	31.706	25.642	19.110	16.890
Semarang Selatan	36.266	28.706	20.218	15.324	13.873
Candisari	50.533	46.876	41.487	34.124	31.048
Tembalang	154.942	179.601	207.071	231.604	244.145
Pedurungan	141.999	147.779	152.210	155.075	156.155
Genuk	101.500	118.185	136.559	147.943	151.525
Gayamsari	47.285	44.001	38.970	34.049	30.586
Semarang Timur	41.476	35.533	28.180	22.641	19.543
Semarang Utara	77.993	72.405	65.192	59.608	55.606
Semarang Tengah	32.633	26.048	18.321	14.018	11.622
Semarang Barat	99.770	94.054	86.701	78.865	76.100
Tugu	23.179	21.986	19.037	16.894	14.804
Ngaliyan	107.861	115.957	123.221	127.403	131.057
Kota Semarang	1.205.695	1.247.802	1.280.233	1.301.908	1.312.302

Timbulan sampah Kota Semarang adalah sebesar 1.205.695 kg/hari atau 440.079 ton pada tahun 2025, 1.247.802 kg/hari atau 455.448 ton pada tahun 2030, 1.280.233 kg/hari atau 467.285 ton pada tahun 2035, 1.301.908 kg/hari atau 475.196 ton pada tahun 2040, dan 1.312.302 kg/hari atau 478.990 ton pada tahun 2045.

Timbulan sampah tersebut tentunya membutuhkan prasarana pengelolaan sampah, seperti Tempat Pembuangan Sementara (TPS). Berdasarkan SNI 3242:2008 Tentang Pengelolaan Sampah di Permukiman, terdapat 3 klasifikasi TPS, yaitu sebagai berikut:

Analisis Demografi

Untuk Penyusunan RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045

Tabel 5.13 Klasifikasi TPS

TPS	Kapasitas Pelayanan		Luas Lahan (m ²)	
	Jumlah Penduduk	Volume (m ³)	Minimum	Maksimum
Tipe I (RW)	2.500	100	10	50
Tipe II (Kelurahan)	30.000	300	60	200
Tipe III (Kecamatan)	120.000	1.000	> 200	

Sumber: SNI 3242:2008

Berdasarkan kapasitas pelayanan jumlah penduduknya, kebutuhan TPS Kota Semarang pada tahun 2025-2045 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.14 Kebutuhan TPS Kota Semarang Tahun 2025-2045

Kecamatan	TPS Tipe I					TPS Tipe II					TPS Tipe III				
	2025	2030	2035	2040	2045	2025	2030	2035	2040	2045	2025	2030	2035	2040	2045
Mijen	40	49	60	69	71	3	4	5	6	6	1	1	1	1	1
Gunungpati	45	51	58	62	66	4	4	5	5	5	1	1	1	1	1
Banyumanik	60	62	64	66	69	5	5	5	6	6	1	1	1	1	1
Gajahmungkur	21	18	15	11	10	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0
Semarang Selatan	21	16	12	9	8	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Candisari	29	27	24	19	18	2	2	2	2	1	1	1	0	0	0
Tembalang	89	103	118	132	140	7	9	10	11	12	2	2	2	3	3
Pedurungan	81	84	87	89	89	7	7	7	7	7	2	2	2	2	2
Genuk	58	68	78	85	87	5	6	7	7	7	1	1	2	2	2
Gayamsari	27	25	22	19	17	2	2	2	1	1	1	1	0	0	0
Semarang Timur	24	20	16	13	11	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0
Semarang Utara	45	41	37	34	32	4	3	3	3	3	1	1	1	1	1
Semarang Tengah	19	15	10	8	7	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Semarang Barat	57	54	50	45	43	5	4	4	4	4	1	1	1	1	1
Tugu	13	13	11	10	8	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Ngaliyan	62	66	70	73	75	5	6	6	6	6	1	1	2	2	2
Kota Semarang	689	713	732	744	750	57	59	61	62	62	14	15	15	15	16

Kebutuhan TPS Kota Semarang adalah sebagai berikut: TPS tipe I sebanyak 689 unit pada tahun 2025, 713 unit pada tahun 2030, 732 unit pada tahun 2035, 744 unit pada tahun 2040, dan 750 unit pada tahun 2045; TPS tipe II sebanyak 57 unit pada tahun 2025, 59 unit pada tahun 2030, 61 unit pada tahun 2035, 62 unit pada tahun 2040, dan 62 unit pada tahun 2045; serta TPS tipe III sebanyak 14 unit pada tahun 2025, 15 unit pada tahun 2030, 15 unit pada tahun 2035, 15 unit pada tahun 2040, dan 16 unit pada tahun 2045. Kebutuhan luas lahan minimum untuk TPS-TPS tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.15 Kebutuhan Luas Lahan Minimum TPS Kota Semarang Tahun 2025-2045 (m²)

Kecamatan	TPS Tipe I					TPS Tipe II					TPS Tipe III				
	2025	2030	2035	2040	2045	2025	2030	2035	2040	2045	2025	2030	2035	2040	2045
Mijen	401	491	596	686	710	201	246	298	343	355	167	205	248	286	296
Gunungpati	452	515	580	623	655	226	257	290	311	328	188	215	241	260	273
Banyumanik	598	622	638	664	688	299	311	319	332	344	249	259	266	277	287
Gajahmungkur	207	181	147	109	97	103	91	73	55	48	86	75	61	45	40
Semarang Selatan	207	164	116	88	79	104	82	58	44	40	86	68	48	36	33
Candisari	289	268	237	195	177	144	134	119	97	89	120	112	99	81	74
Tembalang	885	1.026	1.183	1.323	1.395	443	513	592	662	698	369	428	493	551	581
Pedurungan	811	844	870	886	892	406	422	435	443	446	338	352	362	369	372
Genuk	580	675	780	845	866	290	338	390	423	433	242	281	325	352	361
Gayamsari	270	251	223	195	175	135	126	111	97	87	113	105	93	81	73
Semarang Timur	237	203	161	129	112	119	102	81	65	56	99	85	67	54	47
Semarang Utara	446	414	373	341	318	223	207	186	170	159	186	172	155	142	132
Semarang Tengah	186	149	105	80	66	93	74	52	40	33	78	62	44	33	28
Semarang Barat	570	537	495	451	435	285	269	248	225	217	238	224	206	188	181
Tugu	132	126	109	97	85	66	63	54	48	42	55	52	45	40	35
Ngaliyan	616	663	704	728	749	308	331	352	364	374	257	276	293	303	312
TOTAL	6.890	7.130	7.316	7.439	7.499	3.445	3.565	3.658	3.720	3.749	2.871	2.971	3.048	3.100	3.125

Kebutuhan luas lahan minimum TPS Kota Semarang adalah sebagai berikut: TPS tipe I sebanyak 6.890 m² pada tahun 2025, 7.130 m² pada tahun 2030, 7.316 m² pada tahun 2035, 7.439 m² pada tahun 2040, dan 7.499 m² pada tahun 2045; TPS tipe II sebanyak 3.445 m² pada tahun 2025, 3.565 m² pada tahun 2030, 3.658 m² pada tahun 2035, 3.720 m² pada tahun 2040, dan 3.749 m² pada tahun 2045; serta TPS tipe III sebanyak 2.871 m² pada tahun 2025, 2.971 m² pada tahun 2030, 3.048 m² pada tahun 2035, 3.100 m² pada tahun 2040, dan 3.125 m² pada tahun 2045.

5.2.5 Kebutuhan Sarana Kesehatan

Berdasarkan SNI 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan, kebutuhan sarana kesehatan Kota Semarang tahun 2025-2045 dapat dilihat sebagai berikut:

A. Posyandu

Posyandu berfungsi memberikan pelayanan kesehatan untuk anak-anak usia balita. Kebutuhan posyandu Kota Semarang tahun 2025-2045 dan kebutuhan luas lahan minimumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.16 Kebutuhan Posyandu Kota Semarang Tahun 2025-2045 dan
Kebutuhan Luas Lahan Minimumnya (m²)**

Kecamatan	Kebutuhan Posyandu					Kebutuhan Luas Lahan Minimum Posyandu (m ²)				
	2025	2030	2035	2040	2045	2025	2030	2035	2040	2045
Mijen	80	98	119	137	142	4.816	5.894	7.155	8.227	8.520
Gunungpati	90	103	116	125	131	5.428	6.180	6.955	7.475	7.864
Banyumanik	120	124	128	133	138	7.180	7.467	7.656	7.972	8.257
Gajahmungkur	41	36	29	22	19	2.479	2.174	1.758	1.310	1.158
Semarang Selatan	41	33	23	18	16	2.487	1.968	1.386	1.051	951
Candisari	58	54	47	39	35	3.465	3.214	2.845	2.340	2.129
Tembalang	177	205	237	265	279	10.625	12.316	14.199	15.881	16.741
Pedurungan	162	169	174	177	178	9.737	10.133	10.437	10.634	10.708
Genuk	116	135	156	169	173	6.960	8.104	9.364	10.145	10.390
Gayamsari	54	50	45	39	35	3.242	3.017	2.672	2.335	2.097
Semarang Timur	47	41	32	26	22	2.844	2.437	1.932	1.553	1.340
Semarang Utara	89	83	75	68	64	5.348	4.965	4.470	4.087	3.813
Semarang Tengah	37	30	21	16	13	2.238	1.786	1.256	961	797
Semarang Barat	114	107	99	90	87	6.841	6.449	5.945	5.408	5.218
Tugu	26	25	22	19	17	1.589	1.508	1.305	1.158	1.015
Ngaliyan	123	133	141	146	150	7.396	7.951	8.449	8.736	8.987
Kota Semarang	1.378	1.426	1.463	1.488	1.500	82.676	85.564	87.787	89.274	89.986

Kebutuhan posyandu Kota Semarang adalah sebanyak 1.378 unit pada tahun 2025, 1.426 unit pada tahun 2030, 1.463 unit pada tahun 2035, 1.488 unit pada tahun 2040, dan 1.500 unit pada tahun 2045. Kebutuhan luas lahan minimum posyandu Kota Semarang adalah sebesar 82.676 m² pada tahun 2025, 85.564 m² pada tahun 2030, 87.787 m² pada tahun 2035, 89.274 m² pada tahun 2040, dan 89.986 m² pada tahun 2045.

B. Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak (BKIA) atau Klinik Bersalin

Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak (BKIA) atau klinik bersalin berfungsi melayani ibu, baik sebelum, pada saat, maupun sesudah melahirkan serta melayani anak usia sampai dengan 6 tahun. Kebutuhan BKIA atau klinik bersalin Kota Semarang tahun 2025-2045 dan kebutuhan luas lahan minimumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.17 Kebutuhan BKIA atau Klinik Bersalin Kota Semarang
Tahun 2025-2045 dan Kebutuhan Luas Lahan Minimumnya (m²)**

Kecamatan	Kebutuhan BKIA atau Klinik Bersalin					Kebutuhan Luas Lahan Minimum BKIA atau Klinik Bersalin (m ²)				
	2025	2030	2035	2040	2045	2025	2030	2035	2040	2045
Mijen	3	4	5	6	6	10.033	12.280	14.907	17.140	17.751
Gunungpati	4	4	5	5	5	11.309	12.874	14.490	15.573	16.383
Banyumanik	5	5	5	6	6	14.959	15.556	15.950	16.608	17.202
Gajahmungkur	2	2	1	1	1	5.165	4.529	3.663	2.730	2.413
Semarang Selatan	2	1	1	1	1	5.181	4.101	2.888	2.189	1.982
Candisari	2	2	2	2	1	7.219	6.697	5.927	4.875	4.435
Tembalang	7	9	10	11	12	22.135	25.657	29.582	33.086	34.878
Pedurungan	7	7	7	7	7	20.286	21.111	21.744	22.154	22.308
Genuk	5	6	7	7	7	14.500	16.884	19.508	21.135	21.646
Gayamsari	2	2	2	2	1	6.755	6.286	5.567	4.864	4.369
Semarang Timur	2	2	1	1	1	5.925	5.076	4.026	3.234	2.792
Semarang Utara	4	3	3	3	3	11.142	10.344	9.313	8.515	7.944
Semarang Tengah	2	1	1	1	1	4.662	3.721	2.617	2.003	1.660
Semarang Barat	5	4	4	4	4	14.253	13.436	12.386	11.266	10.871
Tugu	1	1	1	1	1	3.311	3.141	2.720	2.413	2.115
Ngaliyan	5	6	6	6	6	15.409	16.565	17.603	18.200	18.722
Kota Semarang	57	59	61	62	62	172.242	178.257	182.890	185.987	187.472

Kebutuhan BKIA atau klinik bersalin Kota Semarang adalah sebanyak 57 unit pada tahun 2025, 59 unit pada tahun 2030, 61 unit pada tahun 2035, 62 pada tahun 2040, dan 62 unit pada tahun 2045. Kebutuhan luas lahan minimum BKIA atau klinik bersalin Kota Semarang adalah sebesar 172.242 m² pada tahun 2025, 178.257 m² pada tahun 2030, 182.890 m² pada tahun 2035, 185.987 m² pada tahun 2040, dan 187.472 m² pada tahun 2045.

C. Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan

Puskesmas pembantu dan balai pengobatan lingkungan berfungsi sebagai unit pelayanan kesehatan sederhana yang memberikan pelayanan kesehatan terbatas dan membantu pelaksanaan kegiatan puskesmas dalam lingkup wilayah yang lebih kecil. Kebutuhan puskesmas pembantu dan balai pengobatan lingkungan Kota Semarang tahun 2025-2045 dan kebutuhan luas lahan minimumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.18 Kebutuhan Puskesmas Pembantu dan
Balai Pengobatan Lingkungan Kota Semarang Tahun 2025-2045
dan Kebutuhan Luas Lahan Minimumnya (m²)**

Kecamatan	Kebutuhan Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan					Kebutuhan Luas Lahan Minimum Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan (m ²)				
	2025	2030	2035	2040	2045	2025	2030	2035	2040	2045
Mijen	3	4	5	6	6	1.003	1.228	1.491	1.714	1.775
Gunungpati	4	4	5	5	5	1.131	1.287	1.449	1.557	1.638
Banyumanik	5	5	5	6	6	1.496	1.556	1.595	1.661	1.720
Gajahmungkur	2	2	1	1	1	517	453	366	273	241
Semarang Selatan	2	1	1	1	1	518	410	289	219	198
Candisari	2	2	2	2	1	722	670	593	487	444
Tembalang	7	9	10	11	12	2.213	2.566	2.958	3.309	3.488
Pedurungan	7	7	7	7	7	2.029	2.111	2.174	2.215	2.231
Genuk	5	6	7	7	7	1.450	1.688	1.951	2.113	2.165
Gayamsari	2	2	2	2	1	676	629	557	486	437
Semarang Timur	2	2	1	1	1	593	508	403	323	279
Semarang Utara	4	3	3	3	3	1.114	1.034	931	852	794
Semarang Tengah	2	1	1	1	1	466	372	262	200	166
Semarang Barat	5	4	4	4	4	1.425	1.344	1.239	1.127	1.087
Tugu	1	1	1	1	1	331	314	272	241	211
Ngaliyan	5	6	6	6	6	1.541	1.657	1.760	1.820	1.872
Kota Semarang	57	59	61	62	62	17.224	17.826	18.289	18.599	18.747

Kebutuhan puskesmas pembantu dan balai pengobatan lingkungan Kota Semarang adalah sebanyak 57 unit pada tahun 2025, 59 unit pada tahun 2030, 61 unit pada tahun 2035, 62 pada tahun 2040, dan 62 unit pada tahun 2045. Kebutuhan luas lahan minimum puskesmas pembantu dan balai pengobatan lingkungan Kota Semarang adalah sebesar 17.224 m² pada tahun 2025, 17.826 m² pada tahun 2030, 18.289 m² pada tahun 2035, 18.599 m² pada tahun 2040, dan 18.747 m² pada tahun 2045.

D. Puskesmas dan Balai Pengobatan

Puskesmas dan balai pengobatan berfungsi sebagai sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memberikan pelayanan kepada penduduk dalam penyembuhan penyakit serta melaksanakan program pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit di wilayah kerjanya. Kebutuhan puskesmas dan balai pengobatan Kota Semarang tahun 2025-2045 dan kebutuhan luas lahan minimumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.19 Kebutuhan Puskesmas dan Balai Pengobatan Kota Semarang
Tahun 2025-2045 dan Kebutuhan Luas Lahan Minimumnya (m²)**

Kecamatan	Kebutuhan Puskesmas dan Balai Pengobatan					Kebutuhan Luas Lahan Minimum Puskesmas dan Balai Pengobatan (m ²)				
	2025	2030	2035	2040	2045	2025	2030	2035	2040	2045
Mijen	1	1	1	1	1	836	1.023	1.242	1.428	1.479
Gunungpati	1	1	1	1	1	942	1.073	1.207	1.298	1.365
Banyumanik	1	1	1	1	1	1.247	1.296	1.329	1.384	1.433
Gajahmungkur	0	0	0	0	0	430	377	305	227	201
Semarang Selatan	0	0	0	0	0	432	342	241	182	165
Candisari	1	1	0	0	0	602	558	494	406	370
Tembalang	2	2	2	3	3	1.845	2.138	2.465	2.757	2.906
Pedurungan	2	2	2	2	2	1.690	1.759	1.812	1.846	1.859
Genuk	1	1	2	2	2	1.208	1.407	1.626	1.761	1.804
Gayamsari	1	1	0	0	0	563	524	464	405	364
Semarang Timur	0	0	0	0	0	494	423	335	270	233
Semarang Utara	1	1	1	1	1	928	862	776	710	662
Semarang Tengah	0	0	0	0	0	388	310	218	167	138
Semarang Barat	1	1	1	1	1	1.188	1.120	1.032	939	906
Tugu	0	0	0	0	0	276	262	227	201	176
Ngaliyan	1	1	1	2	2	1.284	1.380	1.467	1.517	1.560
Kota Semarang	14	15	15	15	16	14.354	14.855	15.241	15.499	15.623

Kebutuhan puskesmas dan balai pengobatan Kota Semarang adalah sebanyak 14 unit pada tahun 2025, 15 unit pada tahun 2030, 15 unit pada tahun 2035, 15 pada tahun 2040, dan 16 unit pada tahun 2045. Kebutuhan luas lahan minimum puskesmas dan balai pengobatan Kota Semarang adalah sebesar 14.354 m² pada tahun 2025, 14.855 m² pada tahun 2030, 15.241 m² pada tahun 2035, 15.499 m² pada tahun 2040, dan 15.623 m² pada tahun 2045.

E. Apotek

Apotek berfungsi untuk melayani penduduk dalam pengadaan obat-obatan, baik untuk penyembuhan maupun pencegahan. Kebutuhan apotek Kota Semarang tahun 2025-2045 dan kebutuhan luas lahan minimumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.20 Kebutuhan Apotek Kota Semarang Tahun 2025-2045 dan
Kebutuhan Luas Lahan Minimumnya (m²)**

Kecamatan	Kebutuhan Apotek					Kebutuhan Luas Lahan Minimum Apotek (m ²)				
	2025	2030	2035	2040	2045	2025	2030	2035	2040	2045
Mijen	3	4	5	6	6	836	1.023	1.242	1.428	1.479
Gunungpati	4	4	5	5	5	942	1.073	1.207	1.298	1.365
Banyumanik	5	5	5	6	6	1.247	1.296	1.329	1.384	1.433
Gajahmungkur	2	2	1	1	1	430	377	305	227	201
Semarang Selatan	2	1	1	1	1	432	342	241	182	165
Candisari	2	2	2	2	1	602	558	494	406	370
Tembalang	7	9	10	11	12	1.845	2.138	2.465	2.757	2.906
Pedurungan	7	7	7	7	7	1.690	1.759	1.812	1.846	1.859
Genuk	5	6	7	7	7	1.208	1.407	1.626	1.761	1.804
Gayamsari	2	2	2	2	1	563	524	464	405	364
Semarang Timur	2	2	1	1	1	494	423	335	270	233
Semarang Utara	4	3	3	3	3	928	862	776	710	662
Semarang Tengah	2	1	1	1	1	388	310	218	167	138
Semarang Barat	5	4	4	4	4	1.188	1.120	1.032	939	906
Tugu	1	1	1	1	1	276	262	227	201	176
Ngaliyan	5	6	6	6	6	1.284	1.380	1.467	1.517	1.560
Kota Semarang	57	59	61	62	62	14.354	14.855	15.241	15.499	15.623

Kebutuhan apotek Kota Semarang adalah sebanyak 57 unit pada tahun 2025, 59 unit pada tahun 2030, 61 unit pada tahun 2035, 62 pada tahun 2040, dan 62 unit pada tahun 2045. Kebutuhan luas lahan minimum apotek Kota Semarang adalah sebesar 14.354 m² pada tahun 2025, 14.855 m² pada tahun 2030, 15.241 m² pada tahun 2035, 15.499 m² pada tahun 2040, dan 15.623 m² pada tahun 2045.

5.2.6 Kebutuhan Sarana Pendidikan

Berdasarkan SNI 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan, kebutuhan sarana pendidikan Kota Semarang tahun 2025-2045 dapat dilihat sebagai berikut:

A. Taman Kanak-Kanak (TK)

Taman Kanak-Kanak (TK) merupakan penyelenggaraan kegiatan belajar dan mengajar pada tingkatan prabelajar dengan lebih menekankan pada kegiatan bermain sebesar 75%, selebihnya bersifat pengenalan. Kebutuhan TK Kota Semarang tahun 2025-2045 dan kebutuhan luas lahan minimumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.21 Kebutuhan TK Kota Semarang Tahun 2025-2045 dan
Kebutuhan Luas Lahan Minimumnya (m²)**

Kecamatan	Kebutuhan TK					Kebutuhan Luas Lahan Minimum TK (m ²)				
	2025	2030	2035	2040	2045	2025	2030	2035	2040	2045
Mijen	80	98	119	137	142	40.131	49.118	59.628	68.560	71.003
Gunungpati	90	103	116	125	131	45.236	51.496	57.959	62.293	65.532
Banyumanik	120	124	128	133	138	59.834	62.222	63.798	66.434	68.807
Gajahmungkur	41	36	29	22	19	20.660	18.118	14.653	10.920	9.651
Semarang Selatan	41	33	23	18	16	20.723	16.403	11.553	8.757	7.927
Candisari	58	54	47	39	35	28.876	26.786	23.707	19.500	17.742
Tembalang	177	205	237	265	279	88.539	102.629	118.326	132.345	139.511
Pedurungan	162	169	174	177	178	81.142	84.445	86.977	88.615	89.231
Genuk	116	135	156	169	173	58.000	67.534	78.034	84.539	86.585
Gayamsari	54	50	45	39	35	27.020	25.144	22.268	19.456	17.478
Semarang Timur	47	41	32	26	22	23.701	20.305	16.103	12.938	11.167
Semarang Utara	89	83	75	68	64	44.567	41.374	37.253	34.061	31.775
Semarang Tengah	37	30	21	16	13	18.647	14.885	10.469	8.010	6.641
Semarang Barat	114	107	99	90	87	57.011	53.745	49.544	45.065	43.486
Tugu	26	25	22	19	17	13.245	12.564	10.878	9.653	8.460
Ngaliyan	123	133	141	146	150	61.635	66.261	70.412	72.802	74.890
Kota Semarang	1.378	1.426	1.463	1.488	1.500	688.968	713.030	731.562	743.947	749.887

Kebutuhan TK Kota Semarang adalah sebanyak 1.378 unit pada tahun 2025, 1.426 unit pada tahun 2030, 1.463 unit pada tahun 2035, 1.488 pada tahun 2040, dan 1.500 unit pada tahun 2045. Kebutuhan luas lahan minimum TK Kota Semarang adalah sebesar 688.968 m² pada tahun 2025, 713.030 m² pada tahun 2030, 731.562 m² pada tahun 2035, 743.947 m² pada tahun 2040, dan 749.887 m² pada tahun 2045.

B. Sekolah Dasar (SD)

Sekolah Dasar (SD) merupakan salah satu bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan program belajar selama 6 tahun. Kebutuhan SD Kota Semarang tahun 2025-2045 dan kebutuhan luas lahan minimumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.22 Kebutuhan SD Kota Semarang Tahun 2025-2045 dan
Kebutuhan Luas Lahan Minimumnya (m²)**

Kecamatan	Kebutuhan SD					Kebutuhan Luas Lahan Minimum SD (m ²)				
	2025	2030	2035	2040	2045	2025	2030	2035	2040	2045
Mijen	63	77	93	107	111	125.410	153.495	186.336	214.249	221.885
Gunungpati	71	80	91	97	102	141.362	160.925	181.123	194.665	204.789
Banyumanik	93	97	100	104	108	186.983	194.445	199.370	207.605	215.021
Gajahmungkur	32	28	23	17	15	64.563	56.618	45.789	34.124	30.160
Semarang Selatan	32	26	18	14	12	64.760	51.260	36.103	27.364	24.773
Candisari	45	42	37	30	28	90.237	83.708	74.085	60.937	55.442
Tembalang	138	160	185	207	218	276.683	320.717	369.769	413.579	435.973
Pedurungan	127	132	136	138	139	253.570	263.892	271.803	276.920	278.848
Genuk	91	106	122	132	135	181.249	211.044	243.855	264.185	270.580
Gayamsari	42	39	35	30	27	84.438	78.574	69.589	60.801	54.617
Semarang Timur	37	32	25	20	17	74.065	63.452	50.322	40.430	34.898
Semarang Utara	70	65	58	53	50	139.273	129.294	116.415	106.442	99.296
Semarang Tengah	29	23	16	13	10	58.273	46.514	32.716	25.032	20.753
Semarang Barat	89	84	77	70	68	178.161	167.954	154.824	140.829	135.893
Tugu	21	20	17	15	13	41.392	39.261	33.995	30.167	26.436
Ngaliyan	96	104	110	114	117	192.608	207.066	220.037	227.505	234.031
Kota Semarang	1.077	1.114	1.143	1.162	1.172	2.153.026	2.228.218	2.286.130	2.324.836	2.343.396

Kebutuhan SD Kota Semarang adalah sebanyak 1.077 unit pada tahun 2025, 1.114 unit pada tahun 2030, 1.143 unit pada tahun 2035, 1.162 pada tahun 2040, dan 1.172 unit pada tahun 2045. Kebutuhan luas lahan minimum SD Kota Semarang adalah sebesar 2.153.026 m² pada tahun 2025, 2.228.218 m² pada tahun 2030, 2.286.130 m² pada tahun 2035, 2.324.836 m² pada tahun 2040, dan 2.343.396 m² pada tahun 2045.

C. Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Sekolah Menengah Pertama (SMP) merupakan salah satu bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan program belajar selama 3 tahun setelah SD. Kebutuhan SMP Kota Semarang tahun 2025-2045 dan kebutuhan luas lahan minimumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.23 Kebutuhan SMP Kota Semarang Tahun 2025-2045 dan
Kebutuhan Luas Lahan Minimumnya (m²)**

Kecamatan	Kebutuhan SMP					Kebutuhan Luas Lahan Minimum SMP (m ²)				
	2025	2030	2035	2040	2045	2025	2030	2035	2040	2045
Mijen	21	26	31	36	37	188.115	230.242	279.505	321.373	332.827
Gunungpati	24	27	30	32	34	212.042	241.387	271.684	291.998	307.183
Banyumanik	31	32	33	35	36	280.474	291.668	299.054	311.408	322.532
Gajahmungkur	11	9	8	6	5	96.844	84.927	68.684	51.187	45.240
Semarang Selatan	11	9	6	5	4	97.140	76.890	54.154	41.047	37.159
Candisari	15	14	12	10	9	135.356	125.562	111.127	91.405	83.164
Tembalang	46	53	62	69	73	415.024	481.075	554.653	620.368	653.959
Pedurungan	42	44	45	46	46	380.355	395.838	407.705	415.381	418.272
Genuk	30	35	41	44	45	271.874	316.566	365.783	396.277	405.869
Gayamsari	14	13	12	10	9	126.657	117.861	104.383	91.202	81.926
Semarang Timur	12	11	8	7	6	111.097	95.177	75.483	60.645	52.347
Semarang Utara	23	22	19	18	17	208.909	193.941	174.622	159.663	148.945
Semarang Tengah	10	8	5	4	3	87.409	69.772	49.074	37.549	31.130
Semarang Barat	30	28	26	23	23	267.241	251.931	232.236	211.244	203.839
Tugu	7	7	6	5	4	62.088	58.892	50.993	45.251	39.655
Ngaliyan	32	35	37	38	39	288.912	310.599	330.056	341.257	351.046
Kota Semarang	359	371	381	387	391	3.229.539	3.342.328	3.429.196	3.487.254	3.515.094

Kebutuhan SMP Kota Semarang adalah sebanyak 359 unit pada tahun 2025, 371 unit pada tahun 2030, 381 unit pada tahun 2035, 387 pada tahun 2040, dan 391 unit pada tahun 2045. Kebutuhan luas lahan minimum SMP Kota Semarang adalah sebesar 3.229.539 m² pada tahun 2025, 3.342.328 m² pada tahun 2030, 3.429.196 m² pada tahun 2035, 3.487.254 m² pada tahun 2040, dan 3.515.094 m² pada tahun 2045.

D. Sekolah Menengah Atas (SMA)

Sekolah Menengah Atas (SMA) merupakan satuan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan peningkatan keterampilan siswa. Kebutuhan SMA Kota Semarang tahun 2025-2045 dan kebutuhan luas lahan minimumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.24 Kebutuhan SMA Kota Semarang Tahun 2025-2045 dan
Kebutuhan Luas Lahan Minimumnya (m²)**

Kecamatan	Kebutuhan SMA					Kebutuhan Luas Lahan Minimum SMA (m ²)				
	2025	2030	2035	2040	2045	2025	2030	2035	2040	2045
Mijen	21	26	31	36	37	261.271	319.780	388.201	446.352	462.260
Gunungpati	24	27	30	32	34	294.503	335.260	377.339	405.553	426.643
Banyumanik	31	32	33	35	36	389.547	405.094	415.353	432.511	447.961
Gajahmungkur	11	9	8	6	5	134.505	117.954	95.394	71.093	62.834
Semarang Selatan	11	9	6	5	4	134.916	106.792	75.214	57.009	51.610
Candisari	15	14	12	10	9	187.995	174.391	154.343	126.951	115.505
Tembalang	46	53	62	69	73	576.423	668.160	770.352	861.623	908.277
Pedurungan	42	44	45	46	46	528.271	549.775	566.257	576.918	580.933
Genuk	30	35	41	44	45	377.603	439.675	508.032	550.385	563.707
Gayamsari	14	13	12	10	9	175.913	163.695	144.976	126.669	113.786
Semarang Timur	12	11	8	7	6	154.301	132.191	104.837	84.229	72.704
Semarang Utara	23	22	19	18	17	290.151	269.363	242.531	221.754	206.868
Semarang Tengah	10	8	5	4	3	121.402	96.905	68.159	52.151	43.236
Semarang Barat	30	28	26	23	23	371.168	349.904	322.549	293.395	283.110
Tugu	7	7	6	5	4	86.233	81.794	70.823	62.848	55.076
Ngaliyan	32	35	37	38	39	401.267	431.387	458.410	473.969	487.564
Kota Semarang	359	371	381	387	391	4.485.471	4.642.122	4.762.772	4.843.408	4.882.074

Kebutuhan SMA Kota Semarang adalah sebanyak 359 unit pada tahun 2025, 371 unit pada tahun 2030, 381 unit pada tahun 2035, 387 pada tahun 2040, dan 391 unit pada tahun 2045. Kebutuhan luas lahan minimum SMA Kota Semarang adalah sebesar 4.485.471 m² pada tahun 2025, 4.642.122 m² pada tahun 2030, 4.762.772 m² pada tahun 2035, 4.843.408 m² pada tahun 2040, dan 4.882.074 m² pada tahun 2045.

5.2.7 Kebutuhan Sarana Perdagangan dan Niaga

Berdasarkan SNI 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan, kebutuhan sarana perdagangan Kota Semarang tahun 2025-2045 dapat dilihat sebagai berikut:

A. Pusat Pertokoan dan/atau Pasar Lingkungan

Pusat pertokoan dan/atau pasar lingkungan menjual keperluan sehari-hari termasuk sayur, daging, ikan, buah-buahan, beras, tepung, bahan-bahan pakaian, pakaian, barang-barang kelontong, alat-alat pendidikan, alat-alat rumah tangga, serta pelayanan jasa. Kebutuhan pusat pertokoan dan/atau pasar lingkungan Kota Semarang Tahun 2025-2045 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.25 Kebutuhan Pusat Pertokoan dan/atau Pasar Lingkungan
Kota Semarang Tahun 2025-2045 serta
Kebutuhan Luas Lahan Minimumnya (m²)**

Kecamatan	Kebutuhan Pusat Pertokoan dan/atau Pasar Lingkungan					Kebutuhan Luas Lahan Minimum Pusat Pertokoan dan/atau Pasar Lingkungan (m ²)				
	2025	2030	2035	2040	2045	2025	2030	2035	2040	2045
Mijen	3	4	5	6	6	33.443	40.932	49.690	57.133	59.169
Gunungpati	4	4	5	5	5	37.696	42.913	48.299	51.911	54.610
Banyumanik	5	5	5	6	6	49.862	51.852	53.165	55.361	57.339
Gajahmungkur	2	2	1	1	1	17.217	15.098	12.210	9.100	8.043
Semarang Selatan	2	1	1	1	1	17.269	13.669	9.627	7.297	6.606
Candisari	2	2	2	2	1	24.063	22.322	19.756	16.250	14.785
Tembalang	7	9	10	11	12	73.782	85.524	98.605	110.288	116.259
Pedurungan	7	7	7	7	7	67.619	70.371	72.481	73.845	74.359
Genuk	5	6	7	7	7	48.333	56.278	65.028	70.449	72.155
Gayamsari	2	2	2	2	1	22.517	20.953	18.557	16.214	14.565
Semarang Timur	2	2	1	1	1	19.751	16.920	13.419	10.781	9.306
Semarang Utara	4	3	3	3	3	37.139	34.478	31.044	28.385	26.479
Semarang Tengah	2	1	1	1	1	15.539	12.404	8.724	6.675	5.534
Semarang Barat	5	4	4	4	4	47.510	44.788	41.286	37.555	36.238
Tugu	1	1	1	1	1	11.038	10.470	9.065	8.045	7.050
Ngaliyan	5	6	6	6	6	51.362	55.218	58.677	60.668	62.408
Kota Semarang	57	59	61	62	62	574.140	594.192	609.635	619.956	624.906

Kebutuhan pusat pertokoan dan/atau pasar lingkunga Kota Semarang adalah sebanyak 57 unit pada tahun 2025, 59 unit pada tahun 2030, 61 unit pada tahun 2035, 62 pada tahun 2040, dan 62 unit pada tahun 2045. Kebutuhan luas lahan minimum pusat pertokoan dan/atau pasar lingkunga Kota Semarang adalah sebesar 574.140 m² pada tahun 2025, 594.192 m² pada tahun 2030, 609.635 m² pada tahun 2035, 619.956 m² pada tahun 2040, dan 624.906 m² pada tahun 2045.

B. Pusat Perbelanjaan dan Niaga

Pusat perbelanjaan dan niaga selain menjual kebutuhan sehari-hari, pakaian, barang kelontong, dan elektronik, juga untuk pelayanan jasa, seperti per Bengkelan, reparasi, tempat hiburan, serta kegiatan niaga lainnya, seperti kantor, bank, industri kecil, dan lain-lain. Kebutuhan pusat perbelanjaan dan niaga Kota Semarang Tahun 2025-2045 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.26 Kebutuhan Pusat Perbelanjaan dan Niaga serta Kebutuhan Luas Lahan Minimumnya (m²)

Kecamatan	Kebutuhan Pusat Perbelanjaan dan Niaga					Kebutuhan Luas Lahan Minimum Pusat Perbelanjaan dan Niaga (m ²)				
	2025	2030	2035	2040	2045	2025	2030	2035	2040	2045
Mijen	1	1	1	1	1	30.098	36.839	44.721	51.420	53.252
Gunungpati	1	1	1	1	1	33.927	38.622	43.469	46.720	49.149
Banyumanik	1	1	1	1	1	44.876	46.667	47.849	49.825	51.605
Gajahmungkur	0	0	0	0	0	15.495	13.588	10.989	8.190	7.238
Semarang Selatan	0	0	0	0	0	15.542	12.302	8.665	6.567	5.945
Candisari	1	1	0	0	0	21.657	20.090	17.780	14.625	13.306
Tembalang	2	2	2	3	3	66.404	76.972	88.745	99.259	104.634
Pedurungan	2	2	2	2	2	60.857	63.334	65.233	66.461	66.923
Genuk	1	1	2	2	2	43.500	50.651	58.525	63.404	64.939
Gayamsari	1	1	0	0	0	20.265	18.858	16.701	14.592	13.108
Semarang Timur	0	0	0	0	0	17.775	15.228	12.077	9.703	8.376
Semarang Utara	1	1	1	1	1	33.425	31.031	27.940	25.546	23.831
Semarang Tengah	0	0	0	0	0	13.985	11.163	7.852	6.008	4.981
Semarang Barat	1	1	1	1	1	42.759	40.309	37.158	33.799	32.614
Tugu	0	0	0	0	0	9.934	9.423	8.159	7.240	6.345
Ngaliyan	1	1	1	2	2	46.226	49.696	52.809	54.601	56.167
Kota Semarang	14	15	15	15	16	516.726	534.772	548.671	557.961	562.415

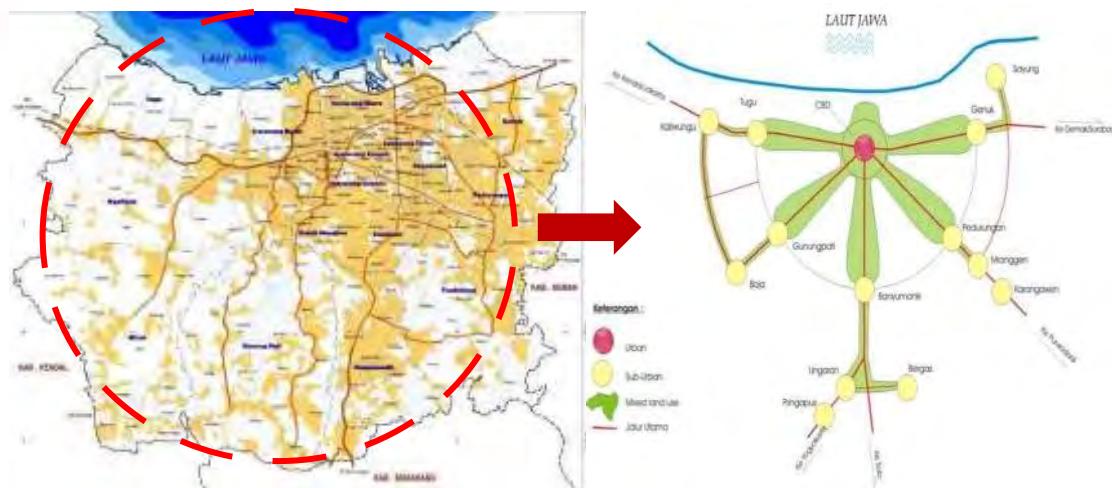
Kebutuhan pusat perbelanjaan dan niaga Kota Semarang adalah sebanyak 14 unit pada tahun 2025, 15 unit pada tahun 2030, 15 unit pada tahun 2035, 15 pada tahun 2040, dan 16 unit pada tahun 2045. Kebutuhan luas lahan minimum pusat pertokoan dan/atau pasar lingkunga Kota Semarang adalah sebesar 516.726 m² pada tahun 2025, 534.772 m² pada tahun 2030, 548.671 m² pada tahun 2035, 557.961 m² pada tahun 2040, dan 562.415 m² pada tahun 2045.

5.3 Implikasi Kebijakan

5.3.1 Kebijakan Infrastruktur Kecamatan

Berdasarkan hasil proyeksi jumlah penduduk per Kecamatan terjadi pola persebaran penduduk yang cenderung beralih ke daerah pinggiran, sehingga menyebabkan daerah pinggiran atau perbatasan dengan Kabupaten sekitar menjadi lebih tinggi jumlah penduduknya. Kecenderungan perubahan pola persebaran penduduk di Kota Semarang yang diproyeksikan akan mulai terjadi di tahun 2025 hingga 2045 tersebut selaras dengan terori perubahan pola ruang

yang digagas oleh Von Thunen tentang pola penggunaan lahan yang didasarkan pada jarak.



Gambar 5. 3. Pola Perkembangan Perumahan dan Permukiman Kota Semarang berdasarkan Proyeksi Persebaran Penduduk di Kecamatan

Von Thunen menyebutkan bahwa terdapat kecenderungan perkembangan di wilayah studi bahwa pada pusat kota mempunyai harga lahan yang tinggi sehingga mempunyai spesifikasi pemanfaatan yang lebih tinggi tingkat ekonomisnya, seperti perdagangan dan jasa yang mempunyai jangkauan pelayanan tingkat regional. Sehingga atas dasar itulah mengapa di pusat kota harga lahan semakin tinggi, dan ini tidak menguntungkan apabila lahan di pusat kota diperuntukkan sebagai permukiman. Akibatnya banyak muncul permukiman-permukiman baru di daerah pinggiran yang mempunyai harga lahan relatif murah. Kecenderungan perkembangan fisik di Kota Semarang, pada hakikatnya tercermin dari bentuk struktur keruangan wilayah yang terbentuk karena posisinya secara geografis dan karakteristik tempatnya. Kota Semarang secara umum dan garis besar, pola kecenderungan perkembangan fisik perumahan dan kawasan permukimannya mengikuti kondisi prasarana khususnya kondisi jalur jalan.

Berdasarkan pada proyeksi pola persebaran penduduk yang terjadi mobilisasi di daerah pinggiran kota, maka perlu diperhatikan penyediaan hunian dan pembukaan lahan perumahan baru di daerah-daerah pinggiran kota. Pada kecamatan-kecamatan yang diproyeksi akan terus mengalami pertambahan

jumlah penduduk seperti Kecamatan Mijen, Gunungpati, Banyumanik, Tembalang, Pedurungan, Genuk, dan Ngaliyan, tentunya akan diikuti dengan tentunya akan terus membutuhkan penambahan hunian berserta sarana dan prasarana sehingga langkah pertama yang perlu diambil adalah kebijakan penataan ruang dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, kebijakan pemenuhan infrastruktur jalan dalam kondisi baik, kebijakan penataan sistem drainase agar tidak menimbulkan effect negative berkelanjutan seperti adanya banjir bandang, dan pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar seperti sarana pendidikan dasar (SD, SMP, SMA), sarana kesehatan (puskesmas, apotik, poliklinik) yang memadai dan mudah diakses.

5.3.2 Kebijakan Pendukung Kesejahteraan Penduduk Usia Tua (Lansia)

Memperhatikan hasil proyeksi pertumbuhan penduduk dimana mulai tahun 2040 kondisi jumlah penduduk Kota Semarang akan cenderung didominasi oleh penduduk usia tua (lansia) sehingga perlu adanya kebijakan pendukung untuk yang dapat mendorong kesejahteraan penduduk di usia tua kedepannya khususnya dalam desain infrastruktur kota. Pertumbuhan penduduk yang didominasi oleh penduduk laki-laki saat ini telah dialami oleh mayoritas negara di Eropa. Di negara-negara Eropa saat ini seperti Jerman, penduduk usia lansia mewakili lebih dari 20% total populasi, dimana keterbatasan mobilitas dan aksesibilitas masih menjadi aspek utama yang harus diatasi, kondisi tersebut yang tentunya juga akan dialami Kota Semarang ke depannya khususnya memasuki tahun 2040.

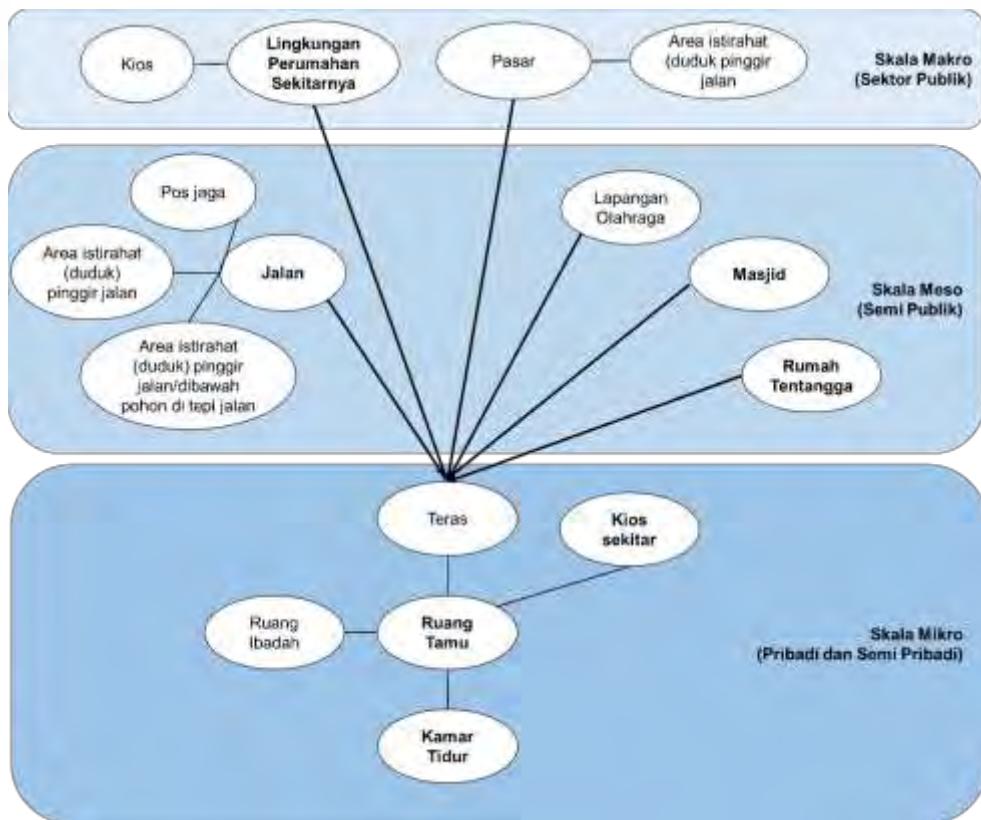
Aspek utama yang perlu diperhatikan dalam mendukung kesejahteraan lansia adalah pemenuhan persediaan perumahan yang mampu menyediakan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan. WHO (2018) merekomendasikan bahwa pola desain perumahan sosial dengan konsep multikeluarga atau multigenerasi menjadi salah satu solusi untuk menciptakan perumahan yang layak bagi lansia. Beberapa aspek seperti Kesesuaian, Prioritas, dan Kelayakan menjadi tolok ukur yang harus dipenuhi dalam penyediaan hunian bagi lansia. Kemudahan mobilitas di area perumahan untuk memudahkan evakuasi jika terjadi bencana seperti kebakaran atau kedaruratan medis juga menjadi aspek

krusial secara teknis yang perlu diperhatikan dalam penyediaan perumahan di Kota Semarang. Penekanan 3 aspek (Kesesuaian, Prioritas, dan Kelayakan) untuk lansia harus mulai dijadikan tolok ukur utama dalam review pendirian perumahan baru di Kota Semarang.

Selain kebijakan terkait hunian yang perlu diperhatikan kebijakan ruang terbuka hijau, kebijakan sarana transportasi dan kebijakan sarana untuk berkumpul yang nyaman dan mudah diakses oleh lansia juga menjadi fokus yang harus mulai di perhatikan dalam pembangunan infrastruktur Kota Semarang kedepannya. Menurut Wijayanti dkk (2015) beberapa terdapat arsitektur yang perlu diperhatikan dalam mendesain hunian dan lingkungan yang nyaman bagi lansia adalah sebagai berikut:

- A. Skala mikro, mengkonvergensi ruang-ruang dalam rumah, yang dikelompokkan berdasarkan sifat ruang
 - Ruang pribadi: kamar tidur dan ruang ibadah
 - Ruang semi privat: ruang keluarga, ruang tamu, dan teras
- B. Skala Meso, mengkonvergensi ruang-ruang luar rumah dalam lingkungan perumahan, yang dikelompokkan dalam ruang alam:
 - Ruang semi publik: jalan raya, lapangan olah raga, rumah tetangga
- C. Skala Mikro, termasuk ruang alam:
 - Ruang publik: pasar, kawasan perumahan, kios-kios di kawasan perumahan.

Gambaran kondisi ideal yang perlu diperhatikan dalam mendesain Kawasan hunian atau perumahan yang ramah lansia dapat dilihat sebagai berikut.



Gambar 5. 4. Desain Skala Spasial dan Ruang Alam untuk Mendukung Hunian Ramah Lansia

5.3.3 Kebijakan Sektor Kesehatan

Kesehatan juga menjadi salah satu sektor yang perlu di perhatikan selama 20 tahun yang akan datang, selain karena sektor kesehatan merupakan pelayanan dasar, sektor kesehatan juga menjadi hal yang urgent atau penting untuk menunjang kesejahteraan hidup lansia. Prioritas pada perhatian kesehatan lansia menjadi pilar untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Program-program kesehatan juga perlu didesain untuk memberikan fokus perhatian pada kesehatan masyarakat usia lanjut, mengingat ke depannya di Kota Semarang akan cenderung di dominasi penduduk lansia.

Kebijakan penyelenggaraan sistem layanan kesehatan yang universal dianggap sebagai salah satu system untuk mendorong kesejahteraan masyarakat yang mayoritas penduduk usia tua atau lansia. Hal yang perlu menjadi perhatian adalah kapasitas pemerintah dalam menyediakan system layanan kesehatan universal seperti pemenuhan asuransi kesehatan yang

memadai untuk masyarakat marginal khususnya masyarakat lansia berpenghasilan rendah. Meminimalisir system administrasi pelayanan kesehatan sehingga pelayanan kesehatan dapat diakses dengan mudah dimanapun dan kapanpun. Berupaya meminimalisir biaya yang dikeluarkan untuk pelayanan pada pasien-pasien terkhusus lansia pada fasilitas kesehatan (puskesmas atau rumah sakit) milik pemerintah, hal ini seperti yang dilakukan di negara-negara maju yang memberikan kemudahan perawatan atau pelayanan bagi masyarakat marginal baik dari masyarakat miskin maupun lansia. Perbaikan infrastruktur kesehatan yang aman, nyaman dan mudah akses bagi lansia juga menjadi salah satu prioritas yang perlu diperhatikan dalam pembangunan maupun revitalisasi sarana prasarana kesehatan milik publik.

5.3.4 Kebijakan Sektor Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor krusial yang mempengaruhi kesehatan dan perekembangan hidup seseorang. Kenkel (1991) menemukan bahwa sekolah mempengaruhi pengetahuan kesehatan dan gaya hidup sehat. Cutler dan Lleras-Muney (2008) menyatakan bahwa pendidikan mempengaruhi kesehatan dan perilaku kesehatan, menyatakan bahwa pendidikan dapat “mengarah pada hal-hal dan metode pengambilan keputusan yang berbeda” dan mengubah perilaku kesehatan. Kebijakan Pendidikan sangat erat kaitannya dengan kebijakan kebijakan yang mempengaruhi pola hidup masyarakat.

Tren peningkatan kualitas pendidikan penduduk di Kota Semarang perlu diimbangi dengan dukungan mendorong peningkatan kesadaran akan kesehatan, mengingat kedepannya mayoritas penduduk di Kota Semarang akan didominasi penduduk lansia. Pendidikan didorong untuk memberikan pengajaran pada pola hidup sehat, untuk mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat ke depannya. Selain mendorong desain pendidikan dengan penekatan pembelajaran pola hidup sehat dimasyarakat, pendidikan juga perlu didorong untuk mampu meningkatkan kapasitas SDM masyarakat yang berkompeten dan memiliki daya saing.

Kebijakan pendidikan juga perlu didorong kadesain Pendidikan dasar yang berfokus pada menciptakan kapasitas dan ketrampilan penduduk yang siap

untuk bekerja. Memperluas system pendidikan dasar dengan mengadopsi kerjasama dengan dunia usaha menjadi salah satu upaya untuk mendorong persiapan SDM yang kompeten dan terampil di dunia kerja. Pemenuhan sarana prasana Pendidikan terkhusus pada kecamatan yang diproyeksi mengalami peningkatan penduduk hingga 2045 juga perlu segera di persiapkan untuk memenuhi kebutuhan akan sarana prasarana pendidikan di setiap kecamatan. Kapasitas pendidik dan tenaga pendidik juga menjadi focus yang perlu dipersiapkan untuk mendorong peningkatan SDM yang unggul di Kota Semarang. Kerjasama dengan perguruan tinggi/universitas/politeknik yang berlokasi di Kota Semarang perlu dilakukan untuk menjadi partner Pemerintah Kota Samarang dalam menciptakan tenaga kerja yang berkompeten.

5.3.5 Kebijakan Tenaga Kerja untuk Mendorong Perekonomian Mandiri

Dihadapkannya kondisi tingginya jumlah penduduk lansia mulai tahun 2040 perlu disikapi dengan mempersiapkan kondisi ekonomi masyarakat yang mumpuni untuk melanjutkan hidup. Berkaca dari negara-negara maju yang memiliki lansia dengan proporsi lebih banyak, perlu adanya kebijakan tenaga kerja yang diambil untuk mengakomodasi penduduk lansia. Terdapat beberapa upaya yang dapat diambil untuk menjawab tantangan tingginya lansia ke depannya. Opsi *pertama* perlu dilakukan persiapan peningkatan kompetensi penduduk usia produktif sehingga mampu mendorong peningkatan produktifitas kerja baik dalam membuka lapangan usaha baru maupun menjadi tenaga kerja profesional, yang nantinya diorong untuk berimplikasi pada peningkatan pendapatan perkapita masyarakat. Peningkatan profesionalitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja baru diharapkan mampu mendorong peningkatan standarisasi upah di Kota Semarang sehingga mampu mendorong peningkatan pendapatan upah per kapita selama masa muda. Hal ini diharapkan menjadi salah satu upaya mempersiapkan kewaspadaan finansial ketika waktu pensiun atau memasuki masa lansia.

Opsi *kedua* adalah melakukan perubahan struktur tenaga kerja dengan mendorong upaya partisipasi lansia sebagai angkatan kerja, sehingga dapat menjadi solusi penundaan masa pensiun. Pemilihan opsi kedua ini berimplikasi

pada perlunya penciptaan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat lansia sekaligus melakukan restrukturisasi usia kerja sehingga lansia dapat dianggap sebagai bagian dari usia kerja.

Mempertimbangkan kedua opsi tersebut, saat ini yang paling ideal untuk dapat dilakukan adalah mendorong tumbuhnya lapangan industri baru untuk penduduk usia produktif sekaligus peningkatan kompetensi ketrampilan kerja penduduk usia kerja sehingga dapat menjadi tenaga kerja profesional dan berdaya saing. Dorongan pembukaan lapangan usaha baru dan peningkatan produktifitas SDM diupayakan agar mampu meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat sehingga dapat menjadi bekal utama ketika masyarakat memasuki masa pensiun.

5.3.6 Kebijakan Pembangunan Inklusif Gender

Memperhatikan hasil proyeksi penduduk, komposisi penduduk penduduk di Kota Semarang ke depannya akan di dominansi oleh penduduk berjenis kelamin perempuan dan lansia, maka perlu adanya dorongan pembangunan inklusif gender. Pembangunan berbasis gender juga menjadi amanat dari SDGs/TPB tujuan ke-11 yang menyerukan pentingnya penyediaan akses universal terhadap ruang-ruang hijau dan publik yang aman, inklusif dan mudah diakses, khususnya bagi perempuan dan anak-anak, orang lanjut usia, dan penyandang disabilitas.

Untuk mendorong terwujudnya pembangunan inklusif gender perlu dipersiapkan berbagai aspek pendukung seperti penyediaan lapangan kerja yang inklusif (terbuka bagi perempuan, disabilitas dan lansia), menciptakan infrasturktur yang inklusif aman bagi perempuan, anak, disabilitas, dan lansia, menciptakan keterbukaan akses partisipasi dalam pengambilan keputusan yang adil dan melibatkan kelompok marginal serta mendorong tumbuhnya pemberdayaan perempuan dan keterwakilan perempuan dalam kelembagaan untuk mengatasi kesenjangan dan diskriminasi yang menjamin kesejahteraan.

Dorongan untuk meningkatkan pembangunan inklusif gender di Kota Semarnag sudah mulai digerakan sejak lama, namun yang perlu menjadi catatan kedepannya kebijakan pembangunan inklusif harus dipastikan keberlanjutannya

sehingga tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam kemajuan Kota Semarang ke depannya.

5.3.7 Kebijakan Strategi Program

Berdasarkan pada kondisi hasil proyeksi jumlah penduduk, proyeksi kebutuhan hunian dan sarana prasana lingkungan, serta memperhatikan langkah kebijakan yang perlu diambil dalam menghadapi kondisi tersebut, maka secara rinci kebijakan strategi yang perlu diambil antara lain sebagai berikut.

Tabel 5.27 Kebijakan Strategi Program

Aspek Proyeksi	Point Hasil Proyeksi	Kebijakan Strategi Program
Proyeksi Jumlah Penduduk		
1. Kelompok Umur	Memasuki tahun 2040 Kelompok umur usia tua (lansia) cenderung mendominasi di Kota Semarang	<ul style="list-style-type: none"> ○ Peningkatan kapasitas SDM untuk mendorong kompetensi tenaga kerja yang unggul ○ Peningkatan kerjasama pendidikan dengan dunia usaha dan perguruan tinggi untuk mendorong tumbuhnya SDM yang siap kerja dan profesional ○ Penciptaan lapangan kerja baru yang inklusif (dapat diakses oleh perempuan, disabilitas, dan lansia) ○ Peningkatan pendapatan perk capita masyarakat ○ Peningkatan hunian perumahan multigenerasi yang memberikan kemudahan mobilitas khususnya untuk penduduk lansia ○ Peningkatan infratruktur yang ramah bagi lansia salah satunya melalui program kampung lansia ○ Peningkatan jaminan kesehatan bagi masyarakat marginal terkhusus lansia ○ Mendorong tumbuhnya pola hidup sehat untuk meningkatkan angka harapan hidup masyarakat
2. Jenis Kelamin	Penduduk berjenis kelamin perempuan cenderung lebih banyak di setiap umur dan kecamatan ke depannya	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pengembangan pembangunan berbasis gender yang berkelanjutan. ○ Penciptaan lapangan kerja baru yang inklusif (dapat diakses oleh perempuan, disabilitas, dan lansia) ○ Memberikan kemudahan akses Pendidikan bagi penduduk perempuan

Aspek Proyeksi	Point Hasil Proyeksi	Kebijakan Strategi Program
		<ul style="list-style-type: none"> ○ Peningkatan emerdayaan perempuan dan keterwakilan perempuan dalam kelembagaan untuk mengatasi kesenjangan dan diskriminasi yang menjamin kesejahteraan
3. Sebaran Jumlah Penduduk berdasarkan Kecamatan	Pergeseran penduduk ke daerah pinggiran menyebabkan beberapa kecamatan di daerah perbatasan seperti Kecamatan Mijen, Gunungpati, Banyumanik, Tembalang, Pedurungan, Genuk, dan Ngaliyan memiliki jumlah penduduk yang lebih banyak dibandingkan kecamatan lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> ○ Peningkatan hunian yang memadai di daerah pinggiran dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan ○ Pemenuhan sarana prasarana lingkungan (Pendidikan, kesehatan, air bersih, perdagangan) untuk menunjang fasilitas penduduk.
Kebutuhan Hunian dan Sarpras		
1. Kebutuhan Perumahan/Hunian	Kebutuhan hunian yang harus dipenuhi sesuai dengan pola persebaran penduduk ke depannya.	<p>Pengembangan perumahan/hunian melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Penyediaan perumahan/hunian di kecamatan-kecamatan yang menjadi lokasi penambahan jumlah penduduk berbasis multigenerasi ○ Memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam membuka lingkungan perumahan atau hunian baru khususnya di wilayah rawan bencana (longsor dan banjir) ○ Penyediaan sarana hunian/perumahan yang dilengkapi dengan sistem sistem drainase, Jalan, system Jaringan Limbah, dan Proteksi Kebakaran sesuai standar
2. Kebutuhan Air Bersih	Kebutuhan air bersih yang harus yang mengalami peningkatan setiap tahunnya	Pengembangan jaringan air bersih melalui:

Aspek Proyeksi	Point Hasil Proyeksi	Kebijakan Strategi Program
	seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan harus dipenuhi	<ul style="list-style-type: none"> ○ Penyediaan jaringan air bersih yang dapat terlayani/tersambung dengan lokasi perumahan (tapping dari pipa PDAM) ○ Penyediaan sarana air bersih komunal, meliputi jaringan distribusi, tangki penampungan, dan rumah pompa
3. Kebutuhan Energi Listrik	Kebutuhan energi listrik yang mengalami peningkatan setiap tahunnya harus dapat disediakan dan dipenuhi	<p>Pengembangan jaringan listrik meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Penyediaan jaringan listrik sesuai kebutuhan berdasarkan jumlah penduduk dan aktivitas kawasan sesuai standar teknis yang berlaku; ○ Penempatan utilitas penunjang tidak mengganggu aktivitas penduduk
4. Kebutuhan Pengelolaan Sampah	Peningkatan timbulan sampah sehingga membutuhkan pola pengelolaan sampah dan tempat pengelolaan yang mencukupi agar tidak menimbulkan timbulan sampah yang menumpuk dan tidak terurai.	<p>Pengembangan jaringan persampahan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Penyediaan prasarana dan sarana persampahan yang melayani skala lingkungan dan kawasan ○ Penyediaan tempat pengolahan sampah ○ Penyediaan tempat pembuangan sampah komunal untuk rusun sewa berupa tempat sampah/tempat pembuangan sementara (TPS)
5. Kebutuhan Sarpras Kesehatan	Peningkatan kebutuhan sarana prasarana kesehatan setiap tahunnya dan harus dipenuhi untuk menjamin terpenuhinya pelayanan kesehatan masyarakat	<p>Pengembangan sarana kesehatan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Penyediaan sarana kesehatan sesuai kebutuhan berdasarkan jumlah penduduk sesuai standar teknis yang berlaku ○ Penempatan sarana kesehatan di lokasi dengan akses terjangkau
6. Kebutuhan Sarpras Pendidikan	Peningkatan kebutuhan sarpras Pendidikan berdasarkan tingkatannya, yang harus	Pengembangan sarana pendidikan meliputi:

Aspek Proyeksi	Point Hasil Proyeksi	Kebijakan Strategi Program
	dipenuhi untuk mendorong penyelenggaraan Pendidikan yang berkualitas.	<ul style="list-style-type: none">○ Penyediaan sarana pendidikan sesuai kebutuhan berdasarkan jumlah penduduk sesuai standar teknis yang berlaku;○ Penempatan sarana pendidikan di lokasi dengan akses terjangkau
7. Kebutuhan Sarpras Perdagangan	Peningkatan kebutuhan sarpras perdagangan seperti pusat pertokoan dan/atau pasar lingkungan dan pusat perbelanjaan dan niaga, yang menjadi sarana perekonomian masyarakat.	<p>Pengembangan sarana perdagangan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">○ Penyediaan sarana perdagangan sesuai kebutuhan berdasarkan jumlah penduduk sesuai standar teknis yang berlaku;○ Penempatan sarana perdagangan di lokasi dengan akses terjangkau

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Kesimpulan hasil proyeksi penduduk dan analisis kebutuhan hunian serta sarana dan prasarana lingkungan di Kota Semarang meliputi

1. Berdasarkan parameter pertumbuhan penduduk, selanjutnya diproyeksikan jumlah penduduk di Kota Semarang pada tahun 2025-2045. Hasil proyeksi menunjukkan bahwa dari tahun 2025 hingga 2045 akan terus jadi peningkatan jumlah penduduk di Kota Semarang. Diproyeksikan di tahun 2025 jumlah penduduk Kota Semarang sebesar 1.722.421 jiwa meningkat menjadi 1.874.716 jiwa jiwa di tahun 2045.
2. Jumlah penduduk usia 0-44 tahun selama 2025-2045 setiap tahunnya diproyeksikan akan terus mengalami penurunan, dikarenakan semakin kecilnya angka kelahiran yang disebabkan oleh adanya perubahan pola hidup penduduk khususnya perempuan, dari segi Pendidikan maupun pendapatan/pekerjaan.
3. Komposisi jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia muda (0-14 tahun), usia produktif (15-64 tahun) dan usia tua (≥ 65 tahun), diproyeksikan jumlah usia produktif masih mendominasi atau lebih banyak dibandingkan usia non produktif (penduduk usia muda dan tua) di tahun 2025 hingga 2045. Meskipun demikian angka ketergantungan penduduk diproyeksikan terus mengalami peningkatan dari 2025 angka ketergantungan sebesar 40,97% (artinya dalam 100 penduduk usia produktif menanggung beban 41 penduduk usia non produktif) meningkat setiap tahunnya hingga ditahun 2045 angka ketergantungan Kota Semarang menjadi 53,42% artinya dalam 100 penduduk usia produktif menanggung beban 53 penduduk usia non produktif).
4. Dari tahun 2025 hingga 2045 terdapat 7 kecamatan yang terus mengalami pertambahan jumlah penduduk setiap tahunnya yakni Kecamatan Mijen, Gunungpati, Banyumanik, Tembalang, Pedurungan, Genuk, dan Ngaliyan.

Selain karena tren selama 10 tahun kebelakang di 7 kecamatan tersebut terus mengalami kenaikan, pertambahan jumlah penduduk juga diprediksi terjadi karena arah persebaran penduduk yang mulai menuju daerah pinggi (pusat pelayanan kota) atau daerah perbatasan, dan juga karena faktor pembangunan infratruktur daerah pinggiran kota yang semakin massif.

5. Terdapat dua metode pendekatan untuk menentukan bonus demografi yang yakni metode Cheung et al dan metode Adioetomo. Berdasarkan kedua metode pendekatan tersebut maka dapat diasumsikan bahwa Kota Semarang akan mengalami bonus demografi pada kisaran tahun 2030-2040
6. Komposisi jumlah penduduk Kota Semarang munurut kecamatan dan jenis kelamin diproyeksikan bahwa dari tahun 2025 hingga 2025 masih di dominasi penduduk berjenis kelamin perempuan.
7. Selama kurun waktu 20 tahun dari tahun 2025 hingga 2045, kepadatan penduduk di Kota Semarang diproyeksikan terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk di Kota Semarang. Pada tahun 2025 kepadatan penduduk di Kota Semarang di prediksi mencapai 4.608 jiwa/km², kemudian terus mengalami kenaikan setiap tahunnya hingga tahun 2045 diprediksi kepadatan penduduk di Kota Semarang mencapai 5.016 jiwa/km².
8. Dari tahun 2025 hingga 2045 Kota Semarang mengalami perubahan wilayah dilihat dari kepadatan penduduknya. Pada tahun 2025 diproyeksikan terdapat 5 Kecamatan dengan kepadatan penduduk berstatus rendah yakni Kecamatan Mijen, Gunungpati, Banyumanik, Tugu dan Ngaliyan. Hingga di tahun 2040 hingga 2045 diproyeksikan terdapat 6 kecamatan dengan kondisi status kepadatan penduduknya rendah yakni Kecamatan Mijen, Gunungpati, Gajahmungkur, Semarang Tengah, Tugu, dan Ngaliyan.
9. Kebutuhan hunian Kota Semarang adalah sebanyak 574.140 hunian pada tahun 2025, 594.192 hunian pada tahun 2030, 609.635 hunian pada tahun 2035, 619.956 hunian pada tahun 2040, dan 624.906 hunian pada tahun 2045. Kebutuhan luas kavling minimum hunian Kota Semarang adalah sebesar 41.338.098 m² pada tahun 2025, 42.781.793 m² pada tahun 2030, 43.893.705 m² pada tahun 2035, 44.636.849 m² pada tahun 2040, dan 44.993.197 m² pada tahun 2045.

10. Kebutuhan air bersih Kota Semarang adalah sebanyak 206.690.490 L/hari pada tahun 2025, 213.908.966 L/hari pada tahun 2030, 219.468.527 L/hari pada tahun 2035, 223.184.247 L/hari pada tahun 2040, dan 224.965.984 L/hari pada tahun 2045.
11. Timbulan sampah Kota Semarang adalah sebesar 1.205.695 kg/hari atau 440.079 ton pada tahun 2025, 1.247.802 kg/hari atau 455.448 ton pada tahun 2030, 1.280.233 kg/hari atau 467.285 ton pada tahun 2035, 1.301.908 kg/hari atau 475.196 ton pada tahun 2040, dan 1.312.302 kg/hari atau 478.990 ton pada tahun 2045.
12. Kebutuhan TPS Kota Semarang adalah sebagai berikut: TPS tipe I sebanyak 689 unit pada tahun 2025, 713 unit pada tahun 2030, 732 unit pada tahun 2035, 744 unit pada tahun 2040, dan 750 unit pada tahun 2045; TPS tipe II sebanyak 57 unit pada tahun 2025, 59 unit pada tahun 2030, 61 unit pada tahun 2035, 62 unit pada tahun 2040, dan 62 unit pada tahun 2045; serta TPS tipe III sebanyak 14 unit pada tahun 2025, 15 unit pada tahun 2030, 15 unit pada tahun 2035, 15 unit pada tahun 2040, dan 16 unit pada tahun 2045.
13. Kebutuhan luas lahan minimum TPS Kota Semarang adalah sebagai berikut: TPS tipe I sebanyak 6.890 m² pada tahun 2025, 7.130 m² pada tahun 2030, 7.316 m² pada tahun 2035, 7.439 m² pada tahun 2040, dan 7.499 m² pada tahun 2045; TPS tipe II sebanyak 3.445 m² pada tahun 2025, 3.565 m² pada tahun 2030, 3.658 m² pada tahun 2035, 3.720 m² pada tahun 2040, dan 3.749 m² pada tahun 2045; serta TPS tipe III sebanyak 2.871 m² pada tahun 2025, 2.971 m² pada tahun 2030, 3.048 m² pada tahun 2035, 3.100 m² pada tahun 2040, dan 3.125 m² pada tahun 2045
14. Kebutuhan posyandu Kota Semarang adalah sebanyak 1.378 unit pada tahun 2025, 1.426 unit pada tahun 2030, 1.463 unit pada tahun 2035, 1.488 unit pada tahun 2040, dan 1.500 unit pada tahun 2045. Kebutuhan luas lahan minimum posyandu Kota Semarang adalah sebesar 82.676 m² pada tahun 2025, 85.564 m² pada tahun 2030, 87.787 m² pada tahun 2035, 89.274 m² pada tahun 2040, dan 89.986 m² pada tahun 2045.
15. Kebutuhan BKIA atau klinik bersalin Kota Semarang adalah sebanyak 57 unit pada tahun 2025, 59 unit pada tahun 2030, 61 unit pada tahun 2035, 62 pada

tahun 2040, dan 62 unit pada tahun 2045. Kebutuhan luas lahan minimum BKIA atau klinik bersalin Kota Semarang adalah sebesar 172.242 m² pada tahun 2025, 178.257 m² pada tahun 2030, 182.890 m² pada tahun 2035, 185.987 m² pada tahun 2040, dan 187.472 m² pada tahun 2045.

16. Kebutuhan puskesmas pembantu dan balai pengobatan lingkungan Kota Semarang adalah sebanyak 57 unit pada tahun 2025, 59 unit pada tahun 2030, 61 unit pada tahun 2035, 62 pada tahun 2040, dan 62 unit pada tahun 2045. Kebutuhan luas lahan minimum puskesmas pembantu dan balai pengobatan lingkungan Kota Semarang adalah sebesar 17.224 m² pada tahun 2025, 17.826 m² pada tahun 2030, 18.289 m² pada tahun 2035, 18.599 m² pada tahun 2040, dan 18.747 m² pada tahun 2045.
17. Kebutuhan puskesmas dan balai pengobatan Kota Semarang adalah sebanyak 14 unit pada tahun 2025, 15 unit pada tahun 2030, 15 unit pada tahun 2035, 15 pada tahun 2040, dan 16 unit pada tahun 2045. Kebutuhan luas lahan minimum puskesmas dan balai pengobatan Kota Semarang adalah sebesar 14.354 m² pada tahun 2025, 14.855 m² pada tahun 2030, 15.241 m² pada tahun 2035, 15.499 m² pada tahun 2040, dan 15.623 m² pada tahun 2045.
18. Kebutuhan apotek Kota Semarang adalah sebanyak 57 unit pada tahun 2025, 59 unit pada tahun 2030, 61 unit pada tahun 2035, 62 pada tahun 2040, dan 62 unit pada tahun 2045. Kebutuhan luas lahan minimum apotek Kota Semarang adalah sebesar 14.354 m² pada tahun 2025, 14.855 m² pada tahun 2030, 15.241 m² pada tahun 2035, 15.499 m² pada tahun 2040, dan 15.623 m² pada tahun 2045.
19. Kebutuhan TK Kota Semarang adalah sebanyak 1.378 unit pada tahun 2025, 1.426 unit pada tahun 2030, 1.463 unit pada tahun 2035, 1.488 pada tahun 2040, dan 1.500 unit pada tahun 2045. Kebutuhan luas lahan minimum TK Kota Semarang adalah sebesar 688.968 m² pada tahun 2025, 713.030 m² pada tahun 2030, 731.562 m² pada tahun 2035, 743.947 m² pada tahun 2040, dan 749.887 m² pada tahun 2045.
20. Kebutuhan SD Kota Semarang adalah sebanyak 1.077 unit pada tahun 2025, 1.114 unit pada tahun 2030, 1.143 unit pada tahun 2035, 1.162 pada tahun

2040, dan 1.172 unit pada tahun 2045. Kebutuhan luas lahan minimum SD Kota Semarang adalah sebesar 2.153.026 m² pada tahun 2025, 2.228.218 m² pada tahun 2030, 2.286.130 m² pada tahun 2035, 2.324.836 m² pada tahun 2040, dan 2.343.396 m² pada tahun 2045.

21. Kebutuhan SMP Kota Semarang adalah sebanyak 359 unit pada tahun 2025, 371 unit pada tahun 2030, 381 unit pada tahun 2035, 387 pada tahun 2040, dan 391 unit pada tahun 2045. Kebutuhan luas lahan minimum SMP Kota Semarang adalah sebesar 3.229.539 m² pada tahun 2025, 3.342.328 m² pada tahun 2030, 3.429.196 m² pada tahun 2035, 3.487.254 m² pada tahun 2040, dan 3.515.094 m² pada tahun 2045.
22. Kebutuhan SMA Kota Semarang adalah sebanyak 359 unit pada tahun 2025, 371 unit pada tahun 2030, 381 unit pada tahun 2035, 387 pada tahun 2040, dan 391 unit pada tahun 2045. Kebutuhan luas lahan minimum SMA Kota Semarang adalah sebesar 4.485.471 m² pada tahun 2025, 4.642.122 m² pada tahun 2030, 4.762.772 m² pada tahun 2035, 4.843.408 m² pada tahun 2040, dan 4.882.074 m² pada tahun 2045.
23. Kebutuhan pusat pertokoan dan/atau pasar lingkunga Kota Semarang adalah sebanyak 57 unit pada tahun 2025, 59 unit pada tahun 2030, 61 unit pada tahun 2035, 62 pada tahun 2040, dan 62 unit pada tahun 2045. Kebutuhan luas lahan minimum pusat pertokoan dan/atau pasar lingkunga Kota Semarang adalah sebesar 574.140 m² pada tahun 2025, 594.192 m² pada tahun 2030, 609.635 m² pada tahun 2035, 619.956 m² pada tahun 2040, dan 624.906 m² pada tahun 2045.
24. Kebutuhan pusat perbelanjaan dan niaga Kota Semarang adalah sebanyak 14 unit pada tahun 2025, 15 unit pada tahun 2030, 15 unit pada tahun 2035, 15 pada tahun 2040, dan 16 unit pada tahun 2045. Kebutuhan luas lahan minimum pusat pertokoan dan/atau pasar lingkunga Kota Semarang adalah sebesar 516.726 m² pada tahun 2025, 534.772 m² pada tahun 2030, 548.671 m² pada tahun 2035, 557.961 m² pada tahun 2040, dan 562.415 m² pada tahun 2045.

6.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil perhitungan proyeksi penduduk dan kebutuhan hunian serta sarana dan prasarana lingkungan di Kota Semarang Tahun 2025-2045 maka rekomendasi kebijakan yang perlu diambil untuk mengakomodir kondisi komposisi penduduk dan kebutuhan sarana parasarana lingkungan antara lain adalah:

1. Mendorong penyedian infrastuktur hunian sesuai dengan kebutuhan, khususnya dengan melakukan optimalisasi penggunaan lahan di kecamatan-kecamatan yang diproyeksi mengalami pertambahan penduduk. Penyediaan hunian juga harus memperhatikan pola ruang dan struktur ruang yang terdapat dalam RTRW Kota Semarang
2. Dengan memperhatikan adanya bonus demografi di tahun 2025 perlu adanya kebijakan berbasis peningkatan SDM yang berdaya saing untuk mendorong kompetensi masyarakat sekalius mendorong terbukanya peluang usaha baru. Memasuki Tahun 2030 hingga 2040 perlu penguatan kapasitas SDM dan penguatan sektor usaha baik dibidang UMKM maupun sektor yang perpotensi lainnya untuk mendorong serapan tenaga kerja dan tumbuhnya ekonomi masyarakat yang mandiri. Selanjutnya memasuki tahun 2045 perlu adanya dorongan untuk menumbuhkan peluang kerja berbasis lansia sebagai upaya memfasilitasi masyarakat usia lansia yang membutuhkan pekerjaan.
3. Mendorong tumbuhnya peluang usaha berbasis perempuan mengingat kedepannya komposisi penduduk perempuan cenderung lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki.
4. Memfokuskan pembangunan TPS sebagai sarana pengelolaan persampahan di wilayah padat penduduk sesuai kebutuhan sarpras pengelolaan persambahan dengan memperhatikan kondisi lingkungan
5. Mendorong terpenuhinya kebutuhan sarana kesehatan untuk mempersiapkan kualitas kesehatan penduduk terkhusus penduduk lansia.
6. Mendorong pemenuhan sarana Pendidikan yang mendorong peningkatan kompetensi SDM masyarakat sejak tahun 2025 untuk mempersiapkan peluang dan tantangan menghadapi bonus demografi.

7. Menciptakan perumahan multigenerasi seperti yang telah muncul di Kota Berlin Jerman untuk mendorong munculnya desain ruang kota yang ramah dan lanyak sebagai hunian lansia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adioetomo, S. M. (2005). *Bonus Demografi Menjelaskan Hubungan antara Pertumbuhan Penduduk dengan Pertumbuhan Ekonomi*. Retrieved from Universitas Indonesia Library: <https://lib.ui.ac.id/m/detail.jsp?id=115532&lokasi=lokal#>
- Adioetomo, S. M., & Samosir, O. B. (2010). *Dasar-Dasar Demografi Edisi 2*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Badan Pusat Statistik. (2010). *Pedoman Penghitungan Pedoman Penghitungan Proyeksi Penduduk Proyeksi Penduduk dan Angkatan Kerja*. Retrieved from Media Nelite: <https://media.nelite.com/media/publications/49951-ID-pedoman-penghitungan-proyeksi-penduduk-dan-tenaga-kerja.pdf>
- Ehrlich, P. R. (1968). *The Population Bomb*. New York: Ballantine Books.
- Harmadi, S. H. (2016). *Analisis Data Demografi*. Retrieved from Perpustakaan Universitas Terbuka: <https://pustaka.ut.ac.id/lib/espa4355-analisis-data-demografi/#tab-id-3>
- Malthus, T. R. (1998). *An Essay on the Principle of Population*. London: ESPN.
- Mantra, I. B. (2000). *Demografi Umum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Meadows, D. H., Meadows , D. L., Randers, J., & Behrens III , W. W. (1972). *The Limits to Growth: A Report for the Club of Rome's Project on the Predicament of Mankind*. New York: Universe Books.
- Standar Nasional Indonesia 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan